Perubahan Renja Bapeda Kab. Karangasem Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PERENCANAAN DAERAH
JALAN DIPONEGORO NO. 52 AMLAPURA
Tlp. (0363) 21013 Fax. (0363) 22352

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa,Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Waranugraha-Nya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 telah selesai disusun sesuai jadwal yang ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisaasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini. Semoga semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dengan indikator kinerja dan pagu indikatif mendapatkan pendanaan dan dilanjutkan menjadi RKA Bapeda Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Amlapura 29 Juli 2024
Kepala Bapeda Kab.Karangasem

I Nyoman Sutirtayasa, ST., MT
Pembina Utama Muda
Nip.19670805 199703 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPEDA KABUPATEN KARANGASEM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024..... 7

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapeda Kabupaten Karangasem Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024..... 7

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapeda Kabupaten Karangasem..... 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPEDA KABUPATEN KARANGASEM..... 9

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bapeda Kabupaten Karangasem..... 9

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Bapeda Kabupaten Karangasem..... 9

3.3 Program dan Kegiatan..... 10

BAB IV PENUTUP **16**

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapeda Kabupaten Karangasem Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 3.1 Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karanagasem Tahun 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Berdasarkan evaluasi terhadap realisasi dan capaian sampai triwulan II tahun 2024, terdapat beberapa kebutuhan dan kegiatan yang perlu dilakukan perubahan, oleh karena itu perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Karangasem Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Karangasem Tahun 2024 menjadi dokumen penting dalam menjelaskan serangkaian kegiatan yang dilakukan pada perubah untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang mengacu pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Karangasem Tahun 2024 merupakan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapeda. Perubahan Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Karangasem Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026. Sebagai sebuah dokumen resmi Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapeda Kabupaten Karangasem Tahun 2024 digunakan sebagai dasar pengusulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang nantinya akan diakomodir dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2024 yang nantinya akan ditetapkan menjadi DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah **:**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomo 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah:

1. Untuk melakukan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada pelaksanaan perubahan anggaran Tahun 2024;
2. Untuk memenuhi kebutuhan yang belum terakomodir dalam DPA Tahun 2024;
3. Memberikan acuan dalam menyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Karangasem yang nantinya akan dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Karangasem Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026) dan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2024 untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024);

2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan maupun fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Karangasem Tahun 2024;
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi target capaian progam, kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Karangasem Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Karangasem agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Karangasem, Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Karangasem, keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Karangasem dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Karangasem serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappelitbangda Kabupaten Karangasem.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Bapeda Kabupaten Karangasem.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Perubahan Renja Bapeda Kabupaten Karangasem, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPEDA KABUPATEN KARANGASEM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan Bapeda Kabupaten Karangasem, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II dan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapeda Kabupaten Karangasem.

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapeda Kabupaten Karangasem Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Memuat capaian sasaran Renja Bapeda Kabupaten Karangasem tahun 2024, capaian program dan kegiatan Renja Bapeda Kabupaten Karangasem tahun 2024.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapeda

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bapeda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bapeda, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bapeda Kabupaten Karangasem.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPEDA,

Memuat tentang penjelasan perubahan-perubahan pada program dan kegiatan serta pendanaan program kegiatan (sesuai dengan lampiran Perubahan RKPD 2024).

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bapeda Kabupaten Karangasem

Perumusan penyesuaian tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapeda Kabupaten Karangasem yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bapeda Kabupaten Karangasem.

3.2. Stategi dan Arah Kebijakan Bapeda Kabupaten Karangasem

Memuat penyesuaian strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja.

3.3. Program dan Kegiatan Bapeda Kabupaten Karangasem

Memuat program dan kegiatan serta perubahannya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPEDA KABUPATEN KARANGASEM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapeda Kabupaten Karangasem Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Bapeda Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Bapeda dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Bapeda Tahun 2024 serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bapeda Kabupaten Karangasem Tahun 2024 digambarkan sebagaimana tabel 2.1 terlampir. Dari tabel 2.1 dapat digambarkan target dan realisasi Rencana Kerja Bapeda Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Adapun beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Bapeda Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, yaitu:

1 Adanya mekanisme baru pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog, dimana perlu penyesuaian dalam proses realisasi maupun mekanisme SPJ;
2 Proses penatausahaan yang baru dilaksanakan melalui SIPD RI, memerlukan penyesuaian dalam tahapan pengelolaan SIPD RI
3 Belum adanya sistem evaluasi dan monitoring yang terintegrasi, sehingga evaluasi dan monitoring masih dilakukan secara manual (tanpa sistem);

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapeda Kabupaten Karangasem

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapeda Kabupaten Karangasem tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu strategis terkait pembangunan yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun di masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan

penyusunan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan tugas dan fungsi Bapeda yaitu :

1. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi pembangunan melalui sistem yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan;
2. Masih lemahnya proses pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Terbatasnya kompetensi dan jumlah sumber daya perencana;
4. Masih kurang optimalnya peran bidang koordinasi dalam membantu merumuskan usulan-usulan masyarakat yang menjadi prioritas;
5. Belum adanya pemetaan risiko terhadap sasaran strategis pemerintah daerah.

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis merupakan prasyarat tercapainya keberhasilan pembangunan di setiap dimensi, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Mengacu kepada konsep pembangunan berkelanjutan, maka pelaksanaan pembangunan tentunya harus melihat dari ke-empat dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan ekologi/lingkungan, yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan.

Dari isu-isu dan permasalahan yang dihadapi perlu adanya dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mampu menjawab isu dan permasalahan tersebut. Program yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renja Bapeda Tahun 2024 masih sama dengan program yang dilaksanakan di Renja Induk Tahun 2024. Yang terdiri dari 2 program prioritas yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dan 1 program pendukung yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPEDA KABUPATEN KARANGASEM

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bapeda Kabupaten Karangasem

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian sasaran dan tujuan Bapeda Kabupaten Karangasem. Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Tahun 2024 mendukung misi ke 6 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 **"Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima".** Tujuan 22 **"Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik",** sasaran 33 **"Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik".** Dimana dalam implementasinya dirumuskan melalui tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Bapeda yang mengampu urusan perencanaan daerah.

Adapun tujuan dari Perubahan Renja Bapeda Kabupaten Karangasem Tahun 2024 masih sama dengan Renja Induk Tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapeda.

Sasaran dari Perubahan Renja Bapeda Kabupaten Karangasem Tahun 2024 juga tidak mengalami perubahan masih sama dengan Renja Induk Tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatnya kesesuaian dan keselarasan dokumen perencanaan daerah dan capaian sasaran pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan Bapeda.

Adapun penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapeda Kabupaten Karangasem Tahun 2024 bertujuan untuk mengakomodir semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Bapeda Kabupaten Karangasem

Dalam Perubahan Rencana Kerja Bapeda Tahun 2024 mengalami penambahan anggaran dari anggaran induk, untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan (khususnya penambahan TPP), memenuhi kebutuhan belanja modal, belanja pemeliharaan gedung,

penambahan anggota tim ahli sebanyak 6 orang, perjalanan dinas dan biaya Rakor Bapeda se Bali.

Pada Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 tidak mengalami perubahan strategi dan arah kebijakan. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sebatas penambahan dan pergeseran anggaran untuk mengakomodir kekurangan dan kebutuhan yang belum teranggarkan pada induk 2024.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program, kegiatan, sub kegiatan indikatif dan target kinerja. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya yaitu :

1. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Penyesuaian terhadap kebutuhan dan kegiatan prioritas yang belum terakomodir dalam DPA-SKPD Tahun 2024;
3. Penyesuaian target terhadap sub kegiatan yang mengalami penyesuaian anggaran.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024, sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif perubahan Rp. 5.399.467.713, terdiri dari 6 Kegiatan yaitu:
   a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu indikatif Rp. 3.644.200, terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif Rp. 300.000
      2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan pagu indikatif Rp. 1.559.700
      3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan pagu indikatif Rp. 1.559.700

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan pagu indikatif Rp. 224.800.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu indikatif Rp. 3.423.547.812, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu indikatif Rp. 3.327.013.603
   2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu indikatif Rp. 95.539.809
   3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu indikatif Rp. 434.400

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu indikatif Rp. 478.987.398, terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu indikatif Rp. 11.978.900;
   2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu indikatif Rp. 203.047.500;
   3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu indikatif Rp. 34.676.400;
   4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu indikatif Rp. 11.000.000;
   5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu indikatif Rp. 218.284.598

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu indikatif Rp. 727.571.300, terdiri dari 3 sub kegiatan:
   1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu indikatif Rp.430.000.000
   2 Pengadaan Mebel dengan pagu indikatif 27.707.500
   3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu indikatif Rp. 269.863.800

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu indikatif Rp. 168.707.531terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu indikatif Rp. 2.500.000;
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu indikatif Rp. 73.377.683;

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu indikatif Rp. 56.498.624
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu indikatif Rp. 36.331.224

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu: dengan pagu indikatif Rp. 595.569.472

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu indikatif Rp. 256.075.800
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu indikatif Rp. 29.000.000
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu indikatif Rp. 310.493.672

2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan pagu indikatif Rp. 1.102.700.148, terdiri dari 3 Kegiatan yaitu:

a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan pagu indikatif Rp. 1.007.088.324, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan konsultasi publik dengan pagu indikatif Rp. 24.196.000;
2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif Rp. 44.210.100;
3. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif Rp. 938.682.224.

b) Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu indikatif Rp. 57.644.412, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu indikatif Rp. 43.717.412;
2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif Rp. 13.927.000

c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu indikatif Rp. 37.967.412 terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan pagu indikatif Rp. 37.967.412

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu indikatif Rp. 203.879.896, terdiri dari 3 kegiatan :

a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan pagu indikatif Rp. 80.426.636, terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan pagu indikatif Rp. 18.764.012
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan pagu indikatif Rp. 598.400;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan pagu indikatif Rp. 598.400;
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan pagu indikatif Rp. 352.000;
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan pagu indikatif Rp. 352.000
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan pagu indikatif Rp. 18.764.012
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan pagu indikatif Rp. 15.164.012
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan pagu indikatif Rp. 25.833.800

b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan pagu indikatif Rp. 47.192.424, terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan pagu indikatif Rp. 2.830.800;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan pagu indikatif Rp. 18.623.212;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan pagu indikatif Rp. 932.000;
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dengan pagu indikatif Rp. 1.465.000;
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan pagu indikatif Rp. 20.978.812;
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan pagu indikatif Rp. 457.600;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan pagu indikatif Rp. 440.000;
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dengan pagu indikatif Rp. 1.465.000.

c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan pagu indikatif Rp. 76.260.836, terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan pagu indikatif Rp. 21.471.612;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan pagu indikatif Rp. 1.003.200;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan pagu indikatif Rp. 950.400;

4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan pagu indikatif Rp. 26.369.612;
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan pagu indikatif Rp. 2.778.000;
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan pagu indikatif Rp. 1.020.800;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan pagu indikatif Rp. 19.151.212;
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dengan pagu indikatif Rp. 3.516.000.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan sesuai yang terinput di SIPD RI dapat dilihat pada tabel 3.1 terlampir.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bapeda dan merupakan ukuran keberhasilan dan capaian kinerja dari pelaksanaan tugas-tugas oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 disusun untuk dapat menyesuaikan kebutuhan dan prioritas yang mengalami perubahan baik itu berupa anggaran maupun indikator dan target yang ingin dicapai. Dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 mengakomodir sub kegiatan serta aktifitasnya yang dianggap sangat penting dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran dan tujuan dimana sebelumnya belum terakomodir dalam Renja induk tahun 2024. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II sangat penting dalam menentukan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024. Pada Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini mengakomodir pergeseran dan penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan:

1 Kekurangan TPP
2 Belanja Modal
3 Pemeliharaan gedung kantor
4 Penambahan anggota tim ahli sebanyak 6 orang
5 Penambahan biaya perjalanan dinas.
6 Penambahan biaya Rakor Bapeda se Bali

Dimana anggarannya dibiayai dari penambahan dan pergeseran anggaran. Penyesuaian anggaran pada perubahan Rencana Kerja Bapeda Tahun 2024 mengakibatkan berubahnya pagu induk yang awalnya sebesar Rp. 5.489.374.019 menjadi Rp. 6.706.047.757 bertambah sebesar Rp.1.216.673.738.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem serta kerjasama dan peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Karangasem untuk mencapai kinerja yang optimal.

TABEL 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapeda Kabupaten Karangasem Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Kode rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
																I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%	
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan , pengelolaan keuangan dan kinerja Bappelitbangda (mendukung sasaran 33 terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik)**	**5**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas tugas perangkat daerah	500	%	32.249.098.681	200	8.677.446.095,00	100	4.301.180.375,00	20	677.795.298,00	35	1.489.052.817,00					55	2.166.848.115,00	255	10.844.294.210,00	51%	33,63%
		5	**1**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya administrasi keuangan (Gaji dan tunjangan,penatausahaan keuanngan, pelaksanaan akuntansi SKPD)	500	%	22.381.213.356,00	200	6.407.344.556,00	100	3.302.702.974,00	25	604.675.777,00	25	1.160.523.170,00					50	1.765.198.947,00	250	8.172.543.503,00	50%	36,52%
		5	**1**	**1**	**02.02**	**1**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	60	bulan	21.585.356.156,00	24	6.181.902.556	12	3.206.728.765,00	3	589.619.527,00	3	1.137.728.795,00					6,00	1.727.348.322,00	30,00	7.909.250.878,00	50%	36,64%
		5	**1**	**1**	**02.02**	**3**	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan terlaksananya penatausahaan/ verifikasi keuangan	60	bulan	786.617.200,00	24	224.732.000,00	12	95.539.809,00	3	15.056.250,00	3	22.584.375,00					6,00	37.640.625,00	30,00	262.372.625,00	50%	33,35%
		5	**1**	**1**	**02.02**	**4**	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan keuangan yang tersusun dandisampaikan tepat waktu	10	jenis laporan	9.240.000,00	4	710.000,00	1	434.400,00			1	210.000,00					1,00	210.000,00	5,00	920.000,00	50%	9,96%
		5	**1**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan lancar	500	%	4.700.855.525,00	200	984.420.347,00	100	425.925.898,00	20	10.883.919,00	25	173.433.648,00					45	184.317.567,00	245	1.168.737.914,00	49%	24,86%
		5	**1**	**1**	**02.06**	**4**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan logistik kantor	60	bulan	2.999.974.425,00	24	416.625.067,00	12	218.783.200,00	3	2.913.000,00	3	72.230.550,00					6,00	75.143.550,00	30,00	491.768.617,00	50%	16,39%
		5	**1**	**1**	**02.06**	**1**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang diadakan	60	jenis	60.000.000,00	24	21.892.100,00	12	11.978.900,00			3	2.378.000,00					3,00	2.378.000,00	27,00	24.270.100,00	45%	40,45%

No	Sasaran	Kode rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
																I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%	
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bulan	494.872.300,00	24	61.424.000,00	12	38.879.200,00			3	7.487.100,00					3,00	7.487.100,00	27,00	68.911.100,00	45%	13,93%
		5	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	Jumlah bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	10	jenis	82.000.000,00	10	20.820.000,00	10	11.000.000,00			10	3.775.000,00					10,00	3.775.000,00	20,00	24.595.000,00	200%	29,99%
		5	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	80	kali	1.064.008.800,00	30	463.659.180,00	15	145.284.598,00	1	7.970.919,00	9	87.562.998,00					10,00	95.533.917,00	40,00	559.193.097,00	50%	52,56%
								Jumlah terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	140	kali														0,00	0,00	0,00	0,00		
		5	1	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah**	Persentase tersedianya kebutuhan peralatan dan mesin kantor penunjang urusan pemerintahan daerah	500	%	3.432.344.800,00	200	139.672.500,00	100	0,00		0,00							0	0,00	200	139.672.500,00	40%	4,07%
		5	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda empat yang diadakan	2	unit	670.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0%	0,00%
								Jumlah Kendaraan dinas/operasional roda dua yang diadakan	12	unit	690.680.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0,00%
		5	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	10	paket	150.000.000,00	3	39.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3	39.250.000,00	30%	26,17%
		5	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diadakan	43	unit	542.360.000,00	8	100.422.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8	100.422.500,00	19%	18,52%
		5	1	1	02.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana yg diadakan	26	unit	260.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0%	0,00%
		5	1	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500	%	1.091.564.800,00	200	303.882.544,00	100	172.796.831,00	20	26.900.102,00	20	46.212.424,00					40	73.112.526,00	240	376.995.070,00	48%	34,54%

No	Sasaran	Kode rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
																I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%	
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diperlukan dalam Penyelenggaran Jasa Surat Menyurat	2624	lembar	27.740.000,00	250	4.000.000,00	250	2.500.000,00	50	500.000,00	50	500.000,00					100	1.000.000,00	350,00	5.000.000,00	13%	18,02%
								Terpenuhinya jasa paket pengiriman	60	bulan	7.500.000,00	24	1.738.510,00	12	1.000.000,00				323.500,00					0,00	323.500,00	24,00	2.062.010,00	40%	27,49%
		5	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air,listrik,telepon dan internet yang terbayar	4	rekening	470.000.000,00	4	113.186.034,00	4	73.377.683,00	4	14.955.102	4	24.111.324,00					8,00	39.066.426,00	12,00	152.252.460,00	300%	32,39%
		5	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya pealatan dan jasa kebersihan	171	jenis	391.000.000,00	51	112.688.000,00	11	59.587.924,00	3	5.422.500	5	12.243.850,00					8,00	17.666.350,00	59,00	130.354.350,00	35%	33,34%
		5	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	120	ob	195.324.800,00	48	72.270.000,00	24	36.331.224,00	6	6.022.500,00	6	9.033.750,00					12,00	15.056.250,00	60,00	87.326.250,00	50%	44,71%
		5	1	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	500	%	4.045.625.000,00	200	833.956.023,00	100	396.110.472,00	10	34.401.500,00	20	108.697.575,00					30	143.099.075,00	230	977.055.098,00	46%	24,15%
		5	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	13	unit	2.585.625.000,00	13	479.508.884,00	13	251.620.800,00	3	15.504.000	3	75.371.325,00					6,00	90.875.325,00	19,00	570.384.209,00	146%	22,06%
		5	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung dan kantor	60	bulan	310.000.000,00	24	39.202.250,00	12	26.000.000,00	3	830.000	3	5.125.000,00					6,00	5.955.000,00	30,00	45.157.250,00	50%	14,57%
		5	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terpelihara	3	unit	1.150.000.000,00	3	315.244.889,00	3	118.489.672,00		18.067.500		28.201.250,00					0,00	46.268.750,00	3,00	361.513.639,00	100%	31,44%

No	Sasaran	Kode rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
																I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%	
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5	1	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappelitbangda yang selesai tepat waktu	500	persen	29.840.000,00	200	8.170.125,00	100	3.644.200	20	934.000,00	35	186.000,00							55	1.120.000,00	255	9.290.125,00	51%	31,13%
		5	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra dan Renja)perangkat daerah yang selesai tepat waktu	10	jenis dokumen	2.100.000,00	4	599.250,00	2	300.000									0,00	0,00	4,00	599.250,00	40%	28,54%
		5	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun tepat waktu	5	jenis dokumen	2.100.000,00	2	593.250,00	1									0,00	0,00	2,00	593.250,00	40%	28,25%
		5	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun tepat waktu	5	jenis dokumen	2.100.000,00	2	543.750,00	1									0,00	0,00	2,00	543.750,00	40%	25,89%
		5	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun tepat waktu	5	jenis dokumen	10.780.000,00	2	2.800.000,00	1	1.559.700,00	1	934.000,00							1,00	934.000,00	3,00	3.734.000,00	60%	34,64%
		5	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA0SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang tersusun tepat waktu	5	jenis dokumen	10.780.000,00	2	3.290.000,00	1	1.559.700,00									0,00	0,00	2,00	3.290.000,00	40%	30,52%
		5	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan (LKJIP dan LKPJ/LPPD) yang tersusun dan disampaikan tepat waktu	5	s dokumen	1.980.000,00	2	343.875,00	1	224.800,00	1			186.000,00					1,00	186.000,00	3,00	529.875,00	60%	26,76%
2	Meningkatnya kesesuaian dan keselarasan dokumen perencanaan daerah dan capaian sasaran pembangunan daerah (mendukung sasaran	5	1	2			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase tercapainya sasaran pembangunan daerah	500	%	5.036.846.401,00	200	862.301.300,00	100	930.700.548,00	25	95.720.500,00	25	231.843.000,00							50	327.563.500,00	250	1.189.864.800,00	50%	23,62%

No	Sasaran	Kode rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
																I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%	
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5	**1**	**2**	**02.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	500	%	3.194.753.601,00	200	380.055.300,00	100	833.738.724,00	25	89.698.000,00	20	209.449.750,00		0,00			45	299.147.750,00	245	679.203.050,00	49%	21,26%
		5	1	2	02.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rumusan hasil analisisKondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	5	dokumen	44.343.375,00	1	1.135.000,00											0,00	0,00	1,00	1.135.000,00	20%	2,56%
		5	1	2	02.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rumusan hasil Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	5	dokumen	20.144.000,00	1	1.136.000,00											0,00	0,00	1,00	1.136.000,00	20%	5,64%
		5	1	2	02.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Forum konsultasi publik	6	kali	46.520.000,00	2	19.655.600,00	2	49.648.600,00	2	11.480.000,00		9.220.000,00					2,00	20.700.000,00	4,00	40.355.600,00	67%	86,75%
		5	1	2	02.01	4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan pembangunan daerah hasil Musrenbang yang tersusun	5	dokumen	539.029.520,00	2	53.064.600,00	3	69.459.700,00	1	7.920.500		30.565.000,00					1,00	38.485.500,00	3,00	91.550.100,00	60%	16,98%
		5	**1**	**2**	**02.01**	**5**	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen Pedoman dan hasil Musrenbang Kecamatan yang tersusun	10	dokumen	190.440.000,00	1	7.169.600,00											0,00	0,00	1,00	7.169.600,00	10%	3,76%
		5	1	2	02.01	6	Koordinasi Penyusunandan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun/ditetapkan	19	dokumen	2.354.276.706,00	5	297.894.500,00	4	714.630.424,00		70.297.500		169.664.750,00					0,00	239.962.250,00	5,00	537.856.750,00	26%	22,85%
		5	**1**	**2**	**02.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas	500	%	862.341.800,00	200	98.173.000,00	100	58.394.412,00	20	3.011.250,00	20	13.674.375,00					40	16.685.625,00	240	114.858.625,00	48%	13,32%
		5	**1**	**2**	**02.02**	**1**	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Indikator Ekonomi Makro yangtersusun	5	dokumen	451.146.200,00	2	88.516.000,00	1	44.467.412,00		3.011.250,00	25	13.674.375,00					25,00	16.685.625,00	27,00	105.201.625,00	540%	23,32%

No	Sasaran	Kode rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
																I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%	
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5	1	2	02.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Daerah Kabupaten Karangasem	5	s dokumen	411.195.600,00	2	9.657.000,00	1	13.927.000,00			25						25,00	0,00	27,00	9.657.000,00	540%	2,35%
		5	1	2	02.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan daerah	500	%	979.751.000,00	200	384.073.000,00	100	38.567.412,00	25	3.011.250,00	20	8.718.875,00					45	11.730.125,00	245	395.803.125,00	49%	40,40%
		5	1	2	02.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya buku evaluasi RKPD	20	buku	979.751.000,00	8	384.073.000,00	5	38.567.412,00	1	3.011.250	1	8.718.875,00					2,00	11.730.125,00	10,00	395.803.125,00	50%	40,40%
3	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan (mendukung sasaran 33 terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik)	5	1	3			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Perencanaan Perangkat Daerah	500	%	4.135.666.517,00	200	477.642.400,00	100	257.493.096,00	25	25.330.000,00	25	48.949.875,00					50	74.279.875,00	250	551.922.275,00	50%	13,35%
		5	1	3	02.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	500	%	1.506.408.000,00	200	216.097.600,00	100	105.081.436,00	25	9.741.750,00	25	19.001.500,00					50	28.743.250,00	250	244.840.850,00	50%	16,25%
		5	1	3	02.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	laporan	214.323.000,00	2	37.437.400,00	1	18.764.012,00		3.011.250,00		4.768.875,00					0,00	7.780.125,00	2,00	45.217.525,00	40%	21,10%

No	Sasaran	Kode rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
																I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%	
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5	1	3	02.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5	laporan	132.495.000,00	2	2.582.400,00	1	598.400,00				252.000,00					0,00	252.000,00	2,00	2.834.400,00	40%	2,14%
		5	1	3	02.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5	laporan	132.495.000,00	2	113.000,00	1	598.400,00		252.000,00							0,00	252.000,00	2,00	365.000,00	40%	0,28%
		5	1	3	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5	laporan	182.125.000,00	2	1.393.000,00	1	598.400,00									0,00	0,00	2,00	1.393.000,00	40%	0,76%
		5	1	3	02.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	laporan	123.495.000,00	2	2.272.000,00	1	598.400,00									0,00	0,00	2,00	2.272.000,00	40%	1,84%
		5	1	3	02.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5	laporan	227.193.000,00	2	38.512.600,00	1	18.764.012,00		3.011.250		4.992.875,00					0,00	8.004.125,00	2,00	46.516.725,00	40%	20,47%

No	Sasaran	Kode rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
																I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%	
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5	1	3	02.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan EvaluasiPenyusunan dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5	laporan	236.193.000,00	2	31.787.000,00	1	15.164.012,00		2.411.250		3.868.875,00					0,00	6.280.125,00	2,00	38.067.125,00	40%	16,12%
		5	1	3	02.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5	laporan	258.089.000,00	2	102.000.200,00	1	49.995.800,00		1.056.000		5.118.875,00					0,00	6.174.875,00	2,00	108.175.075,00	40%	41,91%
		5	1	3	02.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	500	%	1.090.007.217	100	113.289.400,00	100	67.099.624	25	6.204.500,00	25	12.265.750,00							50	18.470.250,00	150	131.759.650,00	30%	12,09%
		5	1	3	02.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	laporan	95.589.800	2	1.168.600,00	1	3.618.800				932.000,00					0,00	932.000,00	2,00	2.100.600,00	40%	2,20%
		5	1	3	02.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5	laporan	192.557.800	2	38.151.900,00	1	18.676.012		3.011.250		4.516.875,00					0,00	7.528.125,00	2,00	45.680.025,00	40%	23,72%

No	Sasaran	Kode rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
																I		II		III		IV						
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%	
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5	1	3	02.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5	laporan	196.847.800	2	25.795.000,00	1	440.000				182.000,00					0,00	182.000,00	2,00	25.977.000,00	40%	13,20%
		5	1	3	02.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5	laporan	115.037.800	2	3.462.000,00	1	1.465.000				576.000,00					0,00	576.000,00	2,00	4.038.000,00	40%	3,51%
		5	1	3	02.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	laporan	192.137.800	2	37.907.400,00	1	21.784.412		3.011.250		5.434.875,00					0,00	8.446.125,00	2,00	46.353.525,00	40%	24,13%
		5	1	3	02.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	Laporan	92.729.800	2	1.335.300,00	1	510.400,00									0,00	0,00	2,00	1.335.300,00	40%	1,44%
		5	1	3	02.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang SDA	5	laporan	103.731.800	2	1.653.200,00	1	440.000,00		182.000					0,00	182.000,00	2,00	1.835.200,00	40%	1,77%
		5	1	3	02.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitasdan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	5	laporan	101.374.617	2	3.816.000,00	1	20.165.000,00				624.000					0,00	624.000,00	2,00	4.440.000,00	40%	4,38%

No	Sasaran	Kode rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
																I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%	
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5	1	3	02.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan	500	%	1.539.251.300	200	148.255.400,00	100	85.312.036,00	25	9.383.750	25	17.682.625,00					50	27.066.375,00	250	175.321.775,00	50%	11,39%
		5	1	3	02.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	laporan	220.004.300	2	39.258.200,00	1	22.611.612,00		3.011.250		5.686.875,00					0,00	8.698.125,00	2,00	47.956.325,00	40%	21,80%
		5	1	3	02.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	laporan	160.809.000	2	5.202.400,00	1	1.496.000,00									0,00	0,00	2,00	5.202.400,00	40%	3,24%
		5	1	3	02.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	laporan	148.225.000	2	3.936.600,00	1	1.496.000,00		168.000		168.000,00					0,00	336.000,00	2,00	4.272.600,00	40%	2,88%
		5	1	3	02.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5	laporan	244.353.000	2	49.010.300,00	1	28.127.612,00		3.011.250		6.196.875,00					0,00	9.208.125,00	2,00	58.218.425,00	40%	23,83%
		5	1	3	02.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD	5	laporan	230.053.000	2	2.319.200,00	1	4.446.000,00				750.000,00					0,00	750.000,00	2,00	3.069.200,00	40%	1,33%

No	Sasaran	Kode rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
																I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%	
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5	1	3	02.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5	laporan	151.809.000	2	4.185.800,00	1	1.496.000,00				182.000,00					0,00	182.000,00	2,00	4.367.800,00	40%	2,88%
		5	1	3	02.03	7	Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5	laporan	239.053.000	2	39.386.900,00	1	19.661.612,00		3.193.250		4.698.875,00					0,00	7.892.125,00	2,00	47.279.025,00	40%	19,78%
		5	1	3	02.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5	laporan	144.945.000	2	4.956.000,00	1	5.977.200,00									0,00	0,00	2,00	4.956.000,00	40%	3,42%
								TOTAL							**5.489.374.019,00**										**2.568.691.490,00**				
																						Rata-rata capaian kinerja seluruh program		**51,67%**	**46,79%**				

TABEL 3.1

PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN BADAN PERENCANAAN DAERAH KAB. KARANGASEM TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		BADAN PERENCANAAN DAERAH							**5.397.680.841,00**	**5.489.374.019,00**	**6.706.047.757,00**	**1.308.366.916,00**							**6.567.368.000,00**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.397.680.841,00**	**5.489.374.019,00**	**6.706.047.757,00**	**1.308.366.916,00**							**6.567.368.000,00**
	5.01	**PERENCANAAN**							**5.397.680.841,00**	**5.489.374.019,00**	**6.706.047.757,00**	**1.308.366.916,00**							**6.567.368.000,00**
1,	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.193.550.741,00**	**4.301.180.375,00**	**5.399.467.713,00**	**503.520.459,00**							**4.697.071.200,00**
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang selesai tepat waktu*				100 %	100 %	3.645.000,00	3.644.200,00	3.644.200,00	-800,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan		5.640.000,00
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000,00
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.560.000,00	1.559.700,00	1.559.700,00	-300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.320.000,00
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.560.000,00	1.559.700,00	1.559.700,00	-300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.320.000,00
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	225.000,00	224.800,00	224.800,00	-200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000,00
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya administrasi keuangan (Gaji dan tunjangan,penatausahaan keuanngan, pelaksanaan akuntansi SKPD)*				100 %	100 %	3.205.575.575,00	3.302.702.974,00	3.423.547.812,00	217.972.237,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan		3.250.600.000,00
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	252 Orang/bulan	3.091.416.975,00	3.206.728.765,00	3.327.573.603,00	236.156.628,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.100.000.000,00
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250 Dokumen	250 Dokumen	113.708.600,00	95.539.809,00	95.539.809,00	-18.168.791,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	450.000,00	434.400,00	434.400,00	-15.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			600.000,00
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan lancar*				100 %	100 %	423.775.183,00	425.925.898,00	478.987.398,00	55.212.215,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum		565.000.000,00
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.987.000,00	11.978.900,00	11.978.900,00	-8.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	218.784.200,00	218.783.200,00	203.047.500,00	-15.736.700,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	38.879.375,00	38.879.200,00	34.676.400,00	-4.202.975,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	24 Laporan	143.124.608,00	145.284.598,00	218.284.598,00	75.159.990,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			185.000.000,00
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tersedianya kebutuhan peralatan dan mesin kantor penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 persen	0,00	0,00	729.011.300,00	729.011.300,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		80.000.000,00
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	431.440.000,00	431.440.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					9 unit			27.707.500	27.707.500	Kab. Karangasem,	PAJAK DAERAH					
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					24 Unit			269.863.800	269.863.800	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	PAJAK DAERAH		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	172.798.983,00	172.796.831,00	168.707.531,00	-4.091.452,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		210.831.200,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	-1.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.500.000,00
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.377.683,00	73.377.683,00	73.377.683,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.590.100,00	59.587.924,00	56.498.624,00	-3.091.476,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.000.000,00
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.331.200,00	36.331.224,00	36.331.224,00	24,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.331.200,00
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	387.756.000,00	396.110.472,00	595.569.472,00	207.813.472,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		585.000.000,00
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	243.262.400,00	251.620.800,00	256.075.800,00	12.813.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				147 Unit	147 Unit	26.000.000,00	26.000.000,00	29.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	7 Unit	118.493.600,00	118.489.672,00	310.493.672,00	192.000.072,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00
2,	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase tercapainya sasaran pembangunan daerah**				**100 %**	**100 %**	**954.705.300,00**	**930.700.548,00**	**1.102.700.148,00**	**566.294.700,00**							**1.521.000.000,00**
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah*				100 %	100 %	857.634.100,00	833.738.724,00	1.007.088.324,00	149.454.224,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah		475.000.000,00
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				3 Berita Acara	3 Berita Acara	49.680.000,00	49.648.600,00	24.196.000,00	-25.484.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				3 Berita Acara	3 Berita Acara	69.492.900,00	69.459.700,00	44.210.100,00	-25.282.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	738.461.200,00	714.630.424,00	938.682.224,00	200.221.024,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000.000,00
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase tersedianya data dan informasi pembangunan daerah*				100 %	100 %	58.455.600,00	58.394.412,00	57.644.412,00	-811.188,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Data dan Informasi Pembangunan Daerah		66.000.000,00
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	44.515.600,00	44.467.412,00	43.717.412,00	-798.188,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			48.000.000,00
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	13.940.000,00	13.927.000,00	13.927.000,00	-13.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.000.000,00
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan daerah*				100 %	100 %	38.615.600,00	38.567.412,00	37.967.412,00	-648.188,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah		980.000.000,00
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	5 Laporan	38.615.600,00	38.567.412,00	37.967.412,00	-648.188,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			980.000.000,00
3,	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**249.424.800,00**	**257.493.096,00**	**203.879.896,00**	**99.872.000,00**							**349.296.800,00**
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				100 %	100 %	96.796.800,00	105.081.436,00	80.426.636,00	-16.370.164,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah		110.000.000,00
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	18.765.600,00	18.764.012,00	18.764.012,00	-1.588,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.000.000,00
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	598.400,00	598.400,00	-1.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	598.400,00	598.400,00	-1.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.500.000,00
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	598.400,00	352.000,00	-248.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	600.000,00	598.400,00	352.000,00	-248.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	18.765.600,00	18.764.012,00	18.764.012,00	-1.588,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	15.165.600,00	15.164.012,00	15.164.012,00	-1.588,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.000.000,00
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	41.700.000,00	49.995.800,00	25.833.800,00	-15.866.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				100 %	100 %	67.231.200,00	67.099.624,00	47.192.424,00	-20.038.776,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah		104.800.000,00
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	3.625.000,00	3.618.800,00	2.830.800,00	-794.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	18.690.600,00	18.676.012,00	18.623.212,00	-67.388,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.300.000,00
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	450.000,00	440.000,00	932.000,00	482.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			29.500.000,00
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	-35.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	21.790.600,00	21.784.412,00	20.978.812,00	-811.788,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			29.500.000,00
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	525.000,00	510.400,00	457.600,00	-67.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan				1 Laporan	1 Laporan	450.000,00	440.000,00	440.000,00	-10.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	20.200.000,00	20.165.000,00	1.465.000,00	-18.735.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan*				100 %	100 %	85.396.800,00	85.312.036,00	76.260.836,00	-9.135.964,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah		134.496.800,00
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	22.615.600,00	22.611.612,00	21.471.612,00	-1.143.988,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.915.600,00
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.496.000,00	1.003.200,00	-496.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.250.000,00
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.496.000,00	950.400,00	-549.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.250.000,00
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	28.165.600,00	28.127.612,00	26.369.612,00	-1.795.988,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			38.165.600,00
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	4.450.000,00	4.446.000,00	2.778.000,00	-1.672.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			5.250.000,00
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.496.000,00	1.020.800,00	-479.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	19.665.600,00	19.661.612,00	19.151.212,00	-514.388,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.665.600,00
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	5.977.200,00	3.516.000,00	-2.484.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00
	J U M L A H								**5.397.680.841,00**	**5.489.374.019,00**	**6.706.047.757,00**	**1.308.366.916,00**							**6.567.368.000,00**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

RENCANA KERJA

PERUBAHAN

DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024

DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KARANGASEM

Jln Ahmad Yani No. 29 Telp. (0363) 21647 Fax 21647 Amlapura
e-mail : disnakerkarangasem@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widi Wasa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya **Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2024** dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem menyusun Renja Perangkat Daerah, sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA). Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Kecamatan.

Tersusunnya Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh staf Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi di Kabupaten Karangasem.

Amlapura, Agustus 2024
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Karangasem,

Ida Nyoman Astawa, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197709031996121001

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL
KATA PENGANTAR.....2
DAFTAR ISI.....3
BAB I PENDAHULUAN.....4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum.....11
1.3 Maksud dan Tujuan.....15
1.3.1 Maksud.....15
1.3.2 Tujuan.....16
1.4 Sistematika Penulisan.....18
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..17
2.1 Evalusi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....23
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....24
2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem 24
2.3.2 Isu Strategis.....24
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....27
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....27
3.2.Program Kegiatan.....29
3.3.Strategi Dan Arah Kebijakan 29
BAB IV PENUTUP.....40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian RENJA Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Penyusunan RENJA Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional mengenai urusan tenaga kerja dan transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Pada pasal 13 menyebutkan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangassem Menyusun rancangan renja Perangkat Daerah, sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA). Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangassem Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancana Renja Perangkat Daerah dan Kecamatan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian memuat rancangan, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 serta pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem tahun 2024 sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 - 2026 dari urusan perencanaan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem adalah melaksanakan fungsi sebagai Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok Melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem, yaitu :

"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI"

DI KARANGASEM

Melalui

POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

Menuju

KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SANTI DAN NADI ("KARANGASEM PRAKERTI NADI")

Yang mengandung makna :

"Menjaga Kesucian Dan Keharmonisan Alam Karangasem Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Karangasem Yang Sejahtera Dan Bahagia, Sekala Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Karangasem Sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno : Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi".

- "PRAKERTI" berasal dari bahasa sansekerta yang berarti unsur material alam semesta (sakti) atau sumber kekuatan alam yang suci dan agung
- "NADI" (bahasa bali) berarti berhasil / kekuatan suci
- Karangasem "PRAKERTI-NADI" adalah Karangasem yang kuat/sakti, Karangasem yang agung, Karangasem yang suci dan Karangasem metaksu

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Karangasem, akan ditempuh melalui 6 Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Membangun pertanian yang tangguh dan mandiri dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan

Misi 2 : Membangun SDM yang handal, berdaya saing tinggi, dan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil dan berkualitas

Misi 3 : Mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konfrehensif dan terintegrasi

Misi 4 : Membangun pariwisata yang handal melalui pembangunan destinasi dan promosi yang ditunjang dengan infrastruktur pedesaan yang memadai dan terkoneksi

Misi 5 : Mengembangkan system keamanan dan ketertiban secara terpadu

Misi 6 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayana publik prima

Untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan utama penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan berupaya untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh di Kabupaten Karangasem. Hal tersebut sesuai dengan Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ke dua, yaitu Membangun SDM yang handal, berdaya saing tinggi, dan system pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil dan berkualitas.

Arah kebijakan Pembangunan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem, yaitu Menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem di Bidang Janinan Sosial dan Tenaga Kerja. Tenaga Kerja yang Kompeten, memiliki arti dengan meningkatnya kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Karangasem maka akan terwujud tenaga kerja yang memiliki daya saing terhadap keahlian yang dimiliki, sehingga dapat merebut pasar kerja yang ada. Seiring dengan meningkatnya kompetensi tenaga kerja diharapkan pula dapat meningkatkan

Tingkat Partisipasi Angkata Kerja (TPAK) di Kabupaten Karangasem. Dengan meningkatnya masyarkat yang bekerja yang ditandai dengan meningkatnya tingkat pertisipasi angkatan kerja, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Selain dengan menciptakan tenaga kerja yang kompeten, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem juga mengimplementasikan program prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem dengan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja/buruh. dengan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja/buruh yang ada di kabupaten Karangasem berupa terdaftar dalam program jaminan sosial tenaga kerja, pendampingan dan penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial dan memastikan mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/butuh. seperti menerima upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan sehingga kesejahteraan tenaga kerja/buruh semakin meningkat.

Jadi, Tenaga Kerja yang Kompeten dan Sejahtera bertujuan dapat membentuk/membina tenaga kerja yang kompeten, memiliki daya saing dan mempunyai etos kerja yang tinggi serta mampu menciptakan lapangan/peluang kerja dalam masyarakat serta tenaga kerja yang terlindungi dan meningkat kesejahteraanya.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Karangasem , maka disusun tujuan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karangasem 2021-2026. Adapun tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan antara lain :

1. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya saing
   Indikator tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan
   Indikator Tujuan : Persentase kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Karangasem
   Indikator Tujuan : Persentase Kemiskinan

Berdasarkan atas tujuan yang telah ditetapkan disusun masing-masing sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 2021-2026 :

1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
   Indikator sasaran : Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2. Meningkatnya kesempatan kerja di dalam dan diluar negeri
   Indikator sasaran : Persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
3. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
   Indikator sasaran : Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan kesejahteraan social
   Indikator sasaran : Indek kepuasan pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem adalah **:**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

7. beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

31. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 42) ;
32. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
33. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kapupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 42).
34. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangsem Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem pada Tahun 2023 sehingga dapat menjadi arah dalam mewujudkan target kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah

1. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem selama tahun 2023.
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
3. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 yaitu

merumuskan rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.
2. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah serta indikator atau ukuran keberhasilan/ kegagalan pada tahun 2024.
3. Memberikan arah/acuan dalam menyusunan Program/kegiatan Pembangunan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika penyusuanan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2024, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

Renja OPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (renstra OPD) sebagai dokumen jangka menengah. Kualitas penyusunan Renja OPD akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Di bawah ini disajikan rekapitulasi evaluasi Renja OPD pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebagaimana tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem

Triwulan II Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023(tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			
					I		II		III		IV					
1	3	4	7		8		9		10		11		12			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%K	%Rp
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN NON PELAYANAN DASAR															
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100	4.938.328.827,00	25%	847.656.654,00	28%	1.694.139.978,00		-		-	53,00 %	2.541.796.632,00	20,11%	24,70%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase terselenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	2.846.100,00	25%	0,00	44,00%	1.402.600,00	-	-	-	-	69,00 %	1.402.600,00	20,14%	0,03%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100	4.180.232.624,00	25%	788.332.590,00	39,00%	1.573.676.524,00	-	-	-	-	64,00 %	2.362.009.114,00	20,13%	14428,27%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase teselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	25	6.500.000	15%	0,00	53,00%	720.000,00		-		-	68,00 %	720.000,00	0,14%	0,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya barang pengadann	100	382.662.975,00	25%	37.262.000,00	37,00%	64.776.000,00	-	-	-	-	62,00 %	102.038.000,00	74,53%	357,83%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	76.500.000,00	25%	9.790.864,00	41,50%	16.385.454,00		-		-	66,50 %	26.176.318,00	20,13%	5,66%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpeliharanya barang milik daerah	100	289.587.128,00	25%	12.271.200,00	40,00%	37.179.400,00		-		-	65,00 %	49.450.600,00	20,11%	24,70%
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja	0	0	0%	0							0,00%	0,00	100,00 %	51,25%
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persntase tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja	0	0	0,00%	0,00							0,00%	0,00	100,00 %	51,25%
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi	14	130.080.000,00	7%	0	5%	3.333.400,00					12,00 %	3.333.400,00	19,08%	8,07%
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat pelatihan	100	77.080.000,00	20%	0	44,00%	933.400,00		-		-	64,00 %	933.400,00	136,00 %	5,88%

	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan**	**75**	**25.000.000,00**	17%	0	46,00%	2.400.000		-		-	63,00 %	**2.400.000,00**	**15,13%**	**1,59%**
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Persentase terselengaranya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil**	**100**	**28.000.000,00**	14%	0	38,00%	0		-		-	52,00 %	**0,00**	**26,25%**	**15,48%**
4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan**	**82 %**	**207.800.000,00**	**19,00%**	**0,00**	**42,13%**	**7.625.000,00**		**-**		**-**	61,13 %	**7.625.000,00**	**0,35%**	**4,99%**
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**persentase terselenggaranya pelayanan antarkerja di daerah**	**100**	**20.000.000,00**	20,00%	0,00	41,00%	960.000,00		-		-	61,00 %	**960.000,00**	**24,30%**	**2,47%**
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah izin yang diterbitkan**	**1**	**3.500.000,00**	18,00%	0	37,00%	480.000,00		**-**		**-**	55,00 %	**480.000,00**	**0,31%**	**0,86%**
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase tersedianya informasi pasar kerja**	**100**	**156.500.000,00**	20,00%	0	45,50%	5.265.000,00		**-**		**-**	65,50 %	**5.265.000,00**	**2013,10%**	**13,07%**
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terselenggaranya perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**27.800.000,00**	18,00%	**0,00**	45,00%	920.000,00		**-**		**-**	63,00 %	**920.000,00**	**20,13%**	**5,02%**
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan**	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0		**-**		**-**	61,13 %	**7.625.000,00**	**0,35%**	**4,99%**
5	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama**	**100**	**51.400.000,00**	**20,00%**	0	30,00%	3.625.200,00					50,00 %	**3.625.200,00**	**20,10%**	**4,10%**
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial**	**100**	**51.400.000**	20,00%	0	43,00%	**3.625.200,00**		**-**		**-**	63,00 %	**3.625.200,00**	**20,13%**	**4,10%**
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
6	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**persentase masyarakat yang mendapat penyuluhan untuk ikut program transmigrasi**	**50**	**5.000.000,00**	18,00%	**0**	17,00%	1.131.000,00					35,00 %	**1.131.000,00**	**100,70 %**	**10,21%**
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang mendapat penyuluhan**	**50**	**5.000.000,00**	18,00%	**0**	34,00%	1.131.000,00		**-**		**-**	52,00 %	**1.131.000,00**	**101,04 %**	**10,21%**

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Karangasem

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis Tahun 2021
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	5
1	Persentase Pencari Kerja Ter Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)daftar yang Ditempatkan	-		80	80	82	82	80	80	82	82	80
2.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	-	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	46%	48%	48%	48%	46%	48%	48%	48%	46%
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja									
				90	90	95	95	90	90	95	95	90
3.	Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan	-	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabuapten/Kota	81%	82%	82%	83%	81%	82%	82%	83%	81%
4.	Persentase masyarakat yang mendapat penyuluhan untuk ikut program transmigrasi	-	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja									
				75	75	80	80	75	75	80	80	75
			Persentase Perusahan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)									
			Persentase masyarakat yang mendapat penyuluhan untuk ikut program transmigrasi	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

* : realisasi sampai triwulan II tahun 2024

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Karangasem

Permasalahan bidang Ketenagakerjaan merupakan permasalahan yang tak akan pernah tuntas. Sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 27 (2) yang berbunyi “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan dalam Pasal 28 ayat (2) disebutkan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, sehingga penanganan permasalahan ketenagakerjaan tidak akan mampu diselesaikan secara sektoral maupun regional, tetapi harus dilakukan secara komprehensif koordinatif, serentak dan sinergis baik lintas sektoral maupun lintas wilayah (teritorial), serta bersifat terus menerus, mengingat pertumbuhan penduduk yang merupakan generasi angkatan kerja baru selalu muncul dan tidak akan pernah berhenti. Terlambat dalam mempersiapkan penanganan dapat berakibat fatal bagi upaya pembangunan khususnya pembangunan di Kabupaten Karangasem.

Pengangguram masih menjadi masalah utama setiap daerah terutama di negara sedang berkembang. Pengangguran terjadi karena rendahnya kompetensi tenaga kerja, terbatasnya kesempatan kerja dan masih rendahnya daya saing tenaga kerja. Demikian juga di Kabupaten Karangasem, penurunan jumlah penduduk yang bekerja meningkatkan jumlah pengangguran. Data BPS. Kab. Karangasem, 2022 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran sebesar 8.629 atau tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 mencapai 3,09% meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 0,77% dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2022 sebesar 85,39% dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 96,91%. Meningkatnya angka pengangguran terbuka ini

disebabkan oleh adanya pandemi virus Covid-19 yang menyebabkan, banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan atau di PHK, banyaknya perusahaan yang tutup dan melemahnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Karanasem. Berdasarkan data tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Karangasem dalam lima tahun mendatang dalam upaya pengurangan pengangguran adalah:

1) Lapangan pekerjaan semakin terbatas
2) Masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem tahun 2022 yaitu 3,09% meningkat dari tahun kemarin dan masih tergolong tinggi dibandingkan lima tahun terakhir
3) Minimnya perlindungan hukum tenaga kerja dan Pemberian upah pekerja yang belum sesuai dengan Upah Minimum
   Kabupaten
4) Rendahnya kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Karangasem, tercatat tahun 2022 persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 13,48%.
5) Belum maksimalnya partisipasi tenaga kerja dan perusahaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, dimana pada tahun 2022, persentase tenaga kerja yang ikut dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebesar 88,89%. Dan persentase perusahaan yang terdaftar pada program jamsostek sebesar 35,16%

2.3.2 Isu Strategis

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang antara lain :

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat

diidentifikasi 4 isu strategis urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian :

1. Masih banyaknya Tenaga kerja yang belum memiliki ketrampilan dan belum memiliki sertifikat kompetensi
2. Masih banyaknya tenaga kerja yang belum memiliki link and match dengan kebutuhan industri di dalam dan luar negeri
3. Kurang patuhnya pengusaha terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang layak
4. Kurangnya informasi masyarakat akan pentingnya program transmigrasi untuk pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Menanggapi isu – isu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Tupoksi Dinas Ketenagakerjaan maka mengacu kepada Arah Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021 – 2026, kebijakan Disnaker Kabupaten Karangasem, adalah :

1. Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik. Dilaksanakan dengan program :
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja dengan merevitalisasi Balai Latihan Kerja, Sertifikasi Tenaga Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja berbasis komunitas memperhatikan potensi dan pasar kerja, melalui program :
    a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan memberikan fasilitas pemberian pinjaman lunak untuk pekerja yang bekerja ke luar negeri, melalui program :
    a. Program Perencanaan Tenaga Kerja;

b. Program Penempatan Tenaga Kerja;

4. Meningkatkan sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang layak dan mewajibkan pemberi kerja mengalokasikan jaminan sosial ketenagakerjaan, melalui program :
    a. Program Hubungan Industrial;
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial Krama Karangasem dengan meningkatkan penyuluhan akan pentingnya program transmigrasi, melalui program :
    a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Rencana kinerja adalah produk dari perencanaan kinerja, dan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan pada satu tahun tertentu..

Sasaran Tahunan merupakan bagian dari sasaran lima tahunan yang tercantum di dalam Renstra, yang akan diwujudkan secara bertahap pada waktu tertentu. Indikator kinerja Sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian sasaran . Sedangkan target indikator kinerja merupakan gambaran kuantitatif tentang jumlah atau tingkat pencapaian sasaran. Sedangkan target indikator kinerja merupakan gambaran kuantitatif tentang jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan.

3.1.1 Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah disusun yang berkaitan erat dengan Visi dan Misi Kabupaten Karangasem, maka disusun tujuan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karangasem 2021-2026 Adapun tujuan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem, Antara lain :

1. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya saing
2. Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan
3. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Krama Karangasem
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

3.2.2 Sasaran

Berdasarkan atas tujuan yang telah ditetapkan disusun masing-masing sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 2021-2026 :

1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
2. Meningkatnya kesempatan kerja di dalam dan diluar negeri
3. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yag baik

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Mengacu kepada RPJMD Kabupaten Karangasem dalam upaya pencapaian Visi dan Misi dengan tetap memperhatikan keharmonisan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional maka disusun strategi pembangunan di bidang Ketenagakerjaan meliputi :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Karangasem mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global bersinergi dengan dunia pendidikan dan dunia usaha serta industri
2. Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan antar kabupaten
3. Peningkatan cakupan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan

3.2.2 Kebijakan

1. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)
2. Pelatihan tenaga kerja berbasis komunitas memperhatikan potensi dan pasar kerja
3. Sertifikasi tenaga kerja
4. Memfasilitasi pemberian pinjaman lunak kepada masyarakat Karangasem yang keluar negeri untuk menjadi tenaga kerja muda dan pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja
5. Mewajibkan pemberi kerja mengalokasikan jaminan sosial ketenagakerjaan

3.3 Program dan Kegiatan

Program tahunan merupakan bagian dari program lima tahunan yang tercantum di dalam Renstra, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu untuk mewujudkan sasaran tahunan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sebagai berikut :

I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

c. Penyediaan peralatan rumah tangga

d. Penyediaan bahan logistik kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. **Program Perencanaan Tenaga Kerja**

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

b. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

III. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

b. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3. Konsultansi produktivitas Pada Perusahaan kecil

a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil

4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

IV. **Program Penempatan Tenaga Kerja**

1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
b. Pelayanan Antarkerja
c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja

2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
b. Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

3. Pengelolaan Informasi Pasar kerja

a. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
b. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
c. Job Fair/Bursa Kerja

4. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalm 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
b. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
c. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

V.**Program Hubungan Industrial**

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

b. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
c. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Dearah Kabupaten/Kota
b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Dearah Kabupaten/Kota
c. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
d. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
e. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

VI. **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyuluhan Transmigrasi

Tabel 3.1
REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN TAHUN 2024

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Keterangan
							Indikator	Target Capaian		Pagu	Indikator	Target Capaian		Pagu Renja		
								Target	Satuan			Target	Satuan			
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	2	**07**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**100**	**%**	**4.981.828.827,00**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**100**	**%**	**5.736.364.827,00**	754.536.000,00	
	2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase terselenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.846.100,00**	**persentase terselenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.846.100**	-	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	dokumen	1.606.100	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	dokumen	1.606.100	-	
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	laporan	1.240.000	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	laporan	1.240.000	-	
	2	**07**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**%**	**4.180.232.624,00**	**persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**%**	**4.559.435.624,00**	379.203.000,00	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35	35 orang /bulan	4.178.732.624	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35	35 orang /bulan	4.557.935.624	379.203.000,00	
	2	07	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	17	Dokumen	1.500.000	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	17	Dokumen	1.500.000	-	

	2	**07**	**4**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan**	**25**	**izin**	**6.500.000,00**	**Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan**	**25**	**izin**	**17.160.000**	10.660.000,00	
	2	07	4	2.04	0004	Pendataan Dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah tenaga kerja asing yang terdata pada perusahaan	25	orang	6.500.000	Jumlah tenaga kerja asing yang terdata pada perusahaan	25	orang	17.160.000	10.660.000,00	
	2	**07**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase teselenggaranya administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**382.662.975,00**	**persentase teselenggaranya administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**402.662.975**	20.000.000,00	
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	1.782.000	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	1.782.000	-	
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	paket	50.500.775	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	paket	50.500.775	-	
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7	paket	234.417.000	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7	paket	234.417.000	-	
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	paket	52.085.200	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	paket	52.085.200	-	
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	paket	18.454.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	paket	18.454.000	-	
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48	dokumen	2.424.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48	dokumen	2.424.000	-	

	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	laporan	23.000.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	laporan	43.000.000	20.000.000,00	
	2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persentase tersedianya barang pengadaan**	**100**	**%**	**-**	**persentase tersedianya barang pengadaan**	**100**	**%**	**109.673.000**	109.673.000,00	
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	unit	-	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	Laporan	109.673.000	109.673.000,00	
	2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**76.500.000,00**	**persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**81.500.000**	5.000.000,00	
	2	07	01	**2.08**	0001	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat	1	laporan	1.500.000	Jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat	1	laporan	1.500.000	-	
	2	07	01	**2.08**	0002	Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	laporan	75.000.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	laporan	80.000.000	5.000.000,00	
	2	**07**	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100**	**%**	**333.087.128,00**	**persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100**	**%**	**563.087.128**	230.000.000,00	
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17	unit	282.337.128	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17	unit	312.337.128	30.000.000,00	
	2	07	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	unit	43.500.000	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	unit	43.500.000	-	

	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit	7.250.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit	207.250.000	200.000.000,00	
	2	**07**	**03**			**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi**	**14**	**%**	**279.400.000,00**	**Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi**	**14**	**%**	**836.900.000,00**	557.500.000,00	
	2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat pelatihan**	**100**	**%**	**226.400.000,00**	**Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat pelatihan**	**100**	**%**	**781.400.000,00**	555.000.000,00	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksnaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihanberbasis kompetensi pada tahun n	16	orang	76.400.000	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihanberbasis kompetensi pada tahun n	64	orang	301.400.000	225.000.000,00	
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	2	paket	150.000.000	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	5	unit	480.000.000	330.000.000,00	
	2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki izin**	**76**	**%**	**25.000.000,00**	**Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki izin**	**76**	**%**	**25.000.000**	-	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	17	lembaga	25.000.000	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	17	lembaga	25.000.000	-	
	2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi produktivitas Pada Perusahaan kecil**	**Persentase terselengaranya konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil**	100	**%**	**28.000.000,00**	**Persentase terselengaranya konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil**	100	**%**	**30.500.000**	2.500.000,00	
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	1	perusahaan	28.000.000	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	1	perusahaan	30.500.000	2.500.000,00	
	2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan**	**82**	**%**	**207.800.000,00**	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan**	**82**	**%**	**207.800.000,00**	-	

	2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase terselenggaranya pelayanan antarkerja di daerah**	**100**	**%**	**20.000.000,00**	**persentase terselenggaranya pelayanan antarkerja di daerah**	**100**	**%**	**20.000.000**	-	
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antarkerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	orang	5.000.000	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	orang	5.000.000	-	
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	5	bkk	15.000.000	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	5	bkk	15.000.000	-	
	2	**7**	**4**	**2.02**		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah izin yang diterbitkan**	**1**	**izin**	**3.500.000**	**Jumlah izin yang diterbitkan**	**1**	**izin**	**3.500.000**	-	
	2	7	4	2.02	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah layanan perizinan LPTKS secara terintegrasi yang disediakan	1	lembaga	3.500.000	Jumlah layanan perizinan LPTKS secara terintegrasi yang disediakan	1	lembaga	3.500.000	-	
	2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar kerja**	**Persentase tersedianya informasi pasar kerja**	**100**	**%**	**156.500.000,00**	**Persentase tersedianya informasi pasar kerja**	**100**	**%**	**156.500.000**	-	
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	20	orang	6.500.000	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	20	orang	6.500.000	-	
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	20	orang	150.000.000	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	20	orang	150.000.000	-	
	2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI yang terlindungi (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**27.800.000,00**	**Persentase PMI yang terlindungi (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**27.800.000**	-	
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20	Perusahaan	27.800.000	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20	Perusahaan	27.800.000	-	

	2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama**	**100**	**persen**	**51.400.000,00**	**Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama**	**100**	**persen**	**51.400.000,00**	-	
	2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial**	**100**	**persen**	**51.400.000,00**	**Persentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial**	**100**	**persen**	**51.400.000**	-	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Dearah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang di cegah	3	Perkara	25.989.500	Jumlah perselisihan yang di cegah	3	perkara	25.989.500	-	
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	lembaga	5.259.000	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	lembaga	5.259.000	-	
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100	orang	20.151.500	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100	orang	20.151.500	-	
	3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase masyarakat yang mendapat penyuluhan untuk ikut program transmigrasi**	**50**	**%**	5.000.000,00	**Persentase masyarakat yang mendapat penyuluhan untuk ikut program transmigrasi**	**50**	**%**	**5.000.000**	-	

	3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang mendapat penyuluhan**	**50**	**orang**	5.000.000,00	**Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang mendapat penyuluhan**	**50**	**orang**	**5.000.000**	-	
	3	32	03	2.01	00017	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	20	Orang	5.000.000	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	20	Orang	5.000.000	-	
Jumlah pagu total										**5.525.428.827,00**				**6.837.464.827,00**	**1.312.036.000,00**	**Jumlah pagu total**

PENUTUP

Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem tahun 2024.

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan. Selanjutnya Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabuapten Karangasem dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten Karangasem. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Amlapura, Agustus 2024
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Karangasem,

Ida Nyoman Astawa, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197709031996121001



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 452/ HK / 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 260/HK/2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 kepada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya oleh Badan Perencanaan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pereaturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 260/HK/2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nmor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7;

21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Nomor 260/HK/2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 29 Agustus 2024

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Pj Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, di Denpasar.
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar.

4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura
6. Para Asisten Sekda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 452/ HK / 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 260/HK/2023 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan
3. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah
4. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan
10. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup
11. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Perubahan Renja Dinas Perhubungan
14. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
20. Perubahan Renja Sekretariat Daerah
21. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22. Perubahan Renja Badan Perencanaan Daerah
23. Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah
25. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Perubahan Renja Inspektorat Daerah
27. Perubahan Renja Kecamatan Karangasem
28. Perubahan Renja Kecamatan Abang

29. Perubahan Renja Kecamatan Kubu
30. Perubahan Renja Kecamatan Bebandem
31. Perubahan Renja Kecamatan Selat
32. Perubahan Renja Kecamatan Rendang
33. Perubahan Renja Kecamatan Sidemen
34. Perubahan Renja Kecamatan Manggis
35. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa







PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DPMPTSP KABUPATEN KARANGASEM

dpmptsp karangasem

http://dpmptsp.karangasemkab.go.id

0363 23564

Dpmptsp Karangasem

dpmptsp_kabkarangasem

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan rencana kinerja tahunan yang didalamnya memuat perubahan rencana kerja tahun 2024, merupakan suatu upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini disusun berdasarkan percepatan strategi dalam pencapaian sasaran serta evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program/kegiatan triwulan I dan II. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan perubahan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang.

Perencanaan suatu program menjelaskan hubungan garis organisasi secara kolektif yang menunjukkan sasaran apa yang hendak dicapai dan bagaimana setiap rupiah dialokasikan untuk memenuhi program dan sasaran tersebut. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi yang nyata untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dengan telah disusunnya Perubahan Renja tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 29 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT MERTADINA, S.STP., MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770510 199601 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ..... **i**
Daftar Isi ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistimatika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA **6**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra 6
2.2. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 11

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **13**
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 13
3.2. Strategi dan Kebijakan 15
3.3. Program dan Kegiatan 16

BAB IV PENUTUP **21**

LAMPIRAN

- **Tabel E. 81**
- **Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024**
- **Lampiran Renja SIPD**
- **Berita Acara**
- **SK Tim Penyusun Rencana Kerja**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan yang ditetapkan sehubungan dengan perubahan rencana kerja pada tahun berjalan. Fungsi RENJA adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Merujuk pada ketentuan tersebut maka ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan di DPMPTSP lebih disebabkan karena serapan anggaran dan perubahan strategi dalam pelaksanaan tugas baik itu perubahan target dan aktivitas sub kegiatan. Adapun perubahan strategi tersebut dilakukan dengan harapan dapat menigkatkan pancapaian target kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Karangasem berpedoman pada:

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2024 – 2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026
26. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

27. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangsem tahun 2024;
28. Keputusan Bupati Nomer 642/HK/2023 Tentang Tim Penyusunana Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Karangasem merumuskan perubahan rencana kerja DPMPTSP sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja adalah sebagai pedoman:

a. menjadi pedoman penyusunan RKAP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
b. menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyajian Perubahan Renja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja

2.2. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra

Review evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra, dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan yang baru disahkan.

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja

Sehubungan dengan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel E.81. Dalam tabel E.81 disajikan capaian renja tahun 2024 sampai dengan triwulan 2.

DPMPTSP Kabupaten Karangasem menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

a. Faktor-faktor pendorong dan penghambat program bersumber dari internal dan eksternal organisasi yang mana faktor tersebut menyebabkan target belum tercapai atau melebihi target pada triwulan II.
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra adalah implikasi yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut adalah adanya hambatan pelayanan perizinan disebabkan karena aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh kementerian, demikian pula pada aplikasi pendukung seperti SIPD yang berimplikasi pada penatausahaan keuangan. Penggunaan aplikasi tersebut sudah sesuai ketentuan. Belum adanya pembuatan video promosi, kemitraan atara UMKM dan pelaku usaha besar serta belum adanya petunjuk pelaksanaan pemberian keudahan berusaha tetantu berimplikasi pada iklim usaha di kabupaten karangasem.

c. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan review target kegiatan serta percepatan untuk pelaksanaan kegiatan.

Berikut ini disampaikan ringkasan capaian program yang mendukung:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memuat terdiri dari 6 kegiatan, 19 sub kegiatan, program ini merupakan program yang mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok bersifat kesekretariatan. Pelaksanaan program ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 4.257.323.534 pada triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 2.017576.424 atau 47,39%. Capaian Kinerja sebanyak 50% dari dukungan operasional yang direncanakan sebanyak 100%

Kegiatan dalam program ini yang mendukung yaitu :

a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja Perencanaan Daerah capaian dokumen yang disusun pada triwulan II tercapai 50% yaitu Ranwal Renja, Rancangan Renja Akhir Tahun 2025 dan Rancangan Ranwal Perubahan Renja Triwulan II, Pergeseran Anggaran, Penyusunan Laporan Kinerja, LPPD dan LKPJ.

   Untuk penyusunan Laporan Kinerja, LPPD dan LKPJ telah selesai dan direview oleh Inspektorat Daerah dengan nilai 79,85 (kategori BB).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian penyelesaian administrasi keuangan pada triwulan II terlaksana 50% berupa pemberian gaji dan tunjangan ASN, verifikasi SPJ, SPP dan SPM serta penyusunan Laporan Keuangan

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capaian pelayanan administrasi umum pada triwulan II terlaksana 50% berupa penyediaan peralatan listrik, penyediaan logistik kantor, penyediaan barang cetakan, penyediaan bahan bacaan dan penyelenggaraan koordinasi dan konsutansi SKPD.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah capaian pengadaan barang milik daerah terlaksana 100%, berupa penyediaan peralatan dan mesin yaitu 1 paket mesin antrian dan 2 unit scanner.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capaian penyediaan

jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada triwulan II terlaksana 50% berupa penyediaan jasa tenaga non asn dalam rangka pengelolaan surat menyurat dan kebersihan, pembayaran tagihan air, listrik, telpon dan internet serta penyediaan alat dan bahan kebersihan.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah capaian penyediaan pemeliharaan barang milik daerah pada triwulan II terlaksana 50% berupa pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan peralatan dan pembayaran tenaga non asn pengemudi dan satpam.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini memuat terdiri dari 2 kegiatan, 3 sub kegiatan, program ini merupakan program yang mendukung dalam peningkatan realisasi investasi. Pelaksanaan program ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 106.017.500 pada triwulan II belum terealisasi dikarenakan kendala pemilihan penyedia.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini memuat terdiri dari 1 kegiatan, 1 sub kegiatan, program ini merupakan program yang mendukung dalam peningkatan realisasi investasi. Pelaksanaan program ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 52.612.500 pada triwulan II belum terealisasi.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini memuat terdiri dari 1 kegiatan, 3 sub kegiatan, program ini merupakan program yang mendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan program ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 442.808.244 pada triwulan II telah terealisasi 129.955.850 atau sebesar 29,35%. Capaian Kinerja sebanyak 97,73% dari dukungan operasional yang direncanakan sebanyak 96%

Kegiatan dalam program ini yang mendukung yaitu Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik capaian jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terealisasi sebesar 97,73%.

Sub kegiatan yang mendukung yaitu Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitasi/insentif daerah belum terealisasi karena masih menunggu penetapan Perbup fasilitasi/kemudahan berusaha.

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik capaian jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terealisasi sebesar 1.039,63%

Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultansi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko capaian pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultansi perizinan berusaha sebesar 88,89%

5. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini memuat terdiri dari 1 kegiatan, 3 sub kegiatan, program ini merupakan program yang mendukung dalam peningkatan realisasi investasi. Pelaksanaan program ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 699.522.421 pada triwulan II terealisasi 50.941.900 atau sebesar 7,28%.

Kegiatan dalam program ini yang mendukung yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah capaian pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebanyak 72 pelaku usaha.

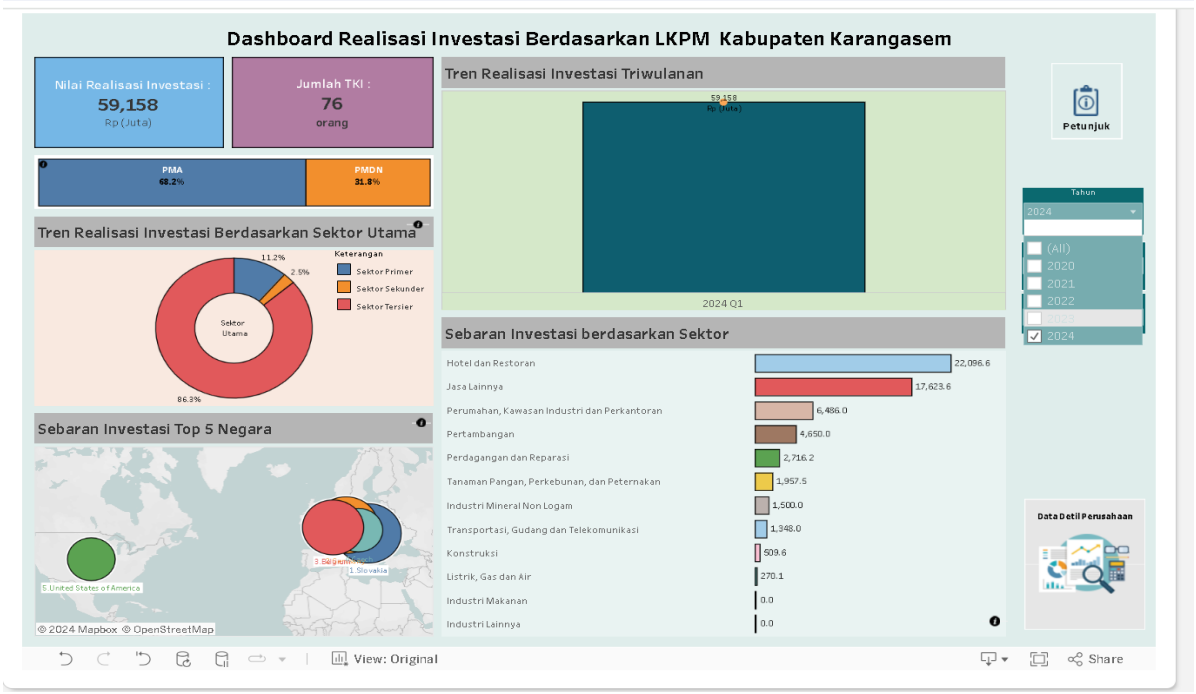
Sub kegiatan yang mendukung yaitu Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha pada triwulan II belum terealisasi. Sub kegiatan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang dihadapi pada triwulan II belum terealisasi. Sub kegiatan pengawasan penanaman modal capaian sub kegiatannya sebanyak 72 kegiatan usaha.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini memuat terdiri dari 1 kegiatan, 1 sub kegiatan, program ini merupakan program yang mendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan program ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 28.165.600 pada triwulan II belum terealisasi.

B. Evaluasi Capaian Renstra

Terhadap sasaran meningkatnya realisasi investasi dengan indikator jumlah realisasi penanaman modal dalam negeri dan asing. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran seberapa banyak jumlah investasi yang telah dipergunakan di Kabupaten Karangasem. Pencapaian terhadap sasaran ini serta pengukurannya secara rinci disampaikan seperti gambar dibawah



Gambar 2.1.
Infografis Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kabupaten Karangasem
Triwulan I Tahun 2024

Dari infografis pada tahun 2024 triwulan I diatas terlihat bahwa komposisi PMA dan PMDN terhadap realisasi investasi di Kabupaten Karangasem masing-masing sebesar 68,2% PMA dan 31,8% PMDN dengan sebaran 86,3% pada sektor tersier 2,5% pada sektor sekunder dan 11,2% pada sektor primer. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersier dalam hal ini didominasi hotel dan restoran masih menempati sektor tertinggi dalam realisasi investasi. Sektor tersier ini merupakan pendukung pada sektor industri pariwisata.

Tingkat daya serap tenaga kerja pada triwulan I tahun 2024 sebesar 0,35 dimana jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 76 orang dari 216 jumlah PMA dan PMDN. Jumlah tenaga kerja yang terserap tahun 2023 sebanyak 1.022 orang atau sebanyak 1,90% dari 539 PMA dan PMDN turun

dari tahun 2022 hal ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja belum sebanding dengan jumlah PMA dan PMDN. Salah satu penyebabnya yaitu pembatasan penggunaan tenaga kerja karena meningkatnya peran teknologi.

Terhadap sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal dengan indikator nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal. Pencapaian terhadap sasaran tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,67	84,82	100,18

Pengukuran IKM dimaksudkan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Pendekatan dari perspektif publik sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja pelayanan harus menjadi perhatian penting untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang disediakan telah memenuhi harapan, kepuasan maupun kebutuhan publik lokal lainnya sebagai penerima layanan.

2.2. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Karangasem di masa depan, isu-isu tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan menentukan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan kondisi pelaksanaan program secara umum dapat disampaikan secara umum permasalahan yang dihadapi yaitu :

Terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian target kinerja, yaitu :

Tabel 2.2.
Faktor Pendorong dan Penghambat Program

No.	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Telah ditetapkannya Perda No. 2 Tahun 2024	Pedoman pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2024 belum ada
			Identifikasi pelaku usaha yang akan melakukan kemitraan belum dilaksanakan
2	Program Promosi Penanaman Modal	Adanya pedoman peraturan dalam penyediaan sarana promosi	Belum disediakannya video promosi
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dukungan pengembangan aplikasi oleh kementerian sehingga lebih menyederhanakan proses layanan	Adanya serangan ramsomware pada pusat data nasional sehingga mengganggu pelayanan
		Telah ditetapkannya Perda No. 2 Tahun 2024	Belum ada Sosialisasi terhadap Perda No. 2 Tahun 2024
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dukungan pengembangan aplikasi oleh kementerian	Kersediaan Data masih kurang
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan SDM, sarana prasarana pendukung	Sarana dan prasarana pendukung sudah berumur sehingga sering memerlukan pemeliharaan

Isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi adalah:

1. Nilai investasi di Kabupaten Karangasem masih relatif kecil dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di Bali.
2. Belum optimalnya kinerja DPMPTSP dalam memberikan pelayanan publik

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Berdasarkan atas tujuan yang telah ditetapkan, disusun masing-masing sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan 1 : Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi

Sasaran 1 : Meningkatkan realisasi investasi

Tujuan ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap misi ke-3 yaitu Pembangunan daerah mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konfrehensif dan terintegrasi. Adapun tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem dengan strategi pengembangan pusat-pusat perekonomian baru. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dilaksanakan melalui meningkatkan realisasi investasi yang diharapkan dapat memberikan multiplayer efect dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan 2 : Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal

Tujuan ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap misi ke-6 yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima. Adapun tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan strategi membangun sistem tata kelola yang terintegrasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dilaksanakan melalui Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang diharapkan dapat

membentuk birokrasi pemerintah yang prima dan responsif ditandai dengan semakin baiknya kualitas pelayanan publik khususnya di bidang penanaman modal.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2024
1.	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	206.647.000.000
2.	Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,70

Selain target sasaran yang telah tercantum dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 juga terdapat beberapa target yang mengacu pada target kinerja daerah sebagaimana ditabel berikut :

Tabel 3.2.
Target Indikator Kinerja Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024
1	Jumlah realisasi investasi	206.647.000.000
2	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,7
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	1
4	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	211
5	Rasio daya serap tenaga kerja	3,78

3.2. Strategi dan Kebijakan

Adapun strategi dimaksud antara lain:

1. Penyediaan potensi penanaman modal dalam rangka penyiapan pengembangan iklim penanaman modal
2. Meningkatkan efektivitas promosi, dan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal
3. Perbaikan kualitas Pelayanan Penanaman Modal
4. Pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal
5. Perbaikan sistem dan layanan data untuk menunjang pelayanan penanaman modal

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang akan dilakukan yaitu :

1. Penyusunan peta potensi peluang penanaman modal
2. Mempromosikan potensi penanaman modal.
3. Pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman Modal
4. Penyusunan Ranperda kemudahan/fasilitas penanaman modal.
5. Fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha
6. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
7. Koordinasi penerapan sistem aplikasi dalam menunjang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
8. Menyiapkan sarana dan prasarana
9. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan dukungan terhadap urusan pemerintah daerah lainnya

3.3. Program dan Kegiatan

Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan realisasi investasi

Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal diarahkan untuk menciptakan daya saing dengan tujuan meningkatkan jumlah investasi sehingga masyarakat akan dihadapkan kepada multiplayer effect yang beragam.

Sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan sebagaimana berikut :

1. **Program Pengembangan iklim penanaman modal**

   1.1. Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/Kota Merupakan upaya lankah strategis untuk mengembangkan iklim penanaman modal dalam bentuk kemitraan dengan UMKM.

   Sub kegiatan masih sesuai dengan Renja Tahun 2024

   1.2. Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

   Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

   Dari sisi investor peta potensi dan peluang usaha memiliki peranan strategis sebagai bahan informasi dan data juga akan membantu investor dalam membuat kajian yang informatif sebagai dasar pengambilan keputusan berinvestasi di Kabupaten Karangasem. Penyusunan peta potensi meliputi Identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang usaha di daerah yang merupakan bagian dari penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang mana akan berdampak pada kemungkinan pengembangan potensi dan peluang. Sub kegiatan masih sesuai dengan Renja Tahun 2024

2. **Program Promosi Penanaman Modal**

   2.1. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal pada tahun 2024 diarahkan pada pelaksanaan yang bertujuan untuk menginformasikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Karangasem berupa pembuatan video promosi. Sub kegiatan tidak mengalami perubahan dan masih sesuai dengan Renja Tahun 2024

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota

3.1. Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota

a. Sub Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
b. Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan kepada pemantauan berupa pengumpulan dan verifikasi LKPM, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah, pengawasan pelaku usaha. Peran Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal menjadi strategis dikarena adanya OSS RBA yang memungkinkan izin terbit otomatis sehingga memerlukan pengawasan yang intensif. Pada kegiatan ini dilakukan beberapa perubahan terutama untuk meningkatkan pengawasan penanaman modal dikarenakan dengan berlakunya OSS RBA sehingga ijin dapat terbit otomatis oleh sistem. Perubahan juga dikarenakan terdapat SILPA DAK NF pada tahun sebelumnya yang wajib diakomodir pada perubahan Renja tahun 2024.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menarik minat investasi di Kabupaten Karangasem diperlukan strategi dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim kondusif bagi investasi.

Sebagai institusi publik opini masyarakat terhadap pelayanan sangat penting untuk menghadirkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dengan tujuan mampu mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sasaran ini didukung oleh program dan kegitan sebagaimana berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

1.1. Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah
b. Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik
c. Sub Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Target kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi pelaku usaha, terlaksananya pemantauan pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha, tersedianya layanan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan serta terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha. Terdapat perubahan dalam Renja 2024 terhadap kegiatan ini difokuskan pada :

- pelaksanaan evaluasi serasi tari baris sebagai salah satu inovasi yang dilakukan dalam pelayanan perizinan
- capacity building
- pelaksanaan perak disemeru sebagai inovasi pendekatan pelayanan perizinan
- sosialisasi perizinan berusaha dalam rangka sosialisasi ketentuan dan peraturan baru serta tata cara pelaksanaan perizinan berusaha

2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada tingkat kabupaten/kota

Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub kegiatan ini diperuntukkan untuk memfasilitasi pengeloaan data dan mengolahnya menjadi inormasi yang diharapkan dapat digunakan pihak internal dan ekternal dalam pengambilan keputusan. Yang terakomodir dalam sub kegiatan ini yaitu adanya FGD pemanfaatan data dan adanya rencanya pembuatan sistem yang menunjang integrasi sistem dengan pajak daerah sehingga meminimalisir kebocoran pajak daerah.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD
d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

3.3. Kegiatan : Administrasi Umum

a. Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
b. Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor
c. Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
d. Sub Kegiatan: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
e. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

3.4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
b. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
c. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3.5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
c. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin

3.6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
c. Sub Kegiatan: Pemeliharaan mebel
d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas operasional dalam pencapaian sasaran berupa dukungan tugas-tugas administrasi kesekretariatan, sarana dan prasarana, perencanaan dan administrasi keuangan. Perubahan dalam Renja tahun 2024 difokuskan untuk memberikan dukungan terhadap pencapaian sasaran seperti pemeliharaan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, penyediaan gaji dan tunjangan, penyesuaian dalam penyediaan listrik, air, telepon, penyesuaian cetak dan penggandaan sebagai tindaklanjut berlakunya e-surat.

Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selengkapnya disajikan sebagaimana tabel dalam lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaannya lebih lanjut, untuk menjamin terlaksananya program-program kegiatan yang tertuang perubahan rencana kerja tahun 2024 serta untuk terwujudnya sinergitas kerja semua unit kerja maka dalam pelaksanaanya memerlukan langkah-langkah strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap unit kerja menerapkan prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
2. Perubahan Renja Tahun 2024 lebih lanjut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan KUA dan PPAS tahun 2024, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Karangasem
3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program

Dengan perubahan RENJA Tahun 2024 yang diharapkan selanjutnya seluruh pegawai memiliki komitmen dalam pelaksanaan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan perubahan RENJA DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Amlapura, 29 Agustus 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem,

I Ketut Mertadina,S.STP., MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770510 199601 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

LAMPIRAN

FORMULIR E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN KOTA

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM

PERIODE TAHUN : 2024

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2024 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggungjawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01			Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen	27.635.831.867	100	13.558.430.432	100	4.257.323.534	25,00	735.104.974	25,0	1.282.471.450	50,00	2.017.576.424	50,00	15.576.006.856,00	50,00%	56,36%	
01	01			**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun**	**100 persen**	**208.701.700**	**100**	**75.863.200**	**100**	**35.338.224**	**25,00**	**6.088.600**	**25**	**8.445.150**	**50,00**	**14.533.750**	**50,00**	**90.396.950,00**	**50,00%**	**43,31%**	
01	01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Banyaknya dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	30 buku	198.391.100	6	34.062.375							-	-	6	34.062.375,00	20,00%	17,17%	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen		12	36.635.300	6	33.705.724	1	5.555.200,00	2	8.332.800	3	13.888.000	15	50.523.300,00	250,00%		
01	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	100 buku	4.802.000	13	870.700							-	-	13	870.700,00	13,00%	18,13%	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen		10	1.699.450	4	830.000	1	533.400,00		0	1	533.400	11	2.232.850,00	220,00%		
01	01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun tepat waktu	100 buku	4.373.400	16	779.950							-	-	16	779.950,00	16,00%	17,83%	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen		10	1238000	4	642.000	1			0	1	-	11	1.238.000,00	220,00%		
01	01	06		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	45 buku	1.135.200	9	192.225							-	-	9	192.225,00	20,00%	16,93%	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan		8	385.200	3	160.500	3			112.350	3	112.350	11	497.550,00	275,00%		
01	02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian administrasi keuangan**	**100 persen**	**15.605.644.542**	**100**	**7.172.070.004**	**100**	**2.837.014.962**	**25,0**	**511.390.433**	**25**	**1.013.127.688**	**50,00**	**1.524.518.121**	**50,00**	**8.696.588.125,00**	**50,00%**	**55,73%**	
01	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	15.379.854.942	12	2.386.096.913							-	-	12	2.386.096.913,00	100,00%	15,51%	

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2024 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggungjawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/ bulan		21	4.675.656.566	21	2.818.662.350	21	508.362.833,00	21	1.008.586.288	21	1.516.949.121	21	6.192.605.687,00	95,45%		
01	02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Banyaknya dokumen SPJ, SPP dan SPM terverifikasi	2.250 dokumen	225.789.600	844	36.595.725							-	-	844	36.595.725,00	37,51%	16,21%	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	475 dokumen		1.960	73.720.800	500	18.352.612	136	3.027.600,00	199	4.541.400	335	7.569.000	2295	81.289.800,00	483,16%		
01	**06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran**	**100 persen**	**2.277.085.625**	**100**	**693.953.115**	**100**	**354.167.500**	**25,0**	**19.182.720**	**25**	**95.323.290**	**50,00**	**114.506.010**	**50,00**	**808.459.125,00**	**50,00%**	**35,50%**	
01	06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Banyaknya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	2.061 unit	83.000.000	564	19.430.100							-	-	564	19.430.100,00	27,37%	23,41%	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket		4	44.012.000	4	33.171.200			1	20.368.000	1	20.368.000	5	64.380.000,00	125,00%		
01	06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Banyaknya penyediaan logistik untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas	12 bulan	1.092.439.825	12	147.384.900							-	-	12	147.384.900,00	100,00%	13,49%	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 paket		56	291.653.450	15	186.818.300	2		7	42.286.650	9	42.286.650	65	333.940.100,00	138,30%		
01	06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	750 buku	66.500.000	108	6.064.625							-	-	108	6.064.625,00	14,40%	9,12%	
					Banyaknya penggandaan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	99.720 lembar		11.745	0							-	-	11745	-	11,78%		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket		8	14841000	8	6.338.000					-	-	8	14.841.000,00	100,00%		
01	06	06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	9.000 eks	70.000.000	1.125	7.875.000							-	-	1125	7.875.000,00	12,50%	11,25%	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen		96	11.716.600	12	6.300.000	3		3	1.575.000	6	1.575.000	102	13.291.600,00	212,50%		
01	06	09		Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banyaknya peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi untuk operasional pelaksanaan tugas	349 kali	965.145.800	52	150.975.440							-	-	52	150.975.440,00	14,90%	15,64%	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	52 laporan		58	204.684.288	34	121.540.000	8	19.182.720,00	8	31.093.640	16	50.276.360	74	254.960.648,00	142,31%		
01	**07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**480.000.000**	**100**	**469.637.696**	**100**	**66.680.000**	**100**	**62.697.500**		**0**	**200**	**62.697.500**	**200**	**532.335.196,00**	**200,00%**	**110,90%**	
01	07			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas operasional yang diadakan	1 unit	25.000.000	0	0	0	-					-	-	0	-	0,00%	0,00%	
01	07			Pengadaan Mebel	Banyaknya meubelair yang tersedia	22 unit	110.000.000	0	0	0	-					-	-	0	-	0,00%	0,00%	

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2024 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggungjawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Banyaknya peralatan yang diadakan	15 unit	345.000.000	34	469.637.696	3	66.680.000	3	62.697.500			3	62.697.500	37	532.335.196,00	246,67%	154,30%	
01	**08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**2.732.400.000**	**100**	**1.118.299.278**	**100**	**489.286.660**	**25,0**	**52.540.787**	**25**	**61.644.622**	**50**	**114.185.409**	**50**	**1.232.484.687,00**	**50,00%**	**45,11%**	
01	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya pelayanan administrasi surat menyurat	8.600 surat	310.700.000	3001	49.455.400							-	-	3001	49.455.400,00	34,90%	15,92%	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan		24	97.973.600	12	49.586.836	3	7.882.800,00	3	14.114.200	6	21.997.000	30	119.970.600,00	250,00%		
01	08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya terpenuhinya kebutuhan Telepon, Air, Listrik dan Internet	7 rekening	2.008.200.000	11	268.540.996							-	-	11	268.540.996,00	157,14%	13,37%	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		24	664.533.132	12	385.118.500	3	40.202.787,00	3	40.847.622	6	81.050.409	30	745.583.541,00	250,00%		
01	08	03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	2.457 unit	413.500.000	472	37.796.150							-	-	472	37.796.150,00	19,21%	9,14%	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan		24	69.212.000	12	54.581.324	3	4.455.200,00	3	6.682.800	6	11.138.000	30	80.350.000,00	250,00%		
01	**09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**6.332.000.000**	**100**	**4.028.607.139**	**100**	**474.836.188**	**25,0**	**83.204.934**	**25**	**103.930.700**	**50**	**187.135.634**	**50**	**4.215.742.773,00**	**50,00%**	**66,58%**	
01	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	12 unit	1.347.600.000	11	187.421.000							-	-	11	187.421.000,00	91,67%	13,91%	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit		20	385.689.264	11	191.795.404	11	19.354.250	10	57.327.300	10	76.681.550	30	462.370.814,00	272,73%		
01	09			Pemeliharaan Mebel	Banyaknya meubelair dan perlengkapan lainnya yang dipelihara	320 unit	750.000.000	0	0	0	0					-	-	0	-	0,00%		
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 unit		528	395.993.000	50	20.000.000					-	-	528	395.993.000,00	264,00%		
01	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya peralatan dan mesin yang dipelihara	24 unit	241.000.000	38	37.535.000							-	-	38	37.535.000,00	158,33%	15,57%	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit		48	63.831.500	35	36.000.000			3	18.950.000	3	18.950.000	51	82.781.500,00			
01	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas	2 unit	3.993.400.000	1	853.870.119							-	-	1	853.870.119,00	50,00%	21,38%	

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2024 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggungjawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit		4	2.104.267.256	1	227.040.784		63.850.684		27.653.400		91.504.084	4	2.195.771.340,00	200,00%		
															Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00%	47,39%					
															Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
					Faktor Pendorong	**: Ketersediaan SDM, sarana prasarana pendukung**																
					Faktor Penghambat	**: Sarana dan prasarana pendukung sudah berumur sehingga sering memerlukan pemeliharaan**																
02			**Meningkatnya realisasi investasi**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal**	**9 persen**	**2.020.461.900**	**252,29**	**207.562.425**	**7**	**106.017.500**		-		-	-	-	**252**	**207.562.425,00**	**2803,22%**	**10,27%**	
02	**01**			**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi**	**6 jenis**	**1.260.267.200**	**5**	**203.483.425**	**6**	**7.387.500**		-		-	-	-	**5**	**203.483.425,00**	**83,33%**	**16,15%**	
02	01	01		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya regulasi mengenai kemudahan penanaman modal (SOP, SPM, SK tim teknis, MOU) dan pemberian informasi	8 jenis	714.974.500	5	29.403.025							-	-	5	29.403.025,00	62,50%	4,11%	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen		2	174.080.400	0	-					-	-	2	174.080.400,00	200,00%		
02	01	03		Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		545.292.700	0	-	2	7.387.500					-	-	0	-	0,00%	0,00%	
02	**02**			**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya**	**8 kecamatan**	**760.194.700**	**2**	**4.079.000**	**2**	**98.630.000**		-		-	-	-	**2**	**4.079.000,00**	**25,00%**	**0,54%**	
02	02	01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya RUPM yang tersusun	50 buku	300.000.000	0	0	0	-					-	-	0	-	0,00%	0,00%	
02	02	02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Banyaknya buku pemetaan potensi dan peluang usaha yang tersusun	50 buku	200.000.000	0	4.079.000							-	-	0	4.079.000,00	0,00%	2,04%	
					Banyaknya buku profil investasi yang tersusun	50 buku	260.194.700	25	0							-	-	25	-	50,00%		
					Jumlah Peta Potensi Investasi	1 dokumen		2	218036600	1	98.630.000					-	-	2	218.036.600,00	200,00%		
															Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00%	0,00%					
															Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
					Faktor Pendorong	**: Telah ditetapkannya Perda No. 2 Tahun 2024**																
					Faktor Penghambat	**: Pedoman pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2024 belum ada**																
						: Identifikasi pelaku usaha yang akan melakukan kemitraan belum dilaksanakan																

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2024 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggungjawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
03			Meningkatnya realisasi investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal	51 persen	1.753.433.050	97,76	93.346.828	51	52.612.500		-		-	-	-	0	93.346.828,00	0,00%	5,32%	
03	01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya minat penanaman modal	756 minat	1.753.433.050	4.768	93.346.828	706	52.612.500		-		-	-	-	0	93.346.828,00	0,00%	5,32%	
03	01	01		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Banyaknya buku kajian strategi promosi penanaman modal	50 buku	250.000.000	0	0	0	-					-	-	0	-	0,00%	0,00%	
03	01	02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan	3 kali	1.503.433.050	1	93.346.828							-	-	1	93.346.828,00	33,33%	6,21%	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen		2	186.713.874	1	52.612.500					-	-	2	186.713.874,00	100,00%		
															Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00%	0,00%					
							-								Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
					Faktor Pendorong	: Adanya pedoman peraturan dalam penyediaan sarana promosi																
					Faktor Penghambat	: Belum disediakannya video promosi																
04			Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	96 persen	4.130.670.075	122,98	1.239.309.575	100	442.808.244	97,73	37.644.350		92.311.500	97,73	129.955.850,00	98	1.369.265.425,00	101,80%	33,15%	
04	01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota	96 persen	4.130.670.075	122,98	1.239.309.575	100	442.808.244	97,73	37.644.350		92.311.500	97,73	129.955.850	98	1.369.265.425,00	101,80%	33,15%	
04	01	05		Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif daerah	8 kali	772.261.075	16	65.386.750							-	-	16	65.386.750,00	200,00%	8,47%	
					Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota					4	37.100.000											

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2024 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggungjawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04	01	06		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Sektor Perkoperasian UMKM	96 persen	1.697.348.650	100	240.558.725							-	-	100	240.558.725,00	104,17%	14,17%	
					Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pariwisata dan Ketenagakerjaan	96 persen	-	100	0		-					-	-	100	-	104,17%		
					Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan	96 persen	-	100	0		-					-	-	100	-	104,17%		
					Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informatika	96 persen	-	100	0		-					-	-	100	-	104,17%		
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	880 pelaku usaha		25.616	612.066.600	800	377.955.988	5.323	35.016.750	4467	88.370.100	9.790	123.386.850	35.406	735.453.450,00			
04	01	07		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultansi Perizinan Berusaha Berbasis resiko	Banyaknya pengaduan yang ditangani	99 pengaduan	182.117.150	2	20.785.550	2						-	-	2	20.785.550,00	2,02%	11,41%	
					Banyaknya buku SKM yang dicetak	360 buku	-	40	0	40						-		40	-	11,11%		
					Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultansi perizinan Berusaha melalui sistem elektronik	18 orang		76	40.642.500	36	27.752.256	12	2.627.600,00	20	3.941.400	32	6.569.000	108	47.211.500,00	600,00%		
04	01	02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor PUPR	96 persen	1.478.943.200	100	103.840.250							-	-	100	103.840.250,00	104,17%	7,02%	
					Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial	96 persen	-	100	0		-					-	-	100	-	104,17%		

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2024 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggungjawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	200 kegiata usaha		1644	156.029.200							-	-	1644	156.029.200,00	822,00%		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		97,73%	29,35%					
														Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Rendah					
					Faktor Pendorong	**: Dukungan pengembangan aplikasi oleh kementerian sehingga lebih menyederhanakan proses layanan**																	
						: Telah ditetapkannya Perda No. 2 Tahun 2024																	
					Faktor Penghambat	**: Adanya serangan ramsomware pada pusat data nasional sehingga mengganggu pelayanan**																	
						: Belum ada Sosialisasi terhadap Perda No. 2 Tahun 2024																	
04			**Meningkatnya realisasi investasi**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase penanam modal yang menyampaikan LKPM**	**7 persen**	**2.537.750.450**	**24,24**	**482.120.600**	**5**	**699.522.412**	**7,39**	**8.682.800**		**42.259.100**	**7,39**	**50.941.900,00**	**7,39**	**533.062.500,00**	**105,57%**	**21,01%**	
04	**01**			**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten**	**300 pelaku usaha**	**2.537.750.450**	**578**	**482.120.600**	**60**	**699.522.412**	**17**	**8.682.800**	**55**	**42.259.100**	**72**	**50.941.900**	**650**	**533.062.500,00**	**216,67%**	**21,01%**	
04	01	04		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya					11	92.890.000											
04	01	05		Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha	Banyaknya pelaku usaha yang dibina	150 orang	1.134.906.000	0	302.238.800							-	-	0	302.238.800,00	0,00%	26,63%	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 pelaku usaha				321	340.765.612				14.027.600	-	14.027.600		14.027.600,00	0,00%		
04	01	06		Pengawasan Penanaman Modal	Banyaknya pengawasan pelaksanaan penanaman modal	175 kali	519.980.000	0	2.923.200							-	-	0	2.923.200,00	0,00%	0,56%	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 kegiatan usaha		16		44	265.866.800	17	8.682.800	55	28.231.500	72	36.914.300	88	36.914.300,00	293,33%		
04	01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	75 buku	882.864.450	0	39.699.900							-	-	0	39.699.900,00	0,00%	4,50%	

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2024 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggungjawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	24 kegiatan usaha		24	137.258.700							-	-	0	137.258.700,00	0,00%		
							-									Rata-rata capaian kinerja (%)	147,80%		7,28%				
																Predikat kinerja	Sangat Tinggi		Sangat Rendah				
					Faktor Pendorong	: Adanya pengendalian pelaksanaan penanaman modal berupa pengawasan penanaman modal untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha																	
					Faktor Penghambat	: -																	
05			Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	96 persen	199.233.600	93,67	28.229.900	87,00	28.165.600		-		-	0,00	-	0,00	28.229.900,00	0,00%	14,17%	
05	01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	98 persen	199.233.600	100	28.229.900	94	28.165.600		-		-		-	0	28.229.900,00	0,00%	14,17%	
05	01	01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Banyaknya pengguna data dan penerima informasi perijnan dan non perijinan	1.350 orang	199.233.600	124	28.229.900	124						-	-	124,00	28.229.900,00	9,19%	14,17%	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen		1	70.299.050	1	28.165.600					-	-	0	70.299.050,00	0,00%		
																Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00%		0,00%				
																Predikat kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah				
					Faktor Pendorong	: Dukungan pengembangan aplikasi oleh kementerian																	
					Faktor Penghambat	: Kersediaan Data masih kurang																	
									15.858.648.364		5.586.449.790		781.432.124		1.417.042.050		2.198.474.174						
																Rata-rata capaian kinerja (%)	49,26%		39,35%			141,64%	21,26%	
																Predikat kinerja	Sangat Tinggi		Tinggi				

Keterangan :

- sangat tinggi
- tinggi
- sedang
- rendah
- sangat rendah

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

Kode Rekening					Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang	Alasan
						Indikator	Target Capaian		PAGU	Target Capaian		PAGU		
							Target	Satuan		Target	Satuan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**18**	**.01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**100**	**persen**	**4.257.323.534,00**	**100**	**persen**	**4.599.731.031,00**	**342.407.497,00**	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun**	**100**	**persen**	**35.338.224,00**	**100**	**persen**	**35.338.224,00**	**-**	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	33.705.724,00	6	dokumen	33.705.724,00	-	
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	830.000,00	4	dokumen	830.000,00	-	
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	dokumen	642.000,00	4	dokumen	642.000,00		
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	laporan	160.500,00	3	laporan	160.500,00	-	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase penyelesaian administrasi keuangan**	**100**	**persen**	**2.837.014.962,00**	**100**	**persen**	**2.976.249.571,00**	**139.234.609,00**	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	orang/bulan	2.818.662.350,00	21	orang/bulan	2.957.896.959,00	139.234.609,00	pemenuhan tpp, gaji dan tunjangan
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500	dokumen	18.352.612,00	600	dokumen	18.352.612,00	-	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran**	**100**	**persen**	**354.167.500,00**	**100**	**persen**	**397.167.500,00**	**43.000.000,00**	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	33.171.200,00	2	paket	33.171.200,00	-	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	paket	186.818.300,00	15	paket	186.338.300,00	- 480.000,00	pengurangan shcafolding
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	paket	6.338.000,00	2	paket	4.818.000,00	- 1.520.000,00	pengurangan pada kartu kendali
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	6.300.000,00	12	dokumen	6.300.000,00	-	

Kode Rekening					Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang	Alasan
						Indikator	Target Capaian		PAGU	Target Capaian		PAGU		
							Target	Satuan		Target	Satuan			
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34	laporan	121.540.000,00	34	laporan	166.540.000,00	45.000.000,00	
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**persen**	**66.680.000,00**	**100**	**persen**	**213.698.900,00**	**147.018.900,00**	
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0	unit	-	-	Untuk mendukung tugas sekretariat, pengaduan dan pengawasan.
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				10	unit	44.061.100	44.061.100,00	Mebel untuk ruang transit dan podium untuk ballroom
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	66.680.000,00	14	unit	169.637.800,00	102.957.800,00	Proyektor Ballroom, peralatan penunjang pelaksanaan tusi
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**489.286.660,00**	**100**	**persen**	**404.196.260,00**	**- 85.090.400,00**	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	49.586.836,00	12	laporan	49.586.836,00	-	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	385.118.500,00	12	laporan	300.028.100,00	- 85.090.400	
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	54.581.324,00	12	laporan	54.581.324,00	-	
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah**	**100**	**persen**	**474.836.188,00**	**100**	**persen**	**573.080.576,00**	**98.244.388,00**	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	unit	191.795.404,00	10	unit	211.795.404,00	20.000.000,00	
2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	unit	20.000.000,00	10	unit	5.000.000,00	- 15.000.000,00	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	unit	36.000.000,00	40	unit	40.000.000,00	4.000.000,00	Pemeliharaan AC Ballroom
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	227.040.784,00	1	unit	316.285.172,00	89.244.388,00	Pemeliharaaan ruang transit, guiding block dan partisi toilet pria, untuk pemenuhan pelayanan publik
2	**18**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal**	**7**	**persen**	**106.017.500,00**	**7**	**persen**	**106.017.500,00**	-	
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi**	**6**	**jenis**	**7.387.500,00**	**6**	**jenis**	**7.387.500,00**	-	
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2	dokumen	7.387.500,00	2	dokumen	7.387.500,00	-	

Kode Rekening					Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang	Alasan
						Indikator	Target Capaian		PAGU	Target Capaian		PAGU		
							Target	Satuan		Target	Satuan			
													-	
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya**	**2**	**kecamatan**	**98.630.000,00**	**2**	**kecamatan**	**98.630.000,00**		
2	18	02	2.02	0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	dokumen	98.630.000,00	1	dokumen	98.630.000,00	-	
2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal**	**51**	**persen**	**52.612.500,00**	**51**	**persen**	**52.612.500,00**	-	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Banyaknya minat penanaman modal**	**706**	**minat**	**52.612.500,00**	**706**	**minat**	**52.612.500,00**	**-**	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	dokumen	52.612.500,00	1	dokumen	52.612.500,00	-	
													-	
2	**18**	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan**	**96**	**persen**	**442.808.244,00**	**96**	**persen**	**499.159.468,00**	**56.351.224,00**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota**	**96**	**persen**	**442.808.244,00**	**96**	**persen**	**499.159.468,00**	**56.351.224,00**	
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4	dokumen	37.100.000,00	4	dokumen	37.100.000,00		
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800	pelaku usaha	377.955.988,00	12.000	pelaku usaha	396.811.812,00	18.855.824,00	Pengurangan pada makanan dan minuman rapat, dan upah tenaga non asn karena meninggal dunia, penambahan perak di semeru, sosialisasi perizinan berusaha, evaluasi serasi tari baris
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	36	pelaku usaha	27.752.256,00	50	pelaku usaha	65.247.656,00	37.495.400,00	Penambahan capacity building
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM**	**6**	**persen**	**699.522.412,00**	**6**	**persen**	**793.551.912,00**	**94.029.500,00**	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota**	**Banyaknya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten**	**60**	**pelaku usaha**	**699.522.412,00**	**60**	**pelaku usaha**	**793.551.912,00**	**94.029.500,00**	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7	kegiatan usaha	92.890.000,00	11	kegiatan usaha	92.890.000,00	-	

Kode Rekening					Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang	Alasan
						Indikator	Target Capaian		PAGU	Target Capaian		PAGU		
							Target	Satuan		Target	Satuan			
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	225	pelaku usaha	340.765.612,00	321	pelaku usaha	425.107.112,00	84.341.500,00	Penambahan silpa DAK Non Fisik Tahun sebelumya
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	36	kegiatan usaha	265.866.800,00	96	kegiatan usaha	275.554.800,00	9.688.000,00	Penambahan frekuensi pengawasan penanaman modal
2	**18**	**06**			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi**	**87**	**persen**	**28.165.600,00**	**87**	**persen**	**86.279.988,00**	**58.114.388,00**	
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan**	**94**	**persen**	**28.165.600,00**	**94**	**persen**	**86.279.988,00**	**58.114.388,00**	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	dokumen	28.165.600,00	1	dokumen	86.279.988,00	58.114.388,00	Pengurangan tenaga non asn karena risign, penambahan belanja aplikasi
						Jumlah			**5.586.449.790,00**			**6.137.352.399,00**	**550.902.609,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KARANGASEM
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**4.913.385.640,00**	**5.586.449.790,00**	**6.137.352.399,00**	**1.223.966.759,00**							**7.290.635.053,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.913.385.640,00**	**5.586.449.790,00**	**6.137.352.399,00**	**1.223.966.759,00**							**7.290.635.053,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**4.913.385.640,00**	**5.586.449.790,00**	**6.137.352.399,00**	**1.223.966.759,00**							**7.290.635.053,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.187.763.784,00**	**4.257.323.534,00**	**4.599.731.031,00**	**904.871.269,00**							**5.092.635.053,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun*				100 %	100 %	35.340.075,00	35.338.224,00	35.338.224,00	-1.851,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		45.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	33.706.200,00	33.705.724,00	33.705.724,00	-476,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			43.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	831.375,00	830.000,00	830.000,00	-1.375,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	642.000,00	642.000,00	642.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	160.500,00	160.500,00	160.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan*				100 %	100 %	2.746.535.676,00	2.837.014.962,00	2.976.249.571,00	229.713.895,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		3.148.985.053,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.710.016.976,00	2.818.662.350,00	2.957.896.959,00	247.879.983,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.099.435.053,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500 Dokumen	600 Dokumen	36.518.700,00	18.352.612,00	18.352.612,00	-18.166.088,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			49.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran*				100 %	100 %	354.170.200,00	354.167.500,00	397.167.500,00	42.997.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		454.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	33.173.900,00	33.171.200,00	33.171.200,00	-2.700,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	186.818.300,00	186.818.300,00	186.338.300,00	-480.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			222.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	2 Paket	6.338.000,00	6.338.000,00	4.818.000,00	-1.520.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34 Laporan	34 Laporan	121.540.000,00	121.540.000,00	166.540.000,00	45.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			186.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	81.680.000,00	66.680.000,00	213.698.900,00	132.018.900,00			-	- -	Kantor DPMPTSP		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	10 unit Unit	15.000.000,00	0,00	44.061.100,00	29.061.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	14 Unit	66.680.000,00	66.680.000,00	169.637.800,00	102.957.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	489.296.683,00	489.286.660,00	404.196.260,00	-85.100.423,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		559.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	49.596.800,00	49.586.836,00	49.586.836,00	-9.964,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	385.118.500,00	385.118.500,00	300.028.100,00	-85.090.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.581.383,00	54.581.324,00	54.581.324,00	-59,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			89.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	480.741.150,00	474.836.188,00	573.080.576,00	92.339.426,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		859.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	10 Unit	193.691.950,00	191.795.404,00	211.795.404,00	18.103.454,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	10 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	40 Unit	40.000.000,00	36.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			53.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	227.049.200,00	227.040.784,00	316.285.172,00	89.235.972,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			456.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal**				**8 %**	**7 %**	**106.017.500,00**	**106.017.500,00**	**106.017.500,00**	**260.582.500,00**							**366.600.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi*				6 jenis	6 jenis	7.387.500,00	7.387.500,00	7.387.500,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pelaku Usaha		114.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.387.500,00	7.387.500,00	7.387.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			114.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya*				2 kecamatan	2 kecamatan	98.630.000,00	98.630.000,00	98.630.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Calon Pelaku Usaha		252.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	98.630.000,00	98.630.000,00	98.630.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			252.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal**				**51 %**	**51 %**	**52.612.500,00**	**52.612.500,00**	**52.612.500,00**	**243.387.500,00**							**296.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Banyaknya minat penanaman modal*				706 minat	706 minat	52.612.500,00	52.612.500,00	52.612.500,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Calon Pelaku Usaha		296.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	52.612.500,00	52.612.500,00	52.612.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			296.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan**				**96 %**	**96 %**	**458.573.856,00**	**442.808.244,00**	**499.159.468,00**	**475.726.144,00**							**934.300.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota*				96 %	96 %	458.573.856,00	442.808.244,00	499.159.468,00	40.585.612,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemohon izin		934.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	37.100.000,00	37.100.000,00	37.100.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			173.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				800 Pelaku Usaha	12000 Pelaku Usaha	393.721.600,00	377.955.988,00	396.811.812,00	3.090.212,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA INSENTIF DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			719.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				36 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	27.752.256,00	27.752.256,00	65.247.656,00	37.495.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			41.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase penanam modal yang menyampaikan LKPM**				**6 %**	**6 %**	**80.252.400,00**	**699.522.412,00**	**793.551.912,00**	**472.647.600,00**							**552.900.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten*				60 pelaku usaha	60 pelaku usaha	80.252.400,00	699.522.412,00	793.551.912,00	713.299.512,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pelaku usaha		552.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				0 Kegiatan Usaha.	11 Kegiatan Usaha.	0,00	92.890.000,00	92.890.000,00	92.890.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				0 Pelaku Usaha	321 Pelaku Usaha	165.600,00	340.765.612,00	425.107.112,00	424.941.512,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			242.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				24 Kegiatan Usaha	96 Kegiatan Usaha	80.086.800,00	265.866.800,00	275.554.800,00	195.468.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			210.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi**				**87 %**	**87 %**	**28.165.600,00**	**28.165.600,00**	**86.279.988,00**	**20.034.400,00**							**48.200.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan*				94 %	94 %	28.165.600,00	28.165.600,00	86.279.988,00	58.114.388,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Calon Pelaku Usaha		48.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	28.165.600,00	28.165.600,00	86.279.988,00	58.114.388,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA INSENTIF DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			48.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								**4.913.385.640,00**	**5.586.449.790,00**	**6.137.352.399,00**	**1.223.966.759,00**							**7.290.635.053,00**	

BERITA ACARA VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

Nomor : 050/875/PSDA/Bapeda

Pada Hari ini : **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Bapeda Kabupaten Karangasem**, telah dilaksanakan Verifikasi **Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2024**, dengan hasil sebagai berikut:

LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

No	Aspek/Kegiatan	Ketersediaan		Kesesuaian		Hasil Verifikasi
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	**SISTEMATIKA RENJA**					
	BAB I. PENDAHULUAN					
	1.1 Latar Belakang	√		√		
	1.2 Landasan Hukum	√			√	• Dasar Hukum masih mencantumkan regulasi yg sudah tdk relevan dan double pencantuman regulasi, agar disesuaikan • Regulasi No. 26, 30, 31, 32, 34, 36 • Tambahkan Perbup No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD SB Tahun 2024
	1.3 Maksud dan Tujuan	√			√	• Redaksi maksud dan tujuan agar disesuaikan dengan narasi perubahan Renja
	1.4 Sistematika Penulisan	√		√		

	BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024					
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai TW II	√			√	• Hasil evaluasi dalam tabel E.81 agar dituangkan/diuraikan ke dalam narasi
	2.2 Isu-isu Penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	√		√		
	BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
	3.1 Tujuan dan sasaran	√		√		
	3.2 Strategi dan arah kebijakan	√		√		
	3.3 Program dan Kegiatan	√			√	• Agar diuraikan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam narasi
	BAB IV. PENUTUP	√		√		

Tim Verifikasi : Amlapura, 28 Agustus 2024

PD yang diverifikasi	**Tanda tangan**	**Tim Verifikasi :**	**Tanda Tangan**
1. Ni Luh Putu Yayuk Suparmi, SE., MM.	1.	1. I Nyoman Adi Sudana, SE., M.Si 2. Ketut Ayu Ratna Dewi, ST.	1. 2.

Mengetahui
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Karangasem,

I Ketut Mertadina, S.STP., MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770510 199601 1 001

Mengetahui
Kepala Bapeda Kab. Karangasem,

I Nyoman Sutirtayasa, ,ST., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670805 199703 1 004

BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 642/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15)

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem;

b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem;

c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem;

Dipindai dengan CamScanner

d. menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem di Amlapura

Dipindai dengan CamScanner

3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
5. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem di Amlapura
6. Yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 642/HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem 2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Penanaman Modal	1. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem 2. Pejabat Fungsional Substansi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Dipindai dengan CamScanner

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
6.	Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem 2. Pejabat Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
7.	Kelompok Kerja Penyusun Dokumen Rencana Kerja	1. Perencana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
8.	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi	1. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem 2. Pengelola Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem 3. Pengolah Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGASEM

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN
2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGASEM
Jln Jend. Sudirman No. – Telp. (0363) 22638 Fax 22638 Amlapura

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 594 /HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dna Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
d. menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 22 Desember 2023

Ar BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 594/HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem 2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6.	Kelompok Kerja Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
7.	Kelompok Kerja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
8.	Kelompok Kerja Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Kepala Bidang Pengelolaan Profil Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional pada Bidang Pengelolaan Profil Kependudukan
9.	Kelompok Kerja Pengumpul dan Pengolah data	1. Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem 2. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem 3. Perencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ar BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas karunia serta anugrah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Renja merupakan kewajiban Dinas/ Instansi Pemerintah sebagai media pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kegiatan sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Keberhasilan penyusunan Renja ini berkat kerja sama yang baik semua komponen bidang yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bahwa materi Renja ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami mohon partisipasi semua pihak untuk memberikan masukan berupa kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan ini. Untuk itu tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

Demikian semoga ini bisa bermanfaat bagi pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 2 Agustus 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Karangasem,

Drs. Made Kusuma Negara

NIP. 19750221 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 ..... **5**

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II 6

2.2 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 10

BAB III RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **11**

3.1 Tujuan dan Sasaran 12

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 13

3.3 Program dan Kegiatan 14

BAB IV PENUTUP **18**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah melalui setiap Organisasi Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, berdaya guna dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dengan mengacu kepada Peraturan yang berlaku. Perubahan Renja ini didasari oleh hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 Triwulan II, Tujuan, Sasaran, dana Indikatif beserta sumbernya dan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan pembangunan baik aspek keuangan, target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi yang membutuhkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang No 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karangasem

Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 -2032;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ini disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKA Perangkat Daerah) Tahun 2024.
2. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Perangkat Daerah berdasarkan Renstra dan hasil musrenbang dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

2.2 Isu-Isu penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGASEM

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi-misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024 meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, menunjukan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan perencanaan di awal sehingga berdampak pada penyesuaian anggaran yang dapat direalisasikan penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Adanya pergerseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tahun 2024 sampai dengan triwulan II tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah

Triwulan II Tahun 2024

Kode rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Peranngkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perang Daderah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaa Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	
														I		II					
3						4	5	6		7		8		9		10		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
						DISDUKCAPIL				6.352.180.249	90,56	14.780.377.638	100,00	14.912.396.578	15	2.203.712.017	23,84	3.555.653.010	**38,62**	**5.759.365.027**	129,18	20.532.232.2
2	**1 2**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan dan Kinerja ASN	500	%	**4.828.861.499**	**87,41**	**4.093.548.613**	100,00	**5.129.691.394**	**13,34**	**684.336.817**	**27,71**	**1.421.440.410**	**41,05**	**2.098.792.227**	**128,46**	**6.192.340.84**
2	**1 2**	**1**	**0 2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**500**	**%**	**5.000.000**	0	0	**100**	**19.183.800**	**0**	**0**	**36,41**	**6.985.000**	**36,41**	**6.985.000**	**36,41**	**6.985.000**
2	1 2	1	**0 2**	**01**	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20	Dok	5.000.000	0	0	**20**	19.183.800	0	0	36,41	6.985.000	36,41	6.985.000	36,41	6.985.000
2	**1 2**	**1**	**0 2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan**	**500**	**%**	**3.382.113.139**	**89,67**	**2.967.250.039**	**100**	**3.682.218.632**	**15,10**	**556.012.135**	**29,05**	**1.069.832.136**	**44,15**	**1.625.844.271**	**133,82**	**4.593.094.31**

2	1 2	1	0 2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang/ Bulan	3.382.113.139	89,67	2.951.612.239	100	3.664.061.432	15,17	556.012.135	29,00	1.062.567.136	44,17	1.618.579.271	133,84	4.570.191.510
2	1 2	1	0 2	02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	94.000.000	0	15.637.800	5	18.157.200	0	0	40,01	7.265.000	40,01	7.265.000	40,01	22.902.800
2	**1 2**	**1**	**0 2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran**	**500**	**%**	**481.994.000**	**70,68**	**267.169.800**	100	**381.664.300**	**6,1**	**23.433.200**	**29,8**	**113.822.800**	**36,0**	**137.256.000**	**106,64**	**404.425.800**
2	1 2	1	0 2	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	500	%	9.994.000	97,19	7.995.200	100	8.317.900	0	0	25,35	2.109.000	25,35	2.109.000	122,54	10.104.200
2	1 2	1	0 2	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Tahun	177.000.000	94,78	207.130.800	1	210.632.600	11,13	23.433.200	19,98	42.079.800	31,10	65.513.000	125,88	272.643.800
2	1 2	1	0 2	06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500	%	40.000.000	93,07	17.043.800	100	17.043.800	0	0	17,46	2.975.000	17,46	2.975.000	110,53	20.018.800
2	1 2	1	0 2	06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dok	10.000.000	0	5.000.000	3	5.670.000	0	0	14,71	834.000	14,71	834.000	14,71	5.834.000
2	1 2	1	0 2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Tahun	245.000.000	68,4	30.000.000	1	140.000.000	0	0	47,02	65.825.000	47,02	65.825.000	115,42	95.825.000
2	**1 2**	**1**	**0 2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	500	**%**	**426.757.850**	**90,69**	**407.814.200**	100	**472.506.295**	**8,95**	**42.284.520**	**20,54**	**97.040.472**	**29,49**	**139.324.992**	**120,18**	**547.139.192**
2	1 2	1	0 2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Bulan	135.000.000	85,18	112.714.600	36	102.015.499	22,41	22.863.720	20,18	20.590.072	42,60	43.453.792	127,78	156.168.392
2	1 2	1	0 2	08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Bulan	65.000.000	95,01	16.692.100	12	14.127.500	0	0	34,65	4.895.000	34,65	4.895.000	129,66	21.587.100

2	1 2	1	0 2	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	500	%	226.757.850	91,88	278.407.500	100	356.363.296	5,45	19.420.800	20,08	71.555.400	25,53	90.976.200	117,41	369.383.700	2
2	**1 2**	**1**	**0 2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**500**	**%**	**537.996.510**	**98,02**	**451.314.574**	100	**574.118.367**	**20,28**	**62.606.962**	**23,30**	**133.760.002**	**43,58**	**196.366.964**	**141,60**	**647.681.538**	**2**
2	1 2	1	0 2	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	317.996.510	99,13	355.810.674	20	504.903.958	12,40	62.606.962	21,09	106.500.002	33,49	169.106.964	132,62	524.917.638	
2	1 2	1	0 2	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	70.000.000	99,62	14.000.000	2	9.691.409	0	0	98,02	9.500.000	98,02	9.500.000	197,64	23.500.000	9
2	1 2	1	0 2	09	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	173	Unit	150.000.000	95,32	81.503.900	173	59.523.000	0	0	29,84	17.760.000	29,84	17.760.000	125,16	99.263.900	
2	**1 2**	**2**				**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**98,5**	**%**	**1.242.162.750**	**94,99**	**2.409.236.225**	99	**2.205.440.676**	**4,79**	**105.636.800**	**12,44**	**274.424.000**	**17,2**	**379.535.350**	**112,22**	**2.788.771.575**	**1**
2	**1 2**	**2**	**0 2**	**01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**500**	**%**	**1.242.162.750**	**94,99**	**2.409.236.225**		**2.205.440.676**	**4,79**	**105.636.800**	**12,44**	**274.424.000**	**17,2**	**379.535.350**	**112,22**	**2.788.771.575**	
2	1 2	2	0 2	01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	500	%				3	17.986.800	1,39	250.000	1,53	275.450	2,92	525.450	2,92	525.450	
2	1 2	2	0 2	01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	500	%	751.000.000	91,21	954.515.725	4	849.574.388	5,71	48.552.000	19,60	166.486.350	25,31	215.038.350	116,52	1.169.554.075	

12	2	02	01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	500	%	491.162.750	98,77	1.454.720.500	12	1.337.879.488	4,25	56.834.800	8,0	107.662.200	12,30	164.497.000	111,07	1.619.217.500	0,22
12	**3**				**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan kepemilikan akta-akta pencatatan Sipil**	**97**	**%**	**177.656.000**	**87,16**	**7.907.074.400**	98	**7.291.829.452**	**18,91**	**1.378.979.600**	**24,46**	**1.783.224.400**	**43,37**	**3.162.204.000**	**130,53**	**11.069.278.400**	**134,6**
12	**3**	**02**	**02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase Terselenggaranya Pencatatan Sipil**	**500**	**%**	**177.656.000**	**87,16**	**7.907.074.400**	100	**7.291.829.452**	**18,91**	**1.378.979.600**	**24,46**	**1.783.224.400**	43,37	**3.162.204.000**	**130,53**	**11.069.278.400**	**26,1**
12	3	02	02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	500	%	177.656.000	87,16	7.907.074.400	100	7.291.829.452	18,91	1.378.979.600	24,46	1.783.224.400	43,37	3.162.204.000	130,53	11.069.278.400	26,1
12	**4**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Ketersediaan Data, Informasi Administrasi Kependudukan**	**Tersedia**	**Tersedia**	**93.500.000**	**92,7**	**311.821.600**	**Tersedia**	**224.572.620**	**11,88**	**26.676.000**	**28,44**	**63.875.000**	**40,32**	**90.551.000**	**133,02**	**402.372.600**	**18,9**
12	**4**	**02**	**'03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Penyampaian Informasi Administrasi Kependudukan kepada masyrakat dan pihak0pihak terkait**	**500**	**%**	**93.500.000**	92,7	**311.821.600**	**100**	**224.572.620**	**11,88**	**26.676.000**	**28,44**	**63.875.000**	**40,32**	**90.551.000**	**133,02**	**402.372.600**	**26,6**
12	4	02	03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	500	%	93.500.000	92,7	311.821.600	100	224.572.620	11,88	26.676.000	28,44	63.875.000	40,32	90.551.000	133,02	402.372.600	26,6
12	**5**				**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersedianya Buku Profil Kependudukan**	**Ada**	**Ada**	**10.000.000**	**99,65**	**58.696.800**	Ada	**60.862.436**	**13,280**	**8.082.800**	**20,85**	**12.689.200**	**34,13**	**20.772.000**	**133,78**	**79.468.800**	**4,89**
12	**5**	**02**	**01**		Penyusunan Profil Kependudukan	**Persentase tersedianya profil kependudukan**	**Ada**	**Ada**	**10.000.000**	99,65	**58.696.800**	10	**60.862.436**	**13,280**	**8.082.800**	20,85	**12.689.200**	34,13	**20.772.000**	**133,78**	**79.468.800**	4,89

1 2	5	0 2	01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	20	Buku	10.000.000	99,65	58.696.800	10	60.862.436	13,280	8.082.800	20,85	12.689.200	34,13	20.772.000	133,78	79.468.800	6,6
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	**38,62 %**	**38,62%**			
																	Predikat kinerja	**Tinggi**	**Tinggi**			

2.2 ISU ISU PENTING TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang masih dihadapi sampai saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya penduduk pendatang yang tidak melapor di wilayah tempat tinggalnya.
2. Masih banyak penduduk pendatang belum memenuhi persyaratan untuk memiliki Kartu Tinggal Sementara (KTS).
3. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih kurang

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

3.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan diacapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) samapi 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepeda pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam 5 (lima) Tahun ke depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Daerah Periode Tahun 2021–2026 pada misi yang ke 6, yaitu :

1. ***Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*** Tujuan inibermakna, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ingin mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib dan berlandaskan pada aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Memberikan pelayanan terbaik adalah suatu wujud yang konkrit dari upaya pengelelolaan dan pemberian pelayanan terbaik, bermutu dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga pelayanannya menjadi lebih profesional, lebih baik dan lebih cepat sehingga masyarakat menjadi puas.

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dijabarkan sebagai berikut :

1. ***Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil***

   Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut :

   1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
   2. Rasio bayi berakte kelahiran
   3. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
   4. Cakupan penerbitan akta kelahiran
   5. Rasio Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
   6. Cakupan penerbitan Akta Kematian
   7. Cakupan penerbitan Akta Perkawinan

2. ***Meningkatnya kualitas pengelolan dan pemanfaatan data kependudukan***

   Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut :

   1. Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten
   2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
   3. Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

3.2 Setrategi Dan Arah Kebijakan

Berikut strategidan arah kebijakan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026:

Sasaran 1 : *Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*

3.2.1 Strategi yang ditetapkan :

1. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui sosialisasi dan edukasi;
2. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan dengan inovasi-inovasi pelayanan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui program- kegiatan Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Si Dana;
3. Penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3.2.2 Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyrakat
2. Peningkatan sosialisasi terkait pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran 2 : *Meningkatnya kualitas pengelolan dan pemanfaatan data kependudukan*

a) Strategi yang ditetapkan :

1. Melakukan update data secara rutin;
2. Menjadikan data kependudukan sebagai data dasar dalam hal perencanaan pemerintahan, pembangunan, perijinan dan kemasyarakatan;
3. Meningkatkan perjanjian kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pemanfaatan data kependudukan.

b) Kebijakan :

1. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Dokumen perubahan rencana kerja ini menjabarkan dan menetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja tersebut merupakan tolok ukur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam mengukur keberhasilan organisasi. Dalam anggaran perubahan tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 16.285.396.528 bertambah Rp. 1.373.000.000 dari pagu induk yang semula yaitu sebesar Rp. 14.912.396.528,-.

Tambahan anggaran paling banyak dialokasikan pada sub kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil, yang didalamnya berisikan rincian belanja salah satu Program unggulan Kepala Daerah Karangasem yaitu Atma Kerthi, sub kegiatan ini mendapat tambahan anggaran sebanyak Rp. 968.000.000,-.

Selain itu Disdukcapil Karangasem juga mendapatkan alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp.385.000.000,- guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Matriks perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem selengkapnya disajikan dalam tabel 3.3 berikut:

REKAPITULASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGASEM

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Pagu Anggaran 2024		Bertambah / (Berkurang)
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1					2	3	4		5		6
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
2	**12**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	***100%***	***100%***	**5.129.691.344**	**5.607.519.404**	**477.828.060**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***100%***	***100%***	**19.183.800**	**20.857.300**	**1.673.500**
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	19.183.800	20.857.300	1.673.500
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan**	**100%**	**100%**	**3.682.218.632**	**3.684.932.132**	**2.713.500**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	3.664.061.432	3.664.061.432	-
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	18.157.200	20.870.700	2.713.500
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**381.664.300**	**440.357.384**	**58.693.084**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.317.900	8.317.900	-
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	210.632.600	201.912.184	(8.720.416)
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.043.800	17.043.800	-
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	5.670.000	5.670.000	-
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	25 Laporan	25 Laporan	140.000.000	207.413.500	67.413.500

2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**472.506.245**	**864.506.245**	**392.000.000**
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	102.015.449	109.015.449	7.000.000
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.127.500	14.127.500	-
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	356.363.296	741.363.296	385.000.000
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**574.118.367**	**596.866.343**	**22.747.976**
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	20 unit	504.903.958	510.343.343	5.439.385
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	9.691.409	15.000.000	5.308.591
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	173 unit	173 unit	59.523.000	71.523.000	12.000.000
2	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**99%**	**99%**	**2.205.440.676**	**2.132.612.616**	**(72.828.060)**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**100%**	**2.205.440.676**	**2.132.612.616**	**(72.828.060)**
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	17.986.800	17.986.800	-
2	12	02	2.01	02	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4 Dokumen	4 Dokumen	849.574.388	791.311.940	(58.262.448)
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	1.337.879.488	1.323.313.876	(14.565.612)
2	**12**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**	**Cakupan kepemilikan akta-akta pencatatan Sipil**	**98%**	**98%**	**7.291.829.452**	**8.259.829.452**	**968.000.000**
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase Terselenggaranya Pencatatan Sipil**	**100%**	**100%**	**7.291.829.452**	**8.259.829.452**	**968.000.000**

2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	7.291.829.452	8.259.829.452	968.000.000
2	**12**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Ketersediaan Data, Informasi Administrasi Kependudukan**	**Tersedia**	**Tersedia**	**224.572.620**	**224.572.620**	**-**
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Penyampaian Informasi Administrasi Kependudukan kepada pihak-pihak terkait**	**100%**	**100%**	**224.572.620**	**224.572.620**	**-**
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	8 Laporan	8 Laporan	224.572.620	224.572.620	-
2	**12**	**05**			**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Tersedianya Buku Profil Kependudukan**	**Ada**	**Ada**	**60.862.436**	**60.862.436**	**-**
2	12	05	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Persentase tersedianya profil kependudukan**	**100%**	**100%**	**60.862.436**	**60.862.436**	**-**
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	10 Dokumen	10 Dokumen	60.862.436	60.862.436	-
JUMLAH									**14.912.396.528**	**16.285.396.528**	**1.373.000.000**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ini telah disusun secara terarah dengan mengacu sesuai Peraturan-peraturan yang berlaku.

Pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem mendapat pagu sebesar Rp. 16.285.396.528,- bertambah Rp. 1.373.000.000, diharapkan dengan tambahan anggaran tersebut pemberian pelayanan kepada masyarakan menjadi lebih maksimal, sehingga terget yang telah disusun dapat tercapai.

Rencana kerja ini akan terlaksana dan berhasil apabila mendapat perhatian dan dukungan semua pihak. Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara fokus, tulus, terarah, dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan.

Amlapura, 2 Agustus 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karangasem,

Drs. Made Kusuma Negara
NIP 19750221 199311 1 001

RANCANGAN PERUBAHAN RENJA
RSUD KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024



Jl.Ngurah Rai No. 58 Amlapura (808111)
Telp, (0363) 21470, 21011, Fax (0363) 23592
Email : rsud_karangasem@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur atas asung kertha wara nugraha Ida Shanghyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, guna menjalankan amanat Undang-undang dan peraturan lainnya terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Adapun tujuan dan maksud Perubahan Rencana Kerja 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan di anggaran perubahan tahun 2024. Sebagai salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. RSUD Kabupaten Karangasem merupakan instansi pelayanan yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang digantungkan oleh seluruh komponen masyarakat pengguna layanan kesehatan dan stake holder terkait di Kabupaten Karangasem.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) RSUD Kabupaten Karangasem tahun 2021 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Perubahan Renja RSUD Kabupaten Karangasem ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Anggaran Perubahan Tahun 2024.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kemungkinan masih ada yang belum sempurna dalam penyusunan Renja ini, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan lebih lanjut.

Atas partisipasi semua pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Renja ini, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Renja ini dapat bermanfaat sesuai tujuannya.

Amlapura, 10 Agustus 2024

Direktur RSUD Kabupaten Karangasem

dr. I Gede Yuliasena, M.M

NIP. 19790730 200604 1 011

DAFTAR ISI

BAB		Halaman
	Kata Pengantar	i
	Daftar isi	ii
	Daftar Tabel	iii
	Tim Penyusun Renja RSUD kabupaten Karangasem	iv
I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
II	EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
	2.3 Isu Isu Penting Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD	11
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD KAB.KARANGASEM	17
	3.1 Tugas dan Sasaran	17
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
	3.3 Program dan Kegiatan	20
IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
V	PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
1	Realisasi dan Alokasi Anggaran dan Pendapatan RSUD Karangasem sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2024.....	7
2	T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Kab.Karangasem T.A 2023.....	8
3	Cost Recovery Rate RSUD Kabupaten Karangasem.....	10
4	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit RSUD Kab.Karangasem	10
5	T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Karangasem..... ...	14
6	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan Indikator Kinerja dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dengan Tugas – Tugas Pelayanan RSUD Kab. Karangasem	19
7	Keterkaitan Kebijakan dengan Program – Program pada RSUD Kab. Karangasem.....	20
8	TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Karangasem – Provinsi Bali.....	21
9	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023.	23

Tim Penyusun RENJA RSUD Kabupaten Karangasem

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Karangasem
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
4.	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karangasem
5.	Ketua	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem
7.	Kelompok Kerja Ketatausahaan	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem 2. Kepala Sub BAgian Keuangan dan Akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem 3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem
8.	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan	1. Kepala Bidang Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem 2. Kepala Seksi Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem 3. Kepala Seksi Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem
9.	Kelompok Kerja Bidang Penunjang	4. Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem 5. Kepala Seksi Penunjang Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem 6. Kepala Seksi Penunjang Non Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem
10.	Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya	1. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjamin Mutu pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
	Manusia dan Penjamin Mutu	2. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Diklat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem 3. Kepala Seksi Penjamin Mutu dan Akreditasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2024 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan khususnya bidang pelayanan kesehatan tingkat rujukan.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia(lansia), dan keluarga miskin.

Guna ikut mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan tersebut di atas, maka dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Karangasem 2021-2026, dalam salah satu sasarannya adalah optimalisasi pelayanan untuk mewujudkan misi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang bebas KKN guna mewujudkan visi Kabupaten Karangasem yaitu *"Terwujudnya Karangasem Yang Pradnyan, Kertha, Santi dan Nadi (KARANGASEM PRAKERTI NADI)"*. Dalam sasaran optimalisasi pelayanan salah satu sasaran utamanya adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan kesehatan tingkat rujukan di rumah sakit dalam hal ini RSUD Kabupaten Karangasem.

Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, maka mengacu pada RPJMD Kabupaten Karangasem 2021-2026, RSUD Kabupaten Karangasem juga menyusun Rencana Startegis (Renstra) Tahun 2021-2026, yang kemudian setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) termasuk Renja Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up*. Unit kegiatan di lingkungan Rumah Sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kegiatan tersebut.

Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Karangasem bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

RSUD Kabupaten Karangasem merupakan rumah sakit rujukan di Kabupaten Karangasem ditetapkan sebagai rumah sakit umum daerah (RSUD) Kelas C oleh Menteri Kesehatan RI berdasarkan SK. Menkes RI Nomor No. 486/Menkes/SK/V/1997 tanggal 20 Mei 1997, kemudian melalui Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 RSUD Karangasem ditetapkan sebagai PPK-BLUD berstatus penuh.

Sedangkan struktur organisasi dan tata kerja RSUD Karangasem masih berdasarkan Perda No 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Pemerintah Daerah. Maka RSUD Kabupaten Karangasem mempunyai tugas utama melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya

peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024, sejumlah peraturan Perundangan, Perda dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD adalah :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang;
22. Paraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021- 2026;
23. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola RSUD Kabupaten Karangasem sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang RKPD Semesta Berencana Karangasem Tahun 2022;
25. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2022 dan
27. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSUD Kabupaten Karangasem adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1) Sebagai acuan bagi RSUD Kabupaten Karangasem dan bagi masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah rakit.
2) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Kabupaten Karangasem yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
3) Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang menerapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Karangasem pada umumnya.

b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah :

1) Menjabarkan rencana strategis RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2024.
2) Menjadi pedoman bagi RSUD Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daeah pada Tahun Anggaran 2024.
3) Menjadi acuan bagi RSUD Kabupaten Karangasem dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
4) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.

5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Kabupaten Karangasem, diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas Pengertian Renja Perubahan, dari mulai sistem penyusunan dengan memprioritaskan pada perencanaan yang *bottom up*, pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing masing unit kegiatan. Landasan Hukum memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan RSUD Kabupaten Karangasem, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Perubahan. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perubahan berisi tentang penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan ini. Sistematika penulisan memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan RSUD Kabupaten Karangasem, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra pada tahun anggaran 2024 serta menjelaskan tentang program program tidak memenuhi target dan yang memenuhi target. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah menjelaskan tentang tingkat keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis. Isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD memuat tentang isu isu penting yang diperhatikan untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kab. Karangasem. *Review* terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tentang proses yang membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Penelahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadapan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan penelitian lapangan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD

Telahan terhadap kebijakan nasional, menyangkut mengenai penelahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Tujuan dan sasaran renja perubahan perangkat daerah, merumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasran target kinerja Renstra perangkat daerah. Program dan kegiatan berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dengan jumlah program, jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan penjelasan dari rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD. Disamping itu juga memuat pendanaan perangkat Daerah tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan realisasi fisik dan keuangan RSUD Kabupaten Karangasem tahun 2024 terhadap kegiatan-kegiatan yang telah di aksanakan. Hasil pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu yaitu Tahun ditetapkan dalam renja tahun anggaran 2024 dapat dianalisis dari realisasi pendapatan dan penggunaan anggaran. Adapun hasil realisasi pendapatan RSUD Kabupaten Karangasem dan realisasi penggunaan anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.
Realisasi dan Alokasi Anggaran dan Pendapatan
RSUD Karangasem Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I.	**SUMBER DANA : APBD dan Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Karangasem**	**74.958.175.000,00**	**22.403.943.420,00**	**31,63**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Peningkatan Pelayanan BLUD				
a	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	73.136.275.000,00	22.403.943.420,00	31,63
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
b	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	321.900.000,00	-	-
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
c	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.500.0000.000,00	-	-
	TOTAL SELURUHNYA :	**74.958.175.000,00**	**22.403.943.420,00**	**31,63**

Berdasarkan hasil pencapaiannya bahwa semua program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024 sudah terlaksana dengan prosentase 31,63%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dilakukan dengan menggunakan data/informasi yang diperoleh secara lengkap dan akurat.

Sebagai wujud komitmen RSUD Kabupaten Karangasem untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026, dijabarkan dalam indikator-indikator kinerja RSUD Kabupaten Karangasem yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

Sebagai satuan kerja pelaksana urusan wajib pelayanan dasar yaitu bidang kesehatan dan sudah ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit, maka Indikator kinerja RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 merupakan perpaduan antara indikator-indikator SPM dan Indikator Mandiri. Adapun tindak pencapaian indikator kinerja RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD Kab. Karangasem TA. 2023

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangka Daerah			Realisasi Capaian		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Bed Occupancy Ratio (BOR)	-	60-85%	71%	60%	61%	35,78%	40,42%	56,2%
2	Net Death Rate (NDR)	-	<25%	14%	18%	17%	20,29%	14,21 %	19,8%
3	Gross Death Rate (GDR)	-	45%	25%	30%	28%	49,38%	42,63 %	47,6%
4	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	-	>80%	85%	88%	89%	87,40%	87,40%	87,82%
5	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit	-	>70%	80%	81%	82%	90,26%	82,29%	82,29%
6	Predikat Pencapaian Akreditasi Rumah Sakit	-	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi

Dari data pada daftar di atas, beberapa indikator tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dari kemekes, seperti Bed Occupancy Rate (BOR) sebesar 56,2 Persen (standar 60% - 85%). Salah satu faktor yang menyebabkan BOR RSUD Kabupaten Karangasem dibawah standar adalah ada kaitan dengan kebiasaan masyarakat yang sakit enggan untuk dirawat di rumah sakit. Masyarakat memilih mengobati secara mandiri, dan semakin banyaknya penambahan fasilitas kesehatan di lingkungan Kabupaten Karangasem.

Cost Recovery Rate merupakan perbandingan antara penerimaan fungsional serta penerimaan usaha lainnya dibandingkan seluruh biaya operasional non modal. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasionalnya dari pendapatan murni rumah sakit. *Cost Recovery Rate* RSUD Kabupaten karangasem , sebagai berikut :

Tabel. 3
Cost Recovery Rate
RSUD Kabupaten Karangasem

No	Pendapatan Fungsional	Biaya Operasional Non Modal	Profit margin / Cost recovery	Ket.
1.	97.297.787.284,37	90.715.700.339,00	107,25%	2020
2.	119.265.126.434,66	90.949.648.891,00	131,13%	2021
3.	107.429.715.912,58	106.363.167.891,72	101,00 %	2022
4.	85.702.649.872,92	89.188.439.374,00	96,09%	2023

Dari data tersebut diatas, dapat disimpulkan *Cost recovery* rumah sakit sudah lebih dari 96,09 %. Hal Ini menunjukkan pendapatan rumah sakit secara operasional kurang mampu membiayai kegiatannya diluar belanja modal.

Perkembangan tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit, indikator ini menggambarkan kemampuan Rumah Sakit untuk membiayai seluruh pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun investasi dengan dana yang bersumber dari pendapatan rumah sakit sendiri.

Tabel. 4
Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit
RSUD Kabupaten Karangasem

No	Pendapatan Fungsional	Total Belanja (APBD + APBN)	Tingkat Kemandirian	Ket.
1.	97.297.787.284,37	127.279.134.334,54	76,44 %	2020
2.	119.265.126.434,66	132.130.224.662	90,26%	2021
3.	107.429.715.912,58	147.954.895.752,72	72,61%	2022
4.	85.702.649.872,92	125.479.952.582,64	68,29%	2023

Untuk tingkat kemandirian keuangan RSUD Kabupaten Karangasem tahun 2023 mencapai 68,29 % dari target RENSTRA yang ditetapkan sebesar 80,00 %, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

Untuk tingkat kepuasan pasien tahun 2022 terhadap pelayanan secara keseluruhan sudah mencapai 87,40% dari target 84%. Hal ini mengalami kestabilan dari tahun sebelumnya, ini berarti pencapaian tingkat kepuasan pasien sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD

Sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, maka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah RSUD Kabupaten Karangasem melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan tingkat rujukan. Tugas RSUD Kabupaten Karangasem adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib tersebut, RSUD Kabupaten Karangasem mempunyai fungsi :

1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.
2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3) Penyelenggaaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatn.
4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standard pelayanan rumah sakit.
5) Sebagai pusat pelayanan unggulan Trauma Centre peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja.

Terkait dengan upaya mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Karangasem tersebut di atas, maka ada beberapa isu penting yang perlu diperhatikan baik oleh jajaran manajemen dan fungsional RSUD Kabupaten Karangasem maupun oleh pihak *stakeholder* lainnya yaitu :

1) Masih perlunya penambahan sarana dan prasaran pelayanan, terutama pembangunan gedung pelayanan dan pengadaan alat kesehatan untuk pengembangan jenis pelayanan;
2) Diperlukan upaya pemeliharaan fasilitas pelayanan yang sudah ada secara berkesinambungan;
3) Masih sangat diperlukan penambahan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis tertentu, tenaga paramedis dan tenaga yang ahli dibidang akuntansi rumah sakit;
4) Pengelolaan administrasi dan keuangan rumah sakit yang tertib dan akuntabel masih diperlukan peningkatan agar penerapan PPK BLUD di RSUD Kabupaten Karangasem lebih optimal;
5) Perlunya peningkatan kapasitas SDM yang sudah ada melalui diklat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi sesuai perkembangan iptek kesehatan terkini;
6) Perlunya pengembangan, penerapan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap standar pelayanan berdasarkan ketentuan akreditasi rumah sakit.;
7) Pengelolaan bahan-bahan logistik pelayanan sehari-hari seperti obat-obatan, bahan habis pakai, bahan makanan, bahan bakar, gas medis, bahan cetakan dan alat tulis kantor masih perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan lebih efisien.
8) Sistem pengelolaan pegawai RSUD Kabupaten Karangasem masih perlu ditingkatkan lagi agar pegawai menjadi lebih tertib, disiplin, mempunyai etos kerja yang tinggi dan lebih sejahtera;
9) Upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang standar prosedur dan tatacara memperoleh pelayanan di RSUD Karangasem masih perlu diitingkatkan agar terjadi

persamaan persepsi tentang mutu pelayanan antara pemberi pelayanan dengan pengguna layanan (pasien dan keluarga);

10) Pengolahan Limbah Medis yang komprehenship agar tidak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Perubahan Anggaran/Rencana Bisnis Anggaran (RKA/RBA BLUD RSUD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan akan menjadi bagian dari RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 mengacu pada target kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMN, Renstra BLUD RSUD Karangasem dan isu-isu penting yang dihadapi RSUD Kabupaten Karangasem dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Oleh karena itu, maka perhitungan anggaran belanja pada penyusunan RKA/RBA BLUD RSUD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 diprioritaskan untuk:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga menjadi berkualitas, terstandar dan terjangkau. sejahterakan karyawan melalui pembayaran gaji dan insentif dari jasa pelayanan secara tepat waktu;
2. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Karangasem.
3. Mengoptimalkan dukungan administrasi perkantoran;
4. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur;
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal.
6. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan melalui akreditasi rumah sakit;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui rapat rutin Dewan Pengawas BLUD;
8. Menyusun dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kegiatan dengan akurat dan tepat waktu;

9. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan berupa alat-alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, gas medis, bahan laboratorium, bahan makanan, dan bahan logistik lainnya yang memadai dan kualitas dan kuantitasnya;
10. Merehabilitasi gedung rawat inap dan fasilitas pendukungnya agar menjadi layak pakai dan mengakomodir kebutuhan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan;
11. Mengkalibrasi dan memelihara secara rutin/berkala terhadap alat-alat kesehatan, alat-alat kantor dan perlengkapan kantor lainnya untuk menjamin peralatan selalu siap pakai;
12. Melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap kualitas air, limbah cair dan padat, serta melaksanakan promosi kesehatan di lingkungan rumah sakit;
13. Melaksanakan promosi kesehatan di luar rumah sakit dengan menjadi peserta pada penyelenggaraan pameran pembangunan/pawai pembangunan Kabupaten Karangasem;
14. Menyelenggaran rujukan pasien dan rujukan tenaga ahli (spesialis) untuk mengantisipasi keterbatasan kemampuan layanan dan kemapuan sumberdaya di RSUD Karangasem.
15. Meyediakan gedung rawat inap, untuk melayani pasien yang memerlukan rawat inap.

TABEL 5. T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Karangasem

Nama Perangkat Daerah : RSUD Kabupaten Karangasem

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Karangasem	Jumlah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100%	4.626.545	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Karangasem	Jumlah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100%	4.626.545	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD Karangasem	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	100%	321.900.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD Karangasem	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	100%	321.900.000	
3	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Karangasem	Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD	84%	73.136.275.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Karangasem	Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD	84%	95.609.003.793	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Karangasem	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	100%	1.500.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Karangasem	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	100%	1.500.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program kegiatan atau aspirasi dari masyarakat yang muncul dan disampaikan pada saat penyelenggaran Musrenbang Kabupaten Tahun 2024 terkait dengan Perubahan Rencana Kerja BLUD RSUD Karangasem Tahun 2024 pada dasarnya dapat disimpulkan menjadi tiga usulan yang mendasar yaitu :

1. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan juga di puskesmas di seluruh kecamatan harus terus-menerus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan dibidang kesehatan yang lebih layak dan optimal.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem, terkait dengan sarana dan perasarana kesehatan juga harus ditingkatkan agar pemanfaatannya lebih maksimal. Di bidang pelayanan agar lebih ditingkatkan karena banyaknya keluhan masyarakat yang berobat ke RSUD Kabupaten Karangasem. Serta melengkapi sarana dan prasarana khususnya tenaga medis dokter spesialis.

Terhadap kedua usulan/aspirasi masyarakat tersebut, kemudian dilaksanakan penelaahan dan pengkajian untuk dicari akar penyebab serta ditentukan solusinya, sehingga dapat dituangkan dalam perencanaan program dan kegiatan BLUD RSUD Karangasem Tahun Anggaran 2024. Hasil penelahaan dan pengkajian usulan/aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Umum Kabupaten Karangasem dibidang pelayanan agar lebih ditingkatkan karena banyaknya keluhan masyarakat yang berobat ke RSUD. Serta melengkapi Sumber Daya Manusia (dokter spesialis), Sarana dan Prasarana terutama alat-alat kesehatan.
2. Untuk pemenuhan sumber daya manusia jangka panjang diusulkan melalui formasi ASN (PNS dan PPPK) dan untuk jangka pendek melalui sistem kontrak yang anggarannya dari BLUD RSUD Karangasem, Untuk gedung pelayanan diusulkan lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK Provinsi).
3. Untuk pemenuhan alat-alat kesehatan jangka pendek sudah melakukan KSO. Disamping itu sudah diusulkan lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan yang sudah disetujui, namun pengadaannya sampai saat belum terlaksana

karena Perpres Juknis baru terbit akhir bulan April 2024 dan masih dalam proses persiapan dokumen.

4. Pemanfaatan teknologi informasi kesehatan untuk mewujudkan pelayanan yang efisien dan efektif.
5. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penjaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat (UHC), utamanya pasien-pasien tidak mampu.

---------oOo---------

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD KAB. KARANGASEM

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategi

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, RSUD Kabupaten Karangasem akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan strategis RSUD Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Adapun Visi RSUD Karangasem yaitu " ***Terwujudnya Rumah Sakit Umum Karangasem Prakerthi Nadi Menuju Pelayanan Prima"***

Misi I : " Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Yang Prima dengan SDM Yang Profesional Dan Sarana Prasarana Yang Optimal"

Tujuan :

1.Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat Karangasem.

Sasaran :

1. Menurunnya Jumlah Rujukan, Angka Kesakitan dan Angka Kematian.

Misi II : " Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Yang Terstandarisasi"

Tujuan :

1. **Meningkatnya Indek Kepuasan Pasien.**

Sasaran :

1. **Meningkatnya jenis dan kualitas Pelayanan RSUD Kabupaten Karangasem sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit.**

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke–5 (2021–2025), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh

Kembang, optimal kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.

Salah satu strategi kebijakan nasional yang ditetapkan pemerintah (Kementerian Kesehatan RI) adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif. Fokus kebijakan yang diambil untuk penjabaran strategi ini salah satunya adalah ; meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standard bertaraf internasional dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik fisik maupun ketenagaan.

Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional tersebut di atas dan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka RSUD Kabupaten Karangasem berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.

Tabel. 6 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem Dengan Tugas-Tugas Pelayanan RSUD Kabupaten Karangasem

Visi: Terwujudnya Karangasem Yang Pradnyan, Kertha, Santi Dan Nadi (Karangasem Prakerti Nadi)
Misi : Mengembangkan SDM yang handal, berdaya saing tinggi dan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil dan berkualitas

	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Kondisi Akhr	Program/kegiatan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
1.	Megembangkan SDM yang handal, berdaya saing tinggi, dan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil dan berkualitas.	Meningkatnya Indek Kepuasan Pasien	Meningkatnya jenis dan kualitas Pelayanan RSUD Kabupaten sesuai dengan Standar	1. Pengangkatan Tenaga Medis dan Paramedis untuk ditugaskan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap dan RSUD yang tetap disesuaikan dengan Kebutuhan.	Indeks Kepuasan Pasien	84 %	90 %	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan rumah sakit yang terakreditasi	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Karangasem	2. Peningkatan Sarana, Prasarana, dan alat Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, dan RSUD	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	86 %	90 %	2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	RSUD

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis tersebut di atas, maka ditetapkan arah kebijakan yang dilaksanakan melalui program – program dan kegiatan. Keterkaitan antara kebijakan dengan program kerja yang akan dilaksanakan setiap tahun pada BLUD RSUD Karangasem adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 7.
Keterkaitan Kebijakan dengan Program-Program
Pada RSUD Kab. Karangasem

KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM
Pengangkatan Tenaga Medis dan Paramedis untuk ditugaskan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap dan RSUD yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan.	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas, puskesmas rawat inap dan RSUD.	2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Realisasi masing-masing program kemudian dijabarkan pada satu atau beberapa kegiatan. Nama Program dan Kegiatan yang dilaksanakan RSUD Kabupaten Karangasem mengacu pada nomenklatur sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

yang dilaksanakan BLUD RSUD Karangasem pada Tahun Anggaran Perubahan 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8 T.C-33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Karangasem – Provinsi Bali

Nama Perangkat Daerah : RSUD Karangasem

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Sebelum Perubahan	Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)				
								Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR**							
1	02				**Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan**							
1	02	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daaerah**	Persentase Terselenggaranya Pelayanan dan kinerja Aparatur Sipil Negara	73.458.175.000	RSUD	100 %	95.930.530.338	BLUD	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Meningkatnya Pelayanan BLUD RSUD Karangasem			84%			
1	02	01	2.10	01	**Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	Jumlah Kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap.	73.136.275.000	RSUD	100.000 kunjungan	95.609.003.793	BLUD	
1	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang memperoleh gajidan tunjangan						
1	02	01	2.02	01	**Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN**	Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima oleh ASN	4.626.545	RSUD	518 orang	4.626.545	APB	
1	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pencapaian standard pelayanan minimum rumah sakit						

1	02	01	2.05	02	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan yang diadakan	321.900.000	RSUD	1073 paket	321.900.000	BLUD	
1	02	02			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat**	**1.500.000.000**	**RSUD**	**4 unit**	**1.500.000.000**	**APBD**	
1	02	02	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan						
						Belanja modal alat kedokteran bedah	1.500.000.000	RSUD	4 unit	1.500.000.000	APBD	
JUMLAH							**74.958.175.000**	**RSUD**	**100%**	**97.435.530.338**		

Dari tabel diatas pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan anggaran induk sebesar Rp. 4.626.545,00 tetap Rp. 4.626.54,00 pada anggaran perubahan 2024. Untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD anggaran induk sebesar Rp. 73.136.275.000 menjadi Rp. 95.609.003.793.Untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya anggaran tetap pada nilai Rp. 321.900 000. Dan Untuk kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota anggaran tetap pada nilai Rp. 1.500.000.000.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program RSUD Kabupaten Karangasem merupakan UPTD dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang sudah berlaku yaitu Permendagri 79 tahun 2018 dan seterusnya nomenklatur program dan kegiatan yang direncanakan dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Karangasem yang dibiayai dari dana pendapatan operasional BLUD dan Surplus BLUD akan ditampung dalam satu program, satu kegiatan dan satu sub kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Untuk Program dan kegiatan yang akan diusulkan anggarannya dari sumber lain seperti APBD Kabupaten, DAK, BKK Propinsi maupun APBN tetap menggunakan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021.

Usulan program kegiatan disampaikan terkait dengan Perubahan Rencana Kerja BLUD RSUD Karangasem Tahun 2024 beserta rincian pendanaannya. Disimpulkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah
Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Pagu indikatif (jutaan rupiah)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daaerah**	**Persentase Terselenggaranya Pelayanan dan kinerja Aparatur**		95.930,53

		Sipil Negara		
	Kegiatan:Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah ASN yang menerima gaji beserta tunjangan	100%	4,62
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah ASN Di RSUD Kab.Karangasem yang menerima gaji beserta tunjangan	100%	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pencapaian standard pelayanan minimum rumah sakit	100%	321,90
	Sub.Kegiatan :Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan yang diadakan	100%	
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Pelayanan BLUD RSUD Karangasem	84%	95.609,00
	Sub. Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap.	100.000 kunjungan	
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat**		**1.500,00**

	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100%	1.500,00
		Belanja modal alat kedokteran bedah	4 unit	
			Jumlah	**97.435,53**

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan guna mencapai tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Karena RSUD Kabupaten Karangasem sudah berstatus PPK BLUD, maka khusus untuk program dan kegiatan RSUD Kabupaten Karangasem yang akan didanai dari sumber dana pendapatan operasional BLUD dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) BLUD 2023, perencanaan alokasi pagu dana indikatifnya didasarkan atas perkiraan pendapatan operasional yang akan dicapai.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja (Rencana Kinerja) BLUD RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun sebagaimana amanat dari Undang-undang Perencanaan Nasional serta peraturan perundangan lainnya yang terkait.

Melalui penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) BLUD RSUD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024, diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BLUD RSUD Kabupaten Karangasem Tahun 2024, sehingga pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2024 dapat berjalan dengan efektif dan efisien yang berimplikasi pada tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Amlapura, 10 Agustus 2024

Direktur RSUD Kabupaten Karangasem,

dr. I Gede Yuliasena, M.M

NIP. 19790730 200504 1 011

2024

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM



(0363) 21007

www.karangasemkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan memperhatikan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini disamping untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang dampak dan manfaat program/kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah bagi masyarakat.

Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta bertanggungjawab.

Amlapura, 27 Agustus 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Karangasem

Ir. I Ketut Sedana Merta,ST.,MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19670120 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 3

BAB I

PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II 10

2.2. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah . 11

BAB III

RENCANA KERJA PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 14

3.1. Tujuan dan Sasaran 14

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 14

3.3. Program dan Kegiatan 15

BAB IV

P E N U T U P 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem untuk menyesuaikan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem sesuai Arah Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang belum bisa terakomodir secara maksimal di Renja Tahun 2024. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada hirarki yang lebih rendah, Renstra Pemerintah Daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 Tahun (RPJPD), Jangka menengah 5 tahun (RPJMD) serta jangka Pendek 1 tahun (RKPD).

Lebih lanjut setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah salah satunya dokumen perencanaan pembangunan Daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Pagu Indikatif serta mengacu kepada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai Organisasi Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Sekreatriat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan rancangan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing bagian di Lingkungan Sekretariat

Daerah Kabupaten Karangasem dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah dan mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintahan Daerah mengingat:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat adanya perubahan yang diperlukan untuk senantiasa mendukung arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem maka dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus disesuaikan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem

Rencana Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabuapten Karangasem Tahun 2024 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II RKPD Tahun berkenan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (Output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan perkiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan visi dalam melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabuapten Karangasem Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan Hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten KarangasemTahun 2024.
19. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 600 /HK/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanan program/kegiatan Tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.

Sedangkan tujuan disusun Rencana Kerja adalah:

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem yang di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun serta menjamin kesesuaian perubahan anggaran untuk mendukung arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaanya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, Sistematika Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabuapten Karangasem Tahun 2023 terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II.
2.2. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran.
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem adalah Penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegitan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD, Kinerja sendiri merupakan keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Evaluasi Renja triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem lebih mengacu pada data Realisasi Fisik dan Keuangan sampai dengan Triwulan II. Secara umum terkait fisik kegiatan berjalan sesuai jadwal masing-masing bagian, meskipun belum semua bagian mencapai realisasi fisik sesuai dengan target terutama untuk kegiatan yang bersifat fisik dan belanja modal karena diadakan penundaan sementara waktu. Selain itu juga karena adanya rencana efisiensi anggaran. Dilihat dari segi realisasi keuangan masih dibawah target yang seharusnya tercapai. Selain adanya rencana efisiensi anggaran, hal ini disebabkan karena keterlambatan dari pengamprahan masing-masing belanja, verifikasi yang berjenjang menyebabkan lambatnya SPJ yang maju ke Keuangan. Data Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II terlampir dalam Tabel 2.1 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabuapten Karangasem Tahun 2024.

Adapun capaian kinerja masing-masing bagian baik fisik maupun keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Nama Bagian	Pagu Anggaran (Induk)	Pagu Anggaran (Perubahan)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14.699.108.128,00	14.003.037.221,00	3.253.641.944,00	49,00%
2	Bagian Hukum	1.029.427.190,00	1.139.427.190,00	301.246.025,00	71,00%
3	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	901.345.928,00	956.345.928,00	131.571.100,00	29,00%
4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	480.918.680,00	625.886.680,00	164.125.460,00	41,00%
5	Bagian Organisasi	530.493.600,00	530.493.600,00	158.631.200,00	29.9%
6	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.374.343.252,00	4.075.351.152,00	991.070.050,00	43,19%
7	Bagian Umum	33.434.072.230,00	37.303.047.434,00	12.904.059.108,00	39,00%
		54.449.709.008,00	58.633.589.205,00	17.904.344.887,00	45,37%

2.2. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Belum optimalnya penyusunan SOP di masing-masing SKPD;
3. Belum tercapainya capaian monitoring centre for prevention(MCP) KPK
4. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Skor hasil evaluasi LPPD Kabupaten Karangasem masih kategori sedang
5. Belum terpenuhinya jumlah dan kapasitas aparat yang memenuhi tuntutan tugas dan sesuai dengan beban kerja;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

- ***Bagian Hukum***
  1. Substansi dan legal drafting rancangan Produk Hukum Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah masih belum sesuai/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
  2. Banyak Peraturan Perundang-undangan yang belum ditindaklanjuti turunannya atau peraturan pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah
  3. Banyak Perangkat Daerah belum mengetahui apabila telah ada peraturan perundang-undangan yang terbaru sehingga menimbulkan

keterlambatan dalam menindaklanjuti Peraturan tersebut

4. Sedikitnya Lembaga Bantuan Hukum yang mempunyai legalitas hukum dan terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
5. Rendahnya pemahaman Masyarakat terhadap bantuan hukum yang diberikan Pemerintah kepada Masyarakat miskin
6. Belum banyak masyarakat memanfaatkan Website JDIH yang memuat tentang produk - produk hukum Daerah yang perlu diketahui
7. Belum maksimalnya PD menyetorkan Arsip Produk hukum yang telah di tanda tangani untuk di aploud dalam Website JDIH sebagai dalam Pendokumentasian secara digital.

- ***Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat***

1. Tingginya intensitas pelaksanaan upacara yadnya di masyarakat (sehingga membutuhkan bantuan / intervensi dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang melaksanakan upacara yadnya)
2. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem, sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah sesuai tupoksi, dalam hal ini bagian Pemkesra melaksanakan sosialisasi kemiskinan kultural dengan sasaran masyarakat kurang mampu)
3. Rendahnya IPM Kabupaten Karangasem, rendahnya IPM Kabupaten Karangasen menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Karangasem bekerjasama dengan Politeknik Negeri Bali menyelenggarakan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) di Kabupaten Karangasem
4. Banyaknya instansi / pihak pemerintah yang mengajukan kerjasama dengan Pemkab Karangasen sehingga TKKSD lebih selektif memfasilitasi untuk meminimalkan kerjasama yang tidak ada tindak lanjutnya
5. Belum maksimalnya koordinasi terkait kegiatan dibidang sosial dan budaya;
6. Belum optimalnya pemetaan potensi daerah yang dapat dikerjasamakan, baik kerjasama daerah dalam negeri maupun luar negeri;
7. Belum optimalnya penetapan dan penegasan batas wilayah dalam daerah (desa,kelurahan,kecamatan);
8. Belum optimalnya penamaan unsur-unsur rupabumi/topomini.

➢ ***Bagian Perekonomian dan Pembangunan***

1. Kurangnya sumber air baku yang bisa diolah oleh PDAM sehingga cakupan pelayanan PDAM belum mencapai target Nasional 100% Air Minum;
2. Belum Optimalnya pelaksanaan monitoring dan pendataan terhadap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan mengingat cakupan luas wilayah galian C yang tersebar dibeberapa kawasan;
3. Pertumbuhan usaha pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern yang semakin meningkat perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha. Untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro kecil dan menengah koperasi yang telah ada;
4. Masih ada pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal dan bestek;
5. Masih ditemukan adanya kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal perencanaan yang menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan anggaran kas. Oleh karena itu, pada laporan realisasi fisik keuangan, terlihat adanya *idle money*;
6. Satuan Target kinerja setiap kegiatan belum terukur/akuntabel;
7. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah;
8. Masih lemahnya kapasitas SDM dalam bidang manajemen kinerja seperti metode pengarsipan, pengumpulan, pendokumentasi,pemanfaatan teknologi dan evaluasi data sehingga pengumpulan data seringkali mengalami kendala ketidaklengkapan dokumen;
9. Penyampaian data seringkali tidak tepat waktu.

➢ ***Bagian Pengadaan Barang dan Jasa***

1. Minimnya kapasitas dan kompetensi SDM serta terbitnya peraturan-peraturan baru terkait barang/jasa, menyebabkan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa perlu melakukan bimbingan teknis/diklat/sosialisasi peraturan terkait pengadaan barang/jasa secara berkala;
2. Belum Optimal Terpenuhinya 17 Standar LPSE;

3. Distribusi dan komposisi SDM belum proporsional, sehingga cenderung mempengaruhi efektifitas pelayanan barang/Jasa;
4. Kurangnya Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ABK.

- ***Bagian Organisasi***
  1. Strategi RB belum terintegerasi dan Cross cutting antar PD belum terbangun dengan baik
  2. Komitmen pimpinan dalam mengawal pelaksanan RB (monev berkala) belum optimal
  3. Perencanaan dan pelaksanaan program RB belum didukung dengan penganggaran dan tim kerja yg memadai
  4. Sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah belum sinkron/harmonis
  5. Dokumen perencanaan yg belum sepenuhnya selaras/harmonis dari jenjang teratas hingga terbawah
  6. Dokumen pedoman perencanaan dan evaluasi SAKIP belum tersusun
  7. Peningkatan Kualitas Layanan Publik saat ini belum cepat, transparan, responsif, informatif, accesible, koordinatif
  8. Penataan Tata Laksana dalam prakteknya masih terdapat beberapa Perangkat Derah yang belum memiliki Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
  9. Penerapan Sistem Kerja yang belum optimal
  10. Web-aplikasi e-SAKIP masih belum dimanfaatkan secara optimal karena adanya keterbatasan SDM dan fasilitasi yang memadai;
  11. Belum optimalnya kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik yang prima;
  12. Proses penataan kelembagaan belum maksimal dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  13. Analisa formasi jabatan pada masing-masing SKPD tidak maksimal dilaksanakan;
  14. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah hendaknya didasarkan terhadap analisas kebutuhan organisasi dan mempertimbangkan prinsip-prinsip manajemen struktur Organisasi Perangkat Daerah memerlukan

revisi karena belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan internal maupun eksternal.

- ***Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan***
  1. Kegiatan pimpinan daerah belum secara maksimal mampu terpublikasikan dengan baik kepada masyarakat melalui media sosial
  2. Kegiatan pimpinan daerah belum secara maksimal mampu terpublikasikan dengan baik kepada masyarakat melalui media sosial

- ***Bagian Umum***
  1. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
  2. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
  3. Masih lemahnya kualitas SDM dalam pengorganisasian file-file maupun surat-surat dinas. Sangat dibutuhkan tenaga arsiparis yang handal demi terkelolanya tatanan arsip yang sistematis, efektif dan efisien;
  4. Belum optimalnya penataan arsip keuangan;
  5. Penatausahaan aset Setda belum maksimal;
  6. Keterbatasan ruang untuk menyimpanan dan pengelolaan arsip dan informasi menjadikan kendala yang membutuhkan solusi pemecahan;
  7. Belum melaksanakan digitalisasi arsip keuangan, sehingga arsip keuangan seluruh bagian di Lingkungan Setda menumpuk dari tahun ke tahun.

Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM yang belum optimal;
2. Kurang memadai sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja Aparatur;
3. Belum optimalnya kinerja perangkat daerah dalam memberikan
4. Belum optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5. Masih rendahnya kompetensi SDM di bidang pelayanan publik dan pengelolaan keuangan
6. Masih belum optimalnya penerapan disiplin.
7. Belum optimalnya publikasi, tindak lanjut kerja sama antar daerah, sosialisasi produk hukum pemerintah daerah, evaluasi, pembangunan daerah, dan terbatasnya tenaga fungsional,pengadaan

BAB III
RENCANA KERJA PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam melaksanakan bidang urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Karangasem ditunjang oleh Perangkat Daerah yang berada di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem. Dimana Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi manajemen sebagai unsur staffing bukan sebagai pelaksana teknis daerah yang mempunyai tujuan yang berpijak pada pencapaian misi, yang diawali dengan penyusunan perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, melalui pelaksanaan berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen untuk mencapai dan melaksanakannya dengan berpedoman pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ataupun kurun waktu 5 tahun kedepan. Titik utama sasaran adalah pelaksanaan, alokasi, dan distribusi pemanfaatan seluruh sumber daya dan kapabilitas organisasi yang mengarah pada hasil yang nyata.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Karangasem. Arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan kepada terwujudnya masyarakat Karangasem yang sejahtera dan berkeadilan berdasarkan budaya Bali. Untuk mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Sekretariat

Daerah Kabupaten Karangasem mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan yaitu : Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Akademik dan Dunia Usaha. Guna menjamin terwujudnya sasaran dan masing-masing misi yang telah ditetapkan, maka disusun arah kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program prioritas yang akan dicapai sesuai dengan fokus kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem disajikan sebagai berikut:

Visi		: Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Santi dan Nadi (Karangasem Prakerti Nadi)"		
Misi 3		: Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya secara Konferhensif dan Terintegrasi		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
11	Terwujudnya tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai - nilai Sad Kerthi	20 Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Karangasem berdasarkan nilai - nilai Sad Kerthi	Fasilitasi dan pemberian bantuan (subsidi) untuk pelaksanaan Upacara Pitra Yadnya: Ngaben Gotong - Royong	Memfasilitasi Upacara/Upakara Yadnya (termasuk atma kerti) di Kabupaten Karangasem dengan di dukungnya anggaran makan upacara/upakara bisa berjalan sesuai desa, kala patra
13	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem	21 Meningkatnya Investasi yang di Kabupaten Karangasem	Mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru	Pembangunan/pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah potensi wisata
		22 Meningkatkan daya saing ekonomi lokal	Mengembangkan pertokoan modern berbasis ekonomi lokal	Mengembangkan dan mengoptoimalkan serta menata pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
Misi 6		: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, serta pelayanan publik yang prima		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	37 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (GOOD governance)	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, dan dukungan peningkatan SDM yang profesional
				2. Peningkatan kualitas penatausahaan aset dan pelaporan keuangan
				3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan.
				4. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudnkan pelayanan publik yang prma

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimlementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan istrumen dari satu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan fisik secara kualitatif (Tolok Ukur) maupun kuantitatif (Target Kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk

pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau kegiatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi. Program Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Program dengan kegiatan berjumlah 19 (Sembilan Belas), 60 (Enam Puluh) Sub Kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif setelah perubahan untuk Tahun 2023 sebesar Rp.47.660.285.628,00 (Empat Puluh Tujuh Miliyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dimana pagu induk tahun 2024 sebesar Rp. 54.449.709.008,00 (Lima Puluh Empat Miliyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Delapan Rupiah) terjadi penambahan anggaran di perubahan menjadi Rp.57.051.355.597,00 (Lima Puluh Tujuh Miliyar Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). Penyajian tabel Renja Perubahan tahun 2024. Gambaran lengkap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel lampiran Rencana Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini.

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabuapten Karangasem Tahun 2024, sebagai acuan dalam perencananan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem dalam kurun waktu Tahun 2024, sehingga upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun dan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif artinya dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Dengan tersusunnya Rencana Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

Demikian Rencana Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini disusun, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki dokumen Renja dimasa mendatang.

Amlapura,27 Agustus 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Karangasem

Ir. I Ketut Sedana Merta,ST.,MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19670120 199703 1 003

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Karangasem

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Rencana Perubahan 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
							Volume	Satuan			Volume	Satuan			Volume	Satuan			
				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
01				SEKRETARIAT DAERAH					54.449.729.008				57.051.355.597				58.793.134.844		
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi Umum				37.338.909.082				41.908.891.186				43.397.799.860		
01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karangasem	100	%	72.535.224		100	%	61.500.224		100	%	105.000.000		
01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karangasem	9	Dokumen	36.267.612,00		9	Dokumen	36.267.612		9	Dokumen	55.000.000		
01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Karangasem	5	Laporan	36.267.612,00		5	Laporan	25.232.612		5	Laporan	50.000.000		
01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Karangasem	100	%	14.991.775.412		100	%	15.553.835.506		100	%	16.066.072.547		
01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karangasem	12	Orang/Bulan	14.841.080.464,00		12	Orang/Bulan	15.403.140.898		12	Orang/Bulan	15.861.072.547		
01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Karangasem	900	Dokumen	136.079.948,00		900	Dokumen	136.079.608		900	Dokumen	150.000.000		

01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Karangasem	7	Dokumen	14.615.000,00		7	Dokumen	14.615.000		7	Dokumen	55.000.000		
01	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**367.253.410**		**100**	**%**	**360.119.410**		**100**	**%**	**60.000.000**		
01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah perencanaan kebutuhan BMD	Dokumen	2	dokumen	8.480.000,00				4.906.000				30.000.000		
01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Karangasem	1	Laporan	358.773.410		1	Laporan	355.213.410		1	Laporan	30.000.000		
01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**7.978.940.645**		**100**	**%**	**8.384.627.645**		**100**	**%**	**8.193.160.119**		
01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	33	Paket	120.356.390		33	Paket	123.756.390		33	Paket	56.256.600		
01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	30	Paket	1.448.695.952		30	Paket	1.448.695.952		30	Paket	1.309.962.400		
01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	8	Paket	988.061.600,00		8	Paket	1.264.219.600		8	Paket	1.546.556.629		
01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	2	Paket	91.130.100,00		2	Paket	91.130.100		2	Paket	238.465.000		
01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Karangasem	2	Laporan	2.747.659.087,00		2	Laporan	2.760.989.087		2	Laporan	3.545.527.740		

01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karangasem	100	Laporan	2.547.738.516,00		100	Laporan	2.687.738.516		100	Laporan	1.446.391.750		
01	01	2.06	35	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Karangasem	8	Dokumen	35.299.000,00		8	Dokumen	8.098.000		8	Dokumen	50.000.000		
01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**127.572.412**		**100**	**%**	**1.211.865.612**		**100**	**%**	**656.883.800**		
01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	10	unit	10.000.000,00		10		340.000.000		10		72.750.000		
01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	20	unit	117.572.412,00		20		871.865.612		20		584.133.800		
01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**1.298.328.660**		**100**	**%**	**1.298.328.660**		**100**	**%**	**1.178.774.200**		
01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karangasem	2	Laporan	123.459.200		2	Laporan	123.459.200		2	Laporan	148.509.200		
01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	12	Laporan	987.000.000		12	Laporan	987.000.000		12	Laporan	864.000.000		
01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	1	Laporan	187.869.460		1	Laporan	187.869.460		1	Laporan	166.265.000		
01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**4.380.717.288**		**100**	**%**	**4.794.717.288**		**100**	**%**	**5.667.109.654**		

01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Karangasem	13	Unit	1.452.206.368		13	Unit	1.452.206.368		13	Unit	1.041.878.400		
01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Karangasem	39	Unit	1.373.566.648,00		39	Unit	1.373.566.648		39	Unit	2.305.950.864		
01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Karangasem	50	Unit	20.353.190,00		50	Unit	20.353.190		50	Unit	20.353.190		
01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	200	Unit	415.291.426,00		200	Unit	415.291.426		200	Unit	463.000.000		
01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Karangasem	28	Unit	1.119.299.656,00		28	Unit	1.533.299.656		28	Unit	1.835.927.200		
01	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Prosentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**2.629.379.454**		**100**	**%**	**4.050.482.364**		**100**	**%**	**4.806.784.064**		
01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Karangasem	12	Orang/Bulan	1.688.129.454,00		12	Orang/Bulan	3.087.782.364		12	Orang/Bulan	770.534.064		
01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	120	Paket	311.250.000,00		120	Paket	311.250.000		120	Paket	311.250.000		
01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Karangasem	2	Orang	30.000.000,00		2	Orang	30.000.000		2	Orang	75.000.000		

01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Karangasem	20	Orang/Bulan	600.000.000,00		20	Orang/Bulan	621.450.000		20	Orang/Bulan	3.650.000.000		
01	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Prosentase Terpenuhinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**1.587.569.725**		**100**	**%**	**1.587.569.725**		**100**	**%**	**1.364.041.000**		
01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	12	Paket	890.760.825,00		12	Paket	890.760.825		12	Paket	648.925.500		
01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	12	Paket	656.337.600,00		12	Paket	656.337.600		12	Paket	648.925.500		
01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	4	Paket	40.471.300,00		4	Paket	40.471.300		4	Paket	66.190.000		
01	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase efisiensi proses pelayanan birokrasi**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**530.493.600**		**100**	**%**	**530.493.600**		**100**	**%**	**1.000.500.000**		
01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Karangasem	2	Dokumen	145.936.500,00		2	Dokumen	145.936.500		2	Dokumen	225.000.000		
01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Karangasem	2	Laporan	115.253.500,00		2	Laporan	115.253.500		2	Laporan	200.000.000		
01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karangasem	1	Dokumen	106.021.200,00		1	Dokumen	106.021.200		1	Dokumen	215.500.000		
01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Karangasem	2	Dokumen	89.624.100,00		2	Dokumen	73.658.300		2	Dokumen	180.000.000		

01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Karangasem	1	Dokumen	73.658.300,00		1	Dokumen	89.624.100		1	Dokumen	180.000.000		
01	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Prosentase Terfasilitasinya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**3.374.343.252**		**100**	**%**	**4.075.351.152**		**100**	**%**	**4.299.474.476**		
01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kabupaten Karangasem	12	Laporan	878.634.388,00		12	Laporan	982.583.388		12	Laporan	1.196.800.000		
01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Karangasem	12	Laporan	1.784.714.244,00		12	Laporan	2.210.214.444		12	Laporan	2.202.879.856		
01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Karangasem	12	Laporan	710.994.620,00		12	Laporan	882.553.320		12	Laporan	899.794.620		
01	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase jumlah program pemerintah dan kesejahteraan rakyat**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**15.728.535.318**		**100**	**%**	**15.142.464.411**		**100**	**%**	**12.594.736.590**		
01	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**609.314.900**		**100**	**%**	**546.588.873**		**100**	**%**	**697.000.000**		
01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Karangasem	3	Dokumen	190.030.500		3	Dokumen	371.887.300		3	Dokumen	173.000.000		
01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Karangasem	1	Dokumen	325.716.300		1	Dokumen	84.966.300		1	Dokumen	158.000.000		
01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Karangasem	1	Dokumen	93.568.100		1	Dokumen	89.735.273		1	Dokumen	366.000.000		
01	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahtraan Rakyat yang Terfasilitasi**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**13.014.628.428**		**100**	**%**	**12.412.141.724**		**100**	**%**	**10.204.784.840**		
01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Karangasem	1	Dokumen	12.100.699.088		1	Dokumen	11.459.459.388		1	Dokumen	8.074.784.840		

01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kabupaten Karangasem	1	Dokumen	708.466.940		1	Dokumen	617.380.936		1	Dokumen	2.000.000.000		
01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kabupaten Karangasem	1	Dokumen	205.462.400		1	Dokumen	335.301.400		1	Dokumen	130.000.000		
01	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Optimalnya harmonisasi tata kelola produk Hukum daerah terhadap aturan yang berlaku**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**1.029.427.190**		**100**	**%**	**1.139.427.190**		**100**	**%**	**1.269.951.750**		
01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kabupaten Karangasem	550	Dokumen	443.833.700		550	Dokumen	512.633.700		550	Dokumen	375.047.550		
01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Karangasem	6	Kasus	420.423.390		6	Kasus	440.703.390		6	Kasus	603.857.800		

01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kabupaten Karangasem	550	Dokumen	165.170.100		550	Dokumen	186.090.100		550	Dokumen	291.046.400		
01	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Prosentase Terfasilitasinya Kerjasama Daerah**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**1.075.164.800**		**100**	**%**	**1.044.306.624**		**100**	**%**	**423.000.000**		
01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi KerjaSama Dalam Negeri	Kabupaten Karangasem	1	Dokumen	1.055.051.400		1	Dokumen	1.038.085.224		1	Dokumen	153.000.000		
01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi KerjaSama Luar Negeri	Kabupaten Karangasem	-	Dokumen			-	Dokumen			-	Dokumen	245.000.000		
01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kabupaten Karangasem	1	Dokumen	20.113.400		1	Dokumen	6.221.400		1	Dokumen	25.000.000		
01	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase fasilitasi investasi pemda pada BUMD**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**1.382.284.608**		**100**	**%**			**100**	**%**	**2.800.598.394**		
01	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Pertumbuhan Iklim Berbasis Pengembangan Sektor Ekonomi Mikro**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**313.443.576**		**100**	**%**	**365.778.076**		**100**	**%**	**600.000.000**		
01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Karangasem	2	Dokumen	177.896.788		2	Dokumen	216.753.288		2	Dokumen	250.000.000		
01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Karangasem	4	Laporan	72.965.588		4	Laporan	86.443.588		4	Laporan	200.000.000		
01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Karangasem	1	Dokumen	62.581.200		1	Dokumen	62.581.200		1	Dokumen	150.000.000		
01	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Optimalnya pengendalian kebijakan Pemerintah Bidang Pembangunan**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**478.025.564**		**100**	**%**	**480.671.064**		**100**	**%**	**1.004.231.714**		

01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kabupaten Karangasem	2	Dokumen	123.385.588		2	Dokumen	123.365.588		2	Dokumen	242.770.000		
01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Karangasem	2	Laporan	191.215.588		2	Laporan	135.311.188		2	Laporan	510.461.714		
01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Karangasem	12	Laporan	163.424.388		12	Laporan	221.994.288		12	Laporan	251.000.000		
01	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Percepatan Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**480.918.680**		**100**	**%**	**625.886.680**		**100**	**%**	**846.366.680**		
01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Karangasem	1	Dokumen	327.827.436		1	Dokumen	286.047.236		1	Dokumen	496.366.680		
01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Karangasem	2	Dokumen	47.841.000		2	Dokumen	60.901.000		2	Dokumen	150.000.000		
01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Karangasem	100	Orang	105.250.244		100	Orang	278.938.444		100	Orang	200.000.000		
01	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Pertumbuhan Iklim Investasi Berbasis Pengembangan potensi SDA**	**Kabupaten Karangasem**	**100**	**%**	**109.896.788**		**100**	**%**	**109.896.788**		**100**	**%**	**350.000.000**		
01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,Perdagangan, Perindustrian, KUKM,penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kabupaten Karangasem	-	Dokumen			4	Dokumen			4	Dokumen	30.000.000		

01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kabupaten Karangasem	2	Dokumen	60.331.200		2	Dokumen	60.331.200		2	Dokumen	200.000.000		
01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kabupaten Karangasem	2	Dokumen	49.565.588		2	Dokumen	49.565.588		2	Dokumen	120.000.000		

Sekretaris Daerah
Kabupaten Karangasem

Ir. I Ketut Sedana Merta, ST., MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670120 199703 1 003

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 600/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;

b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;
c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;
d. menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 600/HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem 2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum Sekretarist Daerah Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 3. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 4. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
6.	Kelompok Kerja Perekonomian dan Pembangunan	1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
7.	Kelompok Kerja Administrasi Umum	1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat
8.	Pengumpul dan Pengolah Data Perencanaan	1. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 3. Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

KABUPATEN KARANGASEM

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RENJA 2024 PERUBAHAN

bpkad.karangasemkab.go.id
bpkad.karangasemkab@gmail.com

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 604/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Karangasem;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem;
b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem;
c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem;
d. menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 604/HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem 2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Ketua	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Anggaran Daerah	1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 2. Ka.Sub.Bid Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 3. Ka.Sub.Bid Penyusunan dan Informasi Anggaran pada Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
6.	Kelompok Kerja Perbendaharaan Daerah	1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 2. Ka.Sub.Bid Pelayanan Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 3. Ka.Sub.Bid Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelola

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
7.	Kelompok Kerja Akuntansi dan Pelaporan	1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 2. Ka.Sub.Bid Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 3. Ka.Sub.Bid Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
8.	Kelompok Kerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 2. Ka.Sub.Bid Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 3. Ka.Sub.Bid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 4. Penata Laksana Barang pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
9.	Kelompok Kerja Pendapatan Daerah	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 3. Ka.Sub.Bid Pengembangan dan Pelayanan Pajak Daerah pada Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 4. Ka.Sub.Bid Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah pada Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		Karangasem 5. Ka.Sub.Bid Pendataan Pajak Daerah pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 6. Ka.Sub.Bid Penetapan Pajak Daerah pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 7. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perencanaan, Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
10.	Kelompok Kerja Sekretariat	1. Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan pada Sekretariat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 2. Perencana pada Sekretariat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 3. Analis Kebijakan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sanghyang Widhi Wasa, atas restu-Nya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem telah menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024. Penyusunan Renja ini merupakan Perubahan dokumen perencanaan berdasarkan atas perubahan asumsi – asumsi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan induk serta menselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode Tahun 2021 sd 2026, yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 sd 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2021-2026

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renstra ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, semoga dokumen Renja ini dapat menjadi tantangan dan motivasi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dalam mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju *good governance*, *clean government*, serta pencapaian pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Karangasem,

Drs. I Wayan Ardika, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 198903 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ---------- **i**

Daftar Isi ---------- **ii**

BAB I PENDAHULUAN ---------- **1**

1.1 Latar Belakang ---------- 1

1.2 Landasan Hukum ---------- 2

1.3 Maksud dan Tujuan ---------- 6

1.4 Sistematika Penulisan ---------- 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN 2023 ---------- **9**

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD th. 2023 Sampai TW II ---------- 9

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ---------- 91

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD ---------- **92**

3.1 Tujuan dan Sasaran ---------- 92

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan ---------- 92

3.3 Program dan Kegiatan ---------- 94

BAB IV PENUTUP **119**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana pembangunan tahun 2024 telah diimplementasikan 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Setelah mulai bangkitnya perekonomian dunia, nasional dan daerah pasca menurunnya tingkat penyebaran *Corona Viruss Deseasse (*COVID-19) tentunya berpengaruh juga terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil sebelumnya yang berfokus ke penanganan pandemi menjadi pemulihan ekonomi

Kondisi ini menyebabkan adanya perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Asumsi keuangan juga mengalami perubahan pada perkiraan penerimaan pendapatan Daerah

yang bersumber dari PAD dan DBH (dana bagi hasil). Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian anggaran yang diawali menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.

Selain itu pelaksanaan perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga didasarkan adanya penyesuaian-penyesuaian sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II dan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 663)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024
29. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 604/ HK/ 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah

untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan, asset dan pendapatan daerah melalui perencanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024, serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 dan dipergunakan untuk menselaraskan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra BPKAD Tahun 2021-2026

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah :

a) Mewujudkan tertib sistem perencanaan pembangunan daerah.
b) Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan perangkat daerah dengan sistem perencanaan pembangunan di daerah.
c) Tercapainya pemanfaatan sumber daya yang efesien dan efektif dalam pembangunan daerah
d) Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program dan kegiatan Perubahan tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD sampai dengan Triwulan II

2.1.1 Capaian Sasaran Renja 2024

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BPKAD Tahun 2021 – 2026 yaitu meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan. Sasaran "Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah diukur dengan dua indikator kinerja yaitu Ketepatan waktu penyampaian dokumen RAPBD Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan sasaran "Peningkatan kualitas pelayanan publik" diukur dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Perangkat Daerah BPKAD Kab. Karangasem yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka target sasaran pada BKAD adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Sasaran	Indikator kinerja	Target 2024	Realisasi sampai TW III	Capaian (%)
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dokumen RAPBD	Tepat Waktu	-	50%
	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
Peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai indek kepuasan masyarakat (IKM)	83.00		-
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	9,30%		

Capaian sasaran Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Ketepatan waktu penyampaian dokumen RAPBD belum ada karena target dan realisasinya untuk semester II sehingga capaian sasaran tersebut baru mencapai 50%. Sedangkan capaian sasaran Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan indikator Nilai indek kepuasan masyarakat (IKM), juga sedang dilaksanakan survei kepuasan masyarakat sehingga capaian sasaran tersebut belum dapat diukur. Dan untuk sasaran Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah realisasinya juga belum bisa diukur karena menunggu tahun anggaran berakhir

2.1.2 Capaian Program dan kegiatan Renja 2024

Evaluasi terhadap Renja BPKAD Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sampai dengan triwulan II meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, Kegiatan dan sub kegiatan, pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta hasil rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPKAD Tahun 2021-2026. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2024 ini mengacu pada hasil laporan kinerja tahun 2023 sampai dengan triwulan II

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 secara umum target indikator kegiatannyanya sudah tercapai, namun ada beberapa target yang masih minim pencapaiannya namun sedand dalam proser pelaksanaan,

Sedangkan untuk Rencana Kerja Tahun 2024 yang masih berjalan saat ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan berusaha seoptimal mungkin mencapi target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/ Kota
Renja Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Karangasem
Periode Pelaksanaan: 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
		KEUANGAN								258,656,636,996		24,276,573,153		134,504,230,928						158,780,804,081		161,150,266,598			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Peningkatan Kualitas Pel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Kabupaten / Kota	500	%	107,620,570,538.00	0	0.00	100%	17,032,499,677	22.09	3,004,040,428	21.25	6,031,768,425					43.33	9,035,808,853	43.33	9,035,808,853	8.7%	8.40%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	60	Bulan	83,026,233,622.00	0	0.00	100%	15,125,127,882.00	22.50	2,833,451,278	18.61	5,786,834,682					41.11	8,620,285,959.71	41.11	8,620,285,959.71	68.5%	10.38%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya pembayaran gaji dan	500	%	82,433,033,322.00	0	0.00	100%	15,035,927,582	21.50	2,824,568,478	36.83	5,772,510,482					58.33	8,597,078,959.71	58.33	8,597,078,959.71	11.7%	10.43%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	ayanan Publik		tunjangan ,TPP, Insentif Pajak dan Retribusi																						
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase kelengkapan administrasi keuangan yang terverifikasi	500	%	349,596,800.00	0	0.00	100%	56,596,800	160.00	5,705,200	140.00	9,557,800					300.00	15,263,000.00	300.00	15,263,000.00	60%	4.37%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelaporan keuangan akhir tahun PD yang tepat waktu	500	%	243,603,500.00	0%	0.00	100%	32,603,500	30.00	3,177,600	5.00	4,766,400					35.00	7,944,000.00	35.00	7,944,000.00	7.0%	3.26%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksanaanya administrasi umum perangkat daerah**	**60**	**Bulan**	**5,637,518,180.00**	**0%**	**0.00**	**100%**	**523,168,180.00**	**16.66**	**26,243,240**	**21.40**	**61,472,840**					**38.06**	**87,716,080.00**	**38.06**	**87,716,080.00**	**63.4%**	**1.56%**		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase terpenuhinya fasilitas listrik dan penerang	500	%	130,950,000.00	0%	0.00	100%	10,000,000	33.00	0.00	7.00	0.00					40.00	0.00	40.00	0.00	8.0%	0.00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Bangunan Kantor	an gedung kantor																						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya peralatan kebutuhan peralatan rumah tangga	500	%	1,428,701,650.00	0%	0.00	100%	138,217,900	10.00	11,860,400	25.00	17,790,600					35.00	29,651,000.00	35.00	29,651,000.00	7.0%	2.08%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis ;Tersedianya bahan	500	%	2,289,791,530.00	0%	0.00	100% 100%	198,750,280	10.00	10,207,840	25.00	2,991,160					35.00	13,199,000.00	35.00	13,199,000.00	7.0%	0.58%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			dalam rangka perayaan hari-hari besar nasional dan daerah;Tersedianya belanja canang, bebanten dan piodalan						100%																
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan	500	%	492,626,250.00	0	0.00	100%	30,000,000	18.95	-	1.05	-					20.00	0.00	20.00	0.00	4.0%	0.00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			penggandaan																						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya bahan bacaan	500	%	297,836,250.00	0	0.00	100%	30,000,000	20.00	-	38.33	-					58.33	0.00	58.33	0.00	11.7%	0.00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah ; Terfasilitasinya	500	%	997,612,500.00	0	0.00	100%	116,200,000	8.00	4,175,000	32.00	40,691,080					40.00	44,866,080.00	40.00	44,866,080.00	8.0%	4.50%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah																						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksanaanya pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500	%	10,969,371,518.00	0	0.00	100%	315,007,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah tambahan sarana operasional kendaraan roda dua	2	Unit	660,000,000.00	0%	0.00		-									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebeleur yang diadakan	15	jenis	862,000,000.00	0%	0.00		32,000,000									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang diadakan	23	jenis	1,825,000,000.00	0%	0.00	3	260,000,000	0.00	0	0.00	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terbangun	2	Unit	7,379,363,918.00	0	0.00		-									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan kantor	11	jenis	243,007,600.00	0	0.00		23,007,600									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjan**	**500**	**%**	**2,871,899,650.00**	**0**	**0.00**	**100%**	**264,917,900.00**	**14.33**	**46,577,760**	**17.33**	**67,708,548**					**31.67**	**114,286,308.00**	**31.67**	**114,286,308.00**	**6.3%**	**3.98%**	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			g urusan pemerintahan daerah																						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase terpenuhinya pelayanan surat menyurat	500	%	117,176,650.00	0%	0.00	100%	1,989,900	5.00	0	0.00	222,700.00					5.00	222,700.00	5.00	222,700.00	1.0%	0.19%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase terpenuhinya pelayanan komunikasi sumber daya listrik dan air	500	%	1,956,570,000.00	0%	0.00	100%	170,000,000	20.00	32,089,760	30.00	45,753,848					50.00	77,843,608.00	50.00	77,843,608.00	10.0%	3.98%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersediannya tenaga pendukung administrasi	300	OB	798,153,000.00	0%	0.00	60 OB	92,928,000	18.00	14,488,000	22.00	21,732,000					40.00	36,220,000.00	40.00	36,220,000.00	13.3%	4.54%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah kondisi baik dan rusak ringan**	**500**	**%**	**4,649,362,218.00**	**0**	**0.00**	**100%**	**734,092,765.00**	**12.36**	**91,612,950**	**17.64**	**106,519,555**					**30.00**	**198,132,505.00**	**30.00**	**198,132,505.00**	**6.0%**	**4.26%**	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas operasional kondisi baik dan rusak ingan yang terpelihara	500	%	1,700,763,400.00	0%	0.00	100%	290,313,400	19.43	38,516,950	20.57	62,877,555					40.00	101,394,505.00	40.00	101,394,505.00	8.0%	5.96%		
		Pemeliharaan Mebel	persentase mebeleur yang terpelihara	500	%	161,092,500.00	0%	0	100%	15,000,000	0.00	0	0.00	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00%		
		Pemeliharaan Peralatan	persentase peralatan	500	%	1,308,178,000.00	0%	0.00	100%	217,428,000.00	15.00	30,130,400	25.00	9,193,600					40.00	39,324,000.00	40.00	39,324,000.00	8.0%	3.01%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		dan Mesin Lainnya	kantor yang terpelihara																						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	9	Unit	1,479,328,318.00	0	0.00	3 Paket 1 Paket	211,351,365.00	15.00	22,965,600	25.00	34,448,400					40.00	57,414,000.00	40.00	57,414,000.00	444.4%	3.88%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja**	**500**	**%**	**401,185,350.00**	**0%**	**0.00**	**100%**	**65,185,350.00**	**22.50**	**6,155,200**	**10.00**	**9,232,800**					**32.50**	**15,388,000.00**	**32.50**	**15,388,000.00**	**6.5%**	**3.84%**		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			yang tersedia																						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	500	%	202,465,350.00	0%	0.00	100%	33,465,350.00	15.00	3,077,600	15	4,616,400					30.00	7,694,000.00	30.00	7,694,000.00	6.0%	3.80%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Persentase laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD	500	%	198,720,000.00	0%	0.00	100%	31,720,000.00	30.00	3,077,600	5.00	4,616,400					35.00	7,694,000.00	35.00	7,694,000.00	7.0%	3.87%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Realisasi Kinerja SKPD	yang tepat waktu																						
Rata-rata capaian kinerja program (%)																			43.33 %	53.05%					
Predikat kinerja Program																			Sangat Rendah	Rendah					
2	Penigk	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	500	%	5,892,358,935	0 %	0.00	100 %	232,726,964,611.00	21.88	20,848,395,735		127,453,048,283		0		0	22	148,301,444,018	23	148,301,444,018	22.88	2516.84%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	atan		yang akuntabel																					
	Kualitas	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah**	**500**	**%**	**5,892,358,935.00**	**0%**	**0.00**	**100%**	**579,663,935.00**	**20.11**	**103,293,300.00**	**11.00**	**243,772,600.00**					**31.11**	**347,065,900.00**	**31.11**	**347,065,900.00**	**6.2%**	**5.89%**	
	Pengelolaa	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah buku PPAS yang tersedia;Jumlah buku rancangan KUA yang tersedia;	400	Buku	623,907,400.00	0%	0.00	80 buku 80 buku 80	59,727,400.00	15.00	5,840,000	30.00	6,395,500					45.00	12,235,500.00	45.00	12,235,500.00	11.3%	1.96%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	nKeuangan Daerah		Jumlah buku rancangan PPAS yang Tersedia; Prosentase tersediannya dokumen Jumlah buku KUA yang tersedia						80 buku																
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	Jumlah buku Perubahan KUA yang tersedia;Jumlah	400	Buku	609,879,400.00	0	0.00	80 buku 80 bu	45,699,400.00	100.00	0	100.00	-					20.00	0.00	20.00	0.00	5.0%	0.00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Perubahan PPAS	buku Perubahan PPAS yang tersedia;Jumlah buku rancangan Perubahan KUA yang tersedia;Jumlah buku rancangan Perubahan PPAS yang tersedia						ku 80 buku 80 buku																	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	JUMLAH VERIFIKASI RKA SKPD	205	skpd	344,262,600.00	0%	0.00	41 SKPD	15,157,600.00	15.00	0	20.00	0					35.00	0.00	35.00	0.00	17.1%	0.00%	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	JUMLAH VERIFIKASI PERUBAHAN RKA SKPD	205	skpd	344,262,600.00	0%	0.00	41 SKPD	15,157,600.00	15.00	0	5.00	0					20.00	0.00	20.00	0.00	9.8%	0.00%	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Verifikasi DPA-SKPD	260	Dokumen	510,122,300.00	0%	0.00	52 dokumen	39,972,300.00	0	0	0.00	71276200					0.00	71,276,200.00	0.00	71,276,200.00	0.0%	13.97%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	260	Dokumen	501,686,100.00	0%	0.00	52 dokumen	31,536,100	0	0	0.00	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	JUMLAH BUKU PERATURAN APBD YANG TERCETAK ;Jumlah Buku Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang	400 800 360 36	buku buku buku buku	1,156,602,206.00	0%	0.00	80 buku 160 buku 72 buku	169,287,206.00	60.00	49,453,300	100.00	4,506,400					70.00	53,959,700.00	70.00	53,959,700.00	0.00%	4.67%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			tercetak; JUMLAH BUKU RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD YANG TERCETAK; Jumlah Buku	0 400	buku				ku 72 buku 80 buku																	
			Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD yang																							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			tercetak; Jumlah Rancangan Nota Keuangan																					
		Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Buku Peraturan KDH	400	buku	1,167,972,329.00	0%	0.00	80 buku	133,642,329.00	36.00	48,000,000	4.00	161,594,500											
		Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tercetak;J	800 360	buku buku				160 buku										40.00	209,594,500.00	40.00	209,594,500.00	0.00%	17.95%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	umlah Buku Peraturan Perubahan APBD yang tercetak; Jumlah Buku Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD yang Tercetak; Jumlah Buku Rancangan	400	buku				72 buku 72 buku 80 buku																	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tercetak; Jumlah Rancangan Perubahan Nota Keuangan																						
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan	Dokumen Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah;	5	Buah	633,664,000.00	0%	0.00	1 buah 2 bu	69,484,000.00	30.00		20.00							50.00	0.00	50.00	0.00	1000.0%	0.00%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bidang Anggaran	Dokumen SIKD APBD dan Perubahan APBD; Dokumen sumber Pendanaan Anggaran ;Jumlah Regulasi yang tersusun ;Persentase Penataan Dokumen Bidang Anggaran						ah 2 buah 2 dokumen 100 %																		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang akuntabel	500	%	2,439,736,400.00	0%	0.00	100%	324,061,400.00	22.00	55,377,192.00	19.25	53,305,633.00					41.25	108,682,825.00	41.25	108,682,825.00	8.3%	4.45%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Kas Jumlah Dokumen SPD SKPD; Jumlah Dokumen SPD SKPD; Persentase peningkatan kualitas pelayanan kas daerah; Persentase SKPD dengan	2 50 0 10 0 10 0	dokumen dokumen % %	129,682,900.00	0 %	0.00	2 dokumen 50 0 dokumen 10 0 %	12,145,400	22.00	1,680,000	3.00	4,217,375					25.00	5,897,375.00	25.00	5,897,375.00	0.00 %	4.55%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyerapan Keuangan sesuai target																						
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Meningkatnya koordinasi yang efektif dengan dinas terkait;Persentase ketersediaan data dan informasi terkait	500	%	411,555,700.00	0	0.00	100% 100% 100%	58,943,200	22.00	9,338,014	13.00	6,889,686					35.00	16,227,700.00	35.00	16,227,700.00	7.00%	3.94%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Dana Transfer Lainnya	dana transfer; Persentase persyaratan dan pelaporan dana DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang terpenuhi; Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi pengenda						100% 100%																

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			lian dana transfer																						
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas	dokumen pengesahan BLUD dan data pengesahan pola SP3B;Dokumen pengesahan BLUD dan data	12 136 12 10	dokumen dokumen	1,089,749,500.00	0%	0.00	12 dokumen 136 dokumen	149,449,500	20.00	24,693,552	30.00	30,032,648						50.00	54,726,200.00	50.00	54,726,200.00	0.00%	5.02%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		SP2D dengan Instansi Terkait	pengesahan pola SP3B;Pemeliharaan dan pemuktahiran data gaji PNSD;persentase jumlah pengajuan SPM sesuai dengan ketentuan;Persentase penerbitan SP2D secara akurat	0 100 100 100	bulan % % %				men 12 bulan 100 % 100 % 10																	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			dan tepat waktu;Persentase SKPP yang diterbitkan atas permohonan pengajuan SKPP						0 %																
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen SK Pengelola Keuangan dan Peraturan Bupati terkait pengelolaan keuangan; Jumlah	10 41 100	dokumen PD %	808,748,300.00	0 %	0.00	10 dokumen 41 PD	103,523,300	24.000	19,665,626	31.00	12,165,924.00					55.00	31,831,550.00	55.00	31,831,550.00	0.00 %	3.94%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			pengelola keuangan PD yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan; Persentase penerbitan SP2D secara akurat dan tepat waktu ;Persentase peningkatan kualitas	100 100	% %				100% 100% 100%																		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			pelaksanaan anggaran secara keseluruhan;Tingkat pemenuhan pedoman peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah																						
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	Persentase terwujudnya laporan keuangan	500	%	1,817,546,106.00	0%	0.00	100%	255,562,275.00	18.13	17,115,600.00	18.11	75,852,950.00					18.13	92,968,550.00	19.13	92,968,550	19.13	5.12%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaporan Keuangan Daerah	**pemerintah daerah yang tepat waktu**																						
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Belanja Cetak Buku Data Perkembangan PAD; Belanja Cetak Buku Piutang Pajak Daerah	60 15	buah buah	444,432,154.00	0	0.00	60 buah 15 buah	62,490,900	10.00	4,855,200	23.45	17,851,350					33.45	22,706,550.00	33.45	22,706,550.00	0.0%	5.11%		
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	Jumlah Berita Acara dan lampiran Rekonsiliasi (Bank,	204	Dokumen	76,508,224.00	0	0.00	204 dokumen	10,757,700	8.00	0	22.00	5,581,950					30.00	5,581,950.00	30.00	5,581,950.00	0.0%	7.30%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Perangkat Daerah, SKPKD dan Pendapatan Pajak Daerah) yang terselesaikan; Presentase jurnal koreksi																						
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana	Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran Bulanan yang tercetak; Jumlah	32 80 10	buku buku	289,071,607.00	0	0.00	32 buku 80 buku	40,645,900	15.00	5,755,200	23.25	11,339,450					38.25	17,094,650.00	38.25	17,094,650.00	0.00%	5.91%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		an APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Buku Laporan Realisasi Anggaran Triwulan yang tercetak; Jumlah Buku Laporan Semesteran 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya yang tercetak		buku				10 buku																

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah buku Kebijakan Akuntansi yang tercetak;Jumlah Laporan Ikhtisar Kekayaan Desa yang tersusun;Jumlah Laporan Ikhtisar Realisasi APBD Desa tersusun;Jumlah Laporan Keuangan	60 3 3 2 13 2	buah buah buah buah dokumen buah	176,292,080.00	0	0.00	60 buah 3 buah 3 buah 2 dokumen 132	24,788,150	5.00	0	24.90	1,713,600					29.90	1,713,600.00	29.90	1,713,600.00	0.00%	0.97%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemda Semesteran yang tersusun; Jumlah Laporan Keuangan Pemda Tahunan yang tersusun						buah																

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tercetak; Jumlah Buku Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabara	120 130 60 65	buah buah buah buah	718,835,541.00	0	0.00	120 130 60 65	101,074,325	7.00	6,505,200	51.30	30,715,100					58.30	37,220,300.00	58.30	37,220,300.00	0.0%	5.18%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	n Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tercetak; Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun ; Jumlah Rancangan						buah																	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun																						
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK	Persentase Tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK	500	%	38,494,851.00	0	0.00	100%	5,412,700	0	0	0	-					0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang terpenuhi																						
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Analisis atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tercetak	24	Buku	52,392,312.00	0	0.00	24 buku	7,366,800	0	0	0	-							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi penyusunan LKPD	56	OPD	21,519,337.00	0	0.00	56 OPD	3,025,800	100	0	0	8,651,500					100.00	8,651,500.00	100.00	8,651,500.00	0.0%	40.20%		
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Terselenggaranya urusan kewenangan satuan kerja pengelolaan**	**60**	**Bulan**	**1,268,195,968,564.00**	**0**	**0.00**	**12 blsn**	**231,419,568,691.00**	**3.58**	**20,645,401,543**	**11.02**	**127,062,390,1000**					**14.60**	**147,707,791,643.43**	**14.60**	**147,707,791,643.43**	**24.3%**	**11.65%**		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			keuangan daerah																						
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase penyaluran bantuan keuangan	500	%	1,119,602,583,964.00	0%	0.00	100%	198,814,600,179	10.73	20,645,401,543	10.74	117,343,136,047					21.47	137,988,537,590.43	21.47	137,988,537,590.43	4.3%	12.32%	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya dana darurat	60	Bulan	57,357,864,490.00	0%	0.00	12 bulan	14,357,864,490	0	0	0	54,000.00					0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.0%	0.00%	
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran dana bagi hasil ke desa	500	%	91,235,520,110.00	0%	0.00	100%	18,247,104,022	0	0	22	9,719,200,053.00					22.32	9,719,200,053.00	22.32	9,719,200,053.00	4.5%	10.65%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terselenggaranya penerapan sistem informasi pada lingkup keuangan daerah	60	Bulan	1,495,351,985.00	0%	0.00	12 bulan	148,108,310	45.59	27,208,100.00	6.87	17,727,000.00					52.46	44,935,100.00	52.46	44,935,100.00	87.4%	3.00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase masa waktu pemeliharaan dan pengembangan website dalam setahun Jumlah jenis pajak daerah yang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak	500	%	1,495,351,985.00	0 %	0.00	100	148,108,310	45.59	27,208,100	6.87	17,727,000					52.46	44,935,100.00	52.46	44,935,100.00	10.5 %	3.00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			dalam memenuhi kewajiban perpajakanPersentase permohonan keringanan dan pengajuan keberatan dan banding yang ditangani Persentase jenis pajak yang																						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			pelayanannya diterapkan pada pelayanan terpaduJumlah bentuk publikasi dan sosialisasi perpajakan daerah kepada masyarakat (Media elektronik, billboard, tax gathering);																							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase pemeliharaan dan pengembangan aplikasi komputer pengelolaan pajak daerahPersentase jenis pajak daerah yang dimonitoring																							
Rata-rata capaian kinerja program (%)																			21.88%	63.72%						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja Program																			Sangat Rendah	Rendah					
3		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	**500**	**%**	**3,832,662,000.00**	**0%**	**0.00**	**100%**	**500,000,000.00**	**17.97**	**21,588,850**	**15.83**	**38,017,950**					**33.79**	**59,606,800**	**19**	**475,131,977.70**	**18.97**	12.40%	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi dalam	**205**	**OPD**	**3,832,662,000.00**	**0%**	**0.00**	**41 PD**	**500,000,000.00**	**17.97**	21,588,850	**15.83**	38,017,950					**33.79**	59,606,800	**19**	59,606,800	**18.97**	1.56%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			pengelolaan Barang Milik Daerah																						
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Informasi Tentang Standar Satuan Harga yang tersedia	250	buku	381,972,000.00	0%	0.00	50	65,000,000	8.78	4,904,850	6.84	4,139,150					15.62	9,044,000	**10**	9,044,000	**9.78**	2.37%	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Presentase Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi Penyusun	500 500	% %	171,092,500.00	0%	0.00	100	25,000,000	21.06	2,627,600	28.63	4,291,400					49.69	6,919,000	**22**	6,919,000	**22.06**	4.04%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			an Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Presentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan dan Perawatan Barang																						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Milik Daerah																						
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Presentase Prangkat Daerah/ Pengguna Barang yang Terdata Asetnya	500	%	288,487,500.00	0%	0.00	100	45,000,000	16.79	4,327,600	19.59	9,696,400					36.38	14,024,000	**18**	14,024,000	**17.79**	4.86%	
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah	500	%	214,790,000.00	0	0	100	20,000,000	27.77	0	0.00	-					27.77	0	**28**	-	**27.77**	0.00%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			yang terfasilitasi inventarisasi barang milik daerah																						
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Bidang Aset yang di Fasilitasi Pengamanan Fisik Jumlah Tanah aset Pemerintah Kabupaten Karangase	25375	bidang bidang	1,366,487,500.00	0%	0.00	5	250,000,000	3.87	3,623,600	2.04	2,508,700					5.91	6,132,300	5	6,132,300	4.87	0.45%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			m yang di Sertifikatkan																						
		Penilaian Barang Milik Daerah	Presentase Terfasilitasinya Perangkat Daerah atas Penilaian BMD dalam Rangka Pemindahtanganan dan Pemanfaatan	500	%	259,138,750.00	0%	0.00	100	40,000,000	22.47	3,027,600	25.70	4,541,400					48.17	7,569,000	**23**	7,569,000	**23.47**	2.92%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat daerah yang terfasilitasi data asetnya untuk digunakan, dimanfaatkan, dimusnahkan, dan dihapuskan	500	%	171,092,500.00	0%	0.00	100	25,000,000	19.24	3,077,600	24.77	4,616,400.00					44.01	7,694,000	20	7,694,000	20.24	4.50%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Optimalisasi Pengguna an, Pemanfaa tan, Pemindah tanangan, Pemusna han, dan Penghapu san Barang Milik Daerah	Presentase BMD yang dimanfaatkan Presentase BMD yang terfasilitasi dihapuskan dari catatan BMD Presentase BMD yang terfasilitasi untuk dimusnahkan Presentas	500 500 500 500	% % % %	737,962,500.00	0%	0.00	100	7,500,000	5.55	0	20.12	2,974,500.00					25.67	2,974,500	7	2,974,500	6.55	0.40%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			e perangkat Daerah yang terfasilitasi data asetnya untuk digunakan, dimanfaatkan, dimusnahkan dan dihapuskan Presentase Terfasilitasinya data aset																							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			untuk digunakan																						
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan rekonsilia	500	%	136,743,750.00	0%	0.00	100	15,000,000	54.12	0	8.46	4,690,000.00					62.58	4,690,000	55	4,690,000	55.12	3.43%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Milik Daerah	si laporan persediaan																						
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi laporan barang milik daerah	500	%	104,895,000.00	0%	0.00	100	7,500,000	0	0	22.13	560,000.00					22.13	560,000	1	560,000	1	0.53%	
Rata-rata capaian kinerja program (%)																			33.79%	11.92%					
Predikat kinerja Program																			Sangat Re	Sangat Rendah					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																			ndah						
4	Peningkatan Penerima	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase tingkat capaian target penerimaan pajak daerah	**500**	**%**	**30,584,822,023**	**0%**	**0.00**	**100%**	**8,397,172,708**	**28.358**	**402,548,140**	**20.11**	**981,396,270**					**48.47**	**1,383,944,410**	**29**	**3,337,881,748.96**	**29.36**	10.91%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	anPendapatanAsliDaerah																								

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang dikelola sebagai sumber pendapatan daerah	**50**	**Jenis**	30,584,822,023	**0%**	**0.00**	**10**	**8,397,172,708**	**28.358**	402,548,140	**20.11**	981,396,270					**48.47**	1,383,944,410	**29**	**3,337,881,749**	**29.36**	10.91%	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah tentang	5 100	buah %	1,410,340,750.00	0%	0.00	1	117,428,250	12.91	10,110,400	17.09	34,175,100					30.00	44,285,500.00	14	**77,644,648**	**13.91**	5.51%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pajak Daerah yang tersusun Persentase jenis pajak yang tersedia; Persentase jenis pajak yang tersedia standar operasional prosedurnya																							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah bentuk publikasi dan sosialisasi perpajakan daerah kepada masyarakat (Media elektronik, billboard, tax gathering); Jumlah jenis pajak yang diadakan penilaian wajib	3 3	3 3	870,652,872.00	0%	0.00	3	78,704,850	11.76	6,055,200	18.24	20,542,400					30.00	26,597,600.00	**13**	**70,216,849**	**12.76**	8.06%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			pajak teladan																						
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak yang dilakukan pendataan subjek dan objek pajak	35	Jenis	702,234,096.00	0%	0.00	100%	46,652,650	26.05	6,879,800	33.32	45,242,700					59.37	52,122,500	**27**	**113,710,749**	**27.05**	16.19%	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Persentase jenis pajak daerah yang terdata dalam	500	%	690,431,421.00	0	0.00	100%	37,965,150	37.88		16.31	7,819,000					54.19	7,819,000.00	**39**	**49,677,149**	**38.88**	7.20%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pajak Daerah	database wajib pajak daerah																						
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase terlaksananya updating data subjek dan objek pajak PBB-P2	500	%	741,781,285.00	0%	0.00	100%	41,693,800	25.38	6,645,200	24.62	9,748,800					50.00	16,394,000	**26**	**56,636,899**	**26.38**	7.64%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan; Persentase pajak terhutang yang diterbitkan ketetapannya	900.000 100	lembar %	1,834,590,868.00	0 %	0.00	180.000 lembar 100 %	152,573,108	58.57	8,148,540	11.43	69,018,560					70.00	77,167,100	60	192,064,639	59.57	10.47%		
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase jenis pajak yang pelayanannya diterapkan pada pelayanan	500	%	371,076,273.00	0 %	0.00	100 %	89,822,200	66.85	12,110,400	-0.85	21,927,600					66.00	34,038,000.00	68	45,803,400	67.85	12.34%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			terpaduJumlah bentuk publikasi dan sosialisasi perpajakan daerah kepada masyarakat (Media elektronik, billboard, tax gathering)																						
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan	Persentase pengajuan validasi pajak daerah	500	%	992,006,849.00																			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pajak Daerah	yang terlayani																						
		Penagihan Pajak Daerah	Persentase jenis pajak daerah yang terlaksananya tindak penagihannya; Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah	500	%	1,757,387,836.00	0%	0.00	100%	59,149,000	21.82	8,605,200	28.32	78,298,410					50.14	86,903,610	**23**	**78,945,349**	**22.82**	4.49%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase permohonan keringanan dan pengajuan keberatan dan banding yang ditangani Persentase jenis pajak yang pelayanannya diterapkan pada pelayanan	500	%	159,071,138.00	0%	0.00	100%	16,870,350	7.43	0	17.57	571,500					25.00	571,500.00	**8**	**3,045,600**	**8.43**	1.91%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			terpaduJumlah bentuk publikasi dan sosialisasi perpajakan daerah kepada masyarakat (Media elektronik, billboard, tax gathering)																						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanPersentase permohonan keringana	10 10 0	jenis %	21,055,248,635.00	0 %	0.00	2 jenis 100 %	7,751,421,850	14.93	343,993,400	35.07	694,052,200					50.00	1,038,045,600.00	16	2,643,421,547	15.93	12.55%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			n dan pengajuan keberatan dan banding yang ditangani Persentase jenis pajak yang pelayanannya diterapkan pada pelayanan terpaduJumlah bentuk publikasi dan																							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			sosialisasi perpajakan daerah kepada masyarakat (Media elektronik, billboard, tax gathering); Jumlah pos pengawasan MBLB yang terbangun; Persentase jenis pajak daerah																							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			yang dimonitoring																						
Rata-rata capaian kinerja program (%)																			48.4	16.48%					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																			7 %						
																			Sangat Rendah						
																			36.87 %	61.39 %					
																			Sa	Rendah					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang Dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12=(8)+(9)+(10)+(11)		13=6+12		14=13/5 x100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																			ngat Rendah						

2.2 Isu – Isu Penting Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil telaahan atas faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka ditetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

1. Sumber daya manusia yang ada belum memiliki kompetensi teknis yang cukup dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
2. Sarana dan prasarana pengelolaan keuangan, aset daerah maupun pendapatan daerah belum didukung dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.
3. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah belum sepenuhnya dapat diterapkan di Daerah dalam waktu cepat.
4. Sistem pengelolaan data dan informasi yang belum memadai sebagai dasar pengambilan keputusan.
5. Sumber daya manusia belum memiliki kompetensi teknis yang cukup dalam pelayanan prima
6. Belum tersedianya standar pelayanan yang memadai dalam upaya peningkatan pelayanan prima
7. Pengembangan pelayanan secara elektronik masih rendah

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem, maka berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, mendukung pelaksanaan Misi Nomor 6, yaitu *"Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima."* Pelaksanaan Misi tersebut pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah khususnya mendukung tercapainya :

Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima

Sasaran : 1.Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator untuk sasaran tersebut adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Ketepatan waktu penyampaian dokumen RAPBD

c. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

a. Persentase peningkatan pendapatan asli daerah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II, maka dilakukan penyesuaian strategi dan arah

kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Renja BPKAD Kab. Karangasem Tahun 2023, sebagai berikut :

Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi	Arah Kebijakan
Mendorong upaya pelaksanaan penganggaran yang berkualitas	Melaksanakan penyampaian RAPBD tepat waktu
Mendorong efektivitas dan optimalisasi penyerapan APBD	Mengoptimalkan penyerapan APBD sesuai Rencana Anggaran Kas
Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dan tepat waktu	Penyampaian dokumen LKPD yang tepat waktu
Meningkatkan pengamanan aset tanah Pemda	Meningkatkan upaya pensertifikatan tanah aset Pemda
Melaksanakan Penatausahaan BMD dengan tertib	Meningkatkan pengelolaan BMD mulai dari tingkat Pengguna BMD
Mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan pajak daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah
Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan	Mengikuti bimbingan teknis pengelolaan pajak daerah dan pelayanan

Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan lingkungan kerja yang nyaman dan disiplin dengan membuat sistem kerja yang	Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik

berorientasi pada output yang berkualitas;	
	Melaksanakan penataan fasilitas untuk menjaga kenyamanan dan kedisiplinan kerja
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Mendorong upaya keterbukaan informasi	Melaksanakan Keterbukaan Informasi

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (tujuan & sasaran). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem untuk Perubahan Tahun 2024 Program, kegiatan dan sub kegiatantannya tetap mengacu Permendagri 90 Tahun 2019 dan Renja 2024 dengan melaksanakan 4 Program dan 13 Kegiatan dan 63 sub kegiatan. Total pendanaan yang diperoleh berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 050/ 716/ PPE/ Bappelitbangda/ Setda, Tanggal 19 Juli 2024 perihal Pagu Belanja Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 296.310.115.921,-

Secara rinci perubahan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Rencana Perubahan Tahun 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN			100%	279.252.394.410	APBD		100%	296.310.155.921	17.057.761.511
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	Kab. Karangasem	100%	21.712.214.294,00	APBD	Sekretariat	100%	26.867.231.780,00	5.155.017.486,00
5	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi	Kab. Karangasem	100%	41.445.838,00	APBD	Sekretariat	100%	40.167.338	-1.278.500,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
					Perangkat Daerah	**kinerja yang tersedia**								
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Karangasem	6 dokumen	31.090.950,00	APBD	Sekretariat	6 dokumen	30.321.950	-769.000
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Karangasem	1 laporan	10.354.888,00	APBD	Sekretariat	1 laporan	9.845.388	-509.500
5	**02**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya administrasi keuangan**	**Kab. Karangasem**	**12 Bulan**	**19.613.766.352,00**	**APBD**	**Sekretariat**	**12 Bulan**	**24.195.899.859,00**	**4.582.133.507,00**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
						perangkat daerah								
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Karangasem	82 orang / bulan	19.545.625.602	APBD	Sekretariat	82 orang / bulan	24.128.154.009	4.582.528.407
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Karangasem	500 dokumen	40.628.950	APBD	Sekretariat	500 dokumen	40.628.950	-
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Karangasem	1 laporan	27.511.800	APBD	Sekretariat	1 laporan	27.116.900	- 394.900

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksanaya administrasi umum perangkat daerah**	**Kab. Karangasem**	**12 Bulan**	**698.514.840,00**	**APBD**	**Sekretariat**	**12 Bulan**	**793.543.019,00**	**95.028.179,00**
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Karangasem	1 paket	8.938.000	APBD	Sekretariat	1 paket	8.938.000	-
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Karangasem	3 paket	117.849.800	APBD	Sekretariat	3 paket	114.957.500	- 2.892.300
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Karangasem	6 paket	362.888.040	APBD	Sekretariat	6 paket	343.488.340	- 19.399.700
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Karangasem	2 paket	29.388.000	APBD	Sekretariat	2 paket	29.388.000	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Karangasem	250 dokumen	30.000.000	APBD	Sekretariat	250 dokumen	30.000.000	-
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Karangasem	12 laporan	149.451.000	APBD	Sekretariat	12 laporan	266.771.179	117.320.179
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksanaya pengadaan barang milik Daerah Penunang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**305.836.600,00**	**APBD**	**Sekretariat**	**100%**	**719.970.900,00**	**414.134.300,00**
5	02	01	2.06	01	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan dinas operasional	Kab. Karangasem		-			1 Unit	351.440.000	351.440.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
					Operasional atau Lapangan	atau lapangan yang disediakan								
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Karangasem	21 Unit	268.547.800	APBD	Sekretariat	20 Unit	270.283.900	1.736.100
5	02	01	2.06	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Karangasem	6 Unit	**37.288.800**	APBD	Sekretariat	12 Unit	98.247.000	60.958.200
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**286.577.900,00**	**APBD**	**Sekretariat**	**100%**	**286.577.900,00**	**0,00**
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Karangasem	12 laporan	1.989.900	APBD	Sekretariat	12 laporan	1.989.900	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Karangasem	12 laporan	191.660.000	APBD	Sekretariat	12 laporan	191.660.000	-
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Karangasem	12 laporan	92.928.000	APBD	Sekretariat	12 laporan	92.928.000	-
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah kondisi baik dan rusak ringan**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**766.072.764,00**	**APBD**	**Sekretariat**	**100%**	**831.072.764,00**	**65.000.000,00**
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	Kab. Karangasem	56 unit	316.967.850	APBD	Sekretariat	56 unit	346.967.850	30.000.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya								
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab. Karangasem	6 unit	10.000.000	APBD	Sekretariat	6 unit	-	-10.000.000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Karangasem	258 unit	242.428.000,00	APBD	Sekretariat	258 unit	242.428.000	-
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Penataan halaman	Kab. Karangasem	3 unit	196.676.914,00	APBD	Sekretariat	3 unit	241.676.914	45.000.000
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Ketersedian dokumen laporan pengelolaan keuangan**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**250.452.416.349,00**	**APBD**	**Bidang Anggaran**	**100%**	**260.079.299.705,00**	**9.626.883.356,00**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
						daerah yang akuntabel								
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**1.191.572.134,00**	**APBD**	**Bidang Anggaran**	**100%**	**1.191.572.134,00**	**0,00**
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Kab. Karangasem	2 dokumen	171.299.044,00	APBD	Bidang Anggaran	2 dokumen	171.299.044	-
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Kab. Karangasem	2 dokumen	108.208.526,00	APBD	Bidang Anggaran	2 dokumen	108.208.526	-
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Kab. Karangasem	33 dokumen	20.853.800,00	APBD	Bidang Anggaran	33 dokumen	20.853.800	-
5	02	02	2.01	04	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi	Jumlah perubahan RKA-SKPD	Kab. Karangasem	33 dokumen	20.853.800,00	APBD	Bidang Anggaran	33 dokumen	20.853.800	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
					Perubahan RKA-SKPD	yang diverifikasi								
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Kab. Karangasem	33 dokumen	78.249.699,00		Bidang Anggaran	33 dokumen	78.249.699	-
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Kab. Karangasem	33 dokumen	25.394.000		Bidang Anggaran	33 dokumen	25.394.000	-
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Kab. Karangasem	4 dokumen	274.995.071,00	APBD	Bidang Anggaran	4 dokumen	274.995.071	-
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan	Kab. Karangasem	4 dokumen	491.718.194,00	APBD	Bidang Anggaran	4 dokumen	491.718.194	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
					tentang Penjabaran Perubahan APBD	kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD								
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang akuntabel**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**257.215.032,00**	**APBD**	**Bidang Perbendaharaan**	**100%**	**306.542.980,00**	**49.327.948,00**
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Kab. Karangasem	6 dokumen	9.899.000	APBD	Bidang Perbendaharaan	6 dokumen	31.829.000	21.930.000
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, supervisi, monitoring,	Kab. Karangasem	50 dokumen	30.554.300	APBD	Bidang Perbendaharaan	50 dokumen	107.757.864	77.203.564

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
					Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya								
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D deangan instansi terkait	Kab. Karangasem	56 dokumen	146.523.352	APBD	Bidang Perbendaharaan	56 dokumen	86.626.516	-59.896.836
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah	Kab. Karangasem	60 orang	70.238.380	APBD	Bidang Perbendaharaan	60 orang	80.329.600	10.091.220

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
						kabupaten/kota								
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**263.720.827,00**	**APBD**	**Bidang Akuntansi**	**100%**	**263.720.827,00**	**0,00**
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Karangasem	14 laporan	49.289.884	APBD	Bidang Akuntansi	14 laporan	49.289.884	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	Kab. Karangasem	204 dokumen	15.765.300	APBD	Bidang Akuntansi	204 dokumen	15.765.300	-
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Kab. Karangasem	13 laporan	52.545.184	APBD	Bidang Akuntansi	13 laporan	64.493.584	11.948.400
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BKUD dan laporan keuangan pemerintah	Kab. Karangasem	7 laporan	25.182.950	APBD	Bidang Akuntansi	7 laporan	25.182.950	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
						daerah yang terkonsolidasi								
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Kab. Karangasem	4 dokumen	99.045.434	APBD	Bidang Akuntansi	4 dokumen	81.237.034	-17.808.400

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab. Karangasem	1 dokumen	5.412.700	APBD	Bidang Akuntansi	1 dokumen	5.412.700	-
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen hasil analisis atas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Kab. Karangasem	1 dokumen	7.366.800	APBD	Bidang Akuntansi	1 dokumen	7.366.800	-
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah	Kab. Karangasem	100 orang	9.112.575	APBD	Bidang Akuntansi	100 orang	14.972.575	5.860.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
						kabupaten/kota								
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terselenggaranya urusan kewenangan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah**	**Kab. Karangasem**	**12 bulsn**	**248.739.908.356,00**	**APBD**	**Bidang Perbendaharaan**	**12 bulsn**	**258.317.463.764,00**	**9.577.555.408,00**
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran dan bantuan keuangan	Kab. Karangasem	18 laporan	217.442.360.625	APBD	Bidang Perbendaharaan	18 laporan	217.442.360.625	-
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Kab. Karangasem	1 laporan	1.367.372.830	APBD	Bidang Perbendaharaan	1 laporan	1.567.372.830	200.000.000
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil	Kab. Karangasem	2 laporan	29.930.174.901	APBD	Bidang Perbendaharaan	2 laporan	39.307.730.309	9.377.555.408

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
						kabupaten/kota								
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**710.622.388,00**	**APBD**	**Bidang BMD**	**100%**	**792.081.777,00**	**81.459.389,00**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kab. Karangasem**	**33 PD**	**710.622.388,00**	**APBD**	**Bidang BMD**	**33 PD**	**792.081.777,00**	**81.459.389,00**
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	Kab. Karangasem	1 dokumen	106.750.000	APBD	-	1 dokumen	111.055.000	4.305.000
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Kab. Karangasem	1 dokumen	23.475.000	APBD	-	1 dokumen	23.475.000	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Kab. Karangasem	1 laporan	127.909.388	APBD	-	1 laporan	139.629.388	11.720.000
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) barang milik daerah	Kab. Karangasem	1 laporan	18.000.000	APBD	-	1 laporan	18.000.000	-
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Kab. Karangasem	2 laporan	291.340.000	APBD	Bidang BMD	2 laporan	292.840.000	1.500.000
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	Kab. Karangasem	2 laporan	89.723.000	APBD	-	2 laporan	139.557.389	49.834.389

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Kab. Karangasem							-
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtang anan, pemusnahan dan penghausan barang milik daerah	Kab. Karangasem	1 Dokumen	37.925.000	APBD	-	1 Dokumen	52.025.000	14.100.000
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Kab. Karangasem	1 laporan	11.000.000	APBD	-	1 laporan	11.000.000	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	Kab. Karangasem	1 laporan	4.500.000	APBD	-	1 laporan	4.500.000	-
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase tingkat capaian target penerimaan pajak daerah	Kab. Karangasem	**100%**	**6.377.141.379**	**APBD**	**Bidang P3E**	**100%**	**8.571.542.659**	**2.194.401.280**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah jenis pajak daerah yang dikelola sebagai sumber pendanaan daerah**	**Kab. Karangasem**	**10 Jenis**	**6.377.141.379**	**APBD**	**Bidang P3E**	**10 Jenis**	**8.571.542.659**	**2.194.401.280**
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Kab. Karangasem	4 dokumen	199.050.594	APBD	Bidang P3E	4 dokumen	199.050.594	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Kab. Karangasem	4 laporan	128.704.634	APBD	Bidang P3E	4 laporan	128.704.634	-
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	Kab. Karangasem	2 laporan	255.269.326	APBD	Bidang P2D	2 laporan	773.772.925	518.503.599
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Kab. Karangasem	1 laporan	37.590.342	APBD	Bidang P2D	1 laporan	87.149.343	49.559.001

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Kab. Karangasem	285 laporan	481.861.253	APBD	Bidang P2D	285 laporan	538.784.615	56.923.362
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Kab. Karangasem	187.800 dokumen	140.551.940	APBD	Bidang P2D	187.800 dokumen	185.774.340	45.222.400
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan konsultasi pajak daerah	Kab. Karangasem	200 layanan	71.656.156	APBD	Bidang P3E	200 layanan	73.937.036	2.280.880
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Kab. Karangasem	12 dokumen	238.034.960	APBD	Bidang P3E	12 dokumen	347.504.960	109.470.000
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Kab. Karangasem	12 dokumen	16.871.350	APBD	Bidang P3E	12 dokumen	16.871.350	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/ Kegiatan	DPA Tahun 2024				Catatan Penting/ Pengampu Prog-Keg	Rencana DPA Perubahan Tahun 2024		Bertambah/ (Berkurang)
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Kab. Karangasem	12 dokumen	4.027.542.514	APBD	Bidang P3E	12 dokumen	3.809.414.352	-218.128.162
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Karangasem	12 dokumen	780.008.310	APBD	Bidang P3E	12 dokumen	2.410.578.510	1.630.570.200
									279.252.394.410				**296.310.155.921**	**17.057.761.511**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024. Kaidah pelaksanaan perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan RKAP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

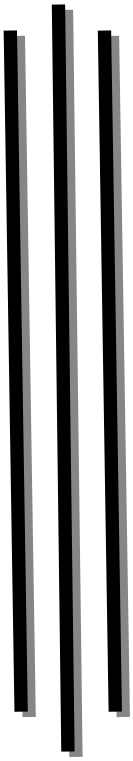
Ketersediaan pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan akan mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dalam perubahan Renja ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Karangasem,

Drs. I Wayan Ardika, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 198903 1 003

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2024



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGASEM
Jln.A.Yani No. 29 Telp/Fax (0363) 21170 – Amlapura 80811

Laman : http://dpmd.karangasemkab.go.id
Email : dpmdkarangasem@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA dan Perubahan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2024. Diharapkan nantinya Perubahan RENJA 2024 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2024. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Renja Kerja Perubahan DPMD Kabupaten Karangasem Tahun 2024, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Amlapura, 26 Agustus 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karangasem

Drs.I Made Sugiartha, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197208211992011004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMD KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024..... 7

2.1 Hasil Evalusi Pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Karangasem sampai dengan Triwulan II..... 7

2.2 Isu-Isu Penting yang terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Karangasem..... 8

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD KABUPATEN KARANGASEM..... 11

3.1 Tujuan dan Sasaran 11

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan..... 11

3.3 Program dan Kegiatan 12

BAB IV PENUTUP 13

LAMPIRAN :

Tabel 2.1 Evaluasi Renja DPMD Kabupaten Karangasem Triwulan II Tahun 2024

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMD Kab.Karangasem

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMD Kabupaten Karangasem dalam APBD Tahun 2024 dan Rencana Perubahan Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 360 disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah setelah menerima SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja berpedoman pada : a) rancangan perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Rencana Pembangunan Tahunan Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan-SKPD), adalah dokumen perencanaan Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan-SKPD) dilakukan karena adanya perubahan-perubahan mendasar dalam rencana kerja Program dan Kegiatan sebelumnya. Sebagai dokumen rencana perubahan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja perubahan DPMD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 (Serita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilaya Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Karangasem Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

21. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 18);
22. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 20)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja ini adalah untuk menyediakan dokumen rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memuat tentang perubahan-perubahan terhadap Renja DPMD Tahun 2024 sesuai perkembangan keadaan yang ada sehingga dapat menjadi arah dalam mewujudkan target kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan perubahan Renja ini adalah untuk :

a. Menjadi pedoman penyusunan RKAP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024; dan
b. Menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pasal 361 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka perubahan Renja DPMD Kabupaten Karangasem Tahun 2024 disajikan dengan sistematika sebagai :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMD KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024
- 2.1 Hasil Evalusi Pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Karangasem dan sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Isu-Isu Penting yang terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Karangasem

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD KABUPATEN KARANGASEM
- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem sampai dengan Triwulan II

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Dari 5 (Lima) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 50 (Lima Puluh) sub kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2024 maka prosentase program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan/berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, Dengan asumsi bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut ada yang sama dengan target dan dibawah target.
2. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran untuk Tahun 2024 sampai dengan Tri Wulan II adalah sebagai berikut :

   Pada Tahun 2024 Anggaran sebesar Rp.7.071.295.558,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.235.992.141,00 (45,76%), Realisasi Fisik sampai dengan TW II diperkirakan mencapai 30% dari target 100%

3. Secara umum faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target hasil/keluaran untuk kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan keterbatasan SDM aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Disamping itu juga adanya ketentuan peraturan perundangan yang baru berlaku, sehingga beberapa kegiatan harus menyesuaikan aturan baru tersebut.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1 sebagai berikut : (Terlampir)

2.2 Isu-Isu Penting yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPMD Kabupaten Karangasem

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMD Kabupaten Karangasem tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut diuraikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Isu-Isu Penting berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMD

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal	Eksternal	
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Rendahnya peran lembaga kemasyarakatan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Belum terpadunya program antar sektor dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif - Kondisi prasarana/sarana desa dan TTG belum memadai untuk mengembangkan potensi sumber daya perdesaan - Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa	1. Personil 2. Anggaran	1. Jumlah SDM 2. Ketersediaan anggaran	1. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa 2. Dukungan dari SKPD terkait	- Terbatasnya kualitas SDM - Terbatasnya anggaran untuk bintek/pelatihan-pelatihan

sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S) :

1) Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2) Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
3) Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
4) Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
5) Tersedianya anggaran.

KELEMAHAN (W) :

1) Terlalu berorientasi pada anggaran;
2) Belum tersedianya sistem informasi data;
3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;
4) Kurangnya tenaga fungsional
5) Lingkungan Eksternal

PELUANG (O) :

1) Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
2) Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
3) Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
4) Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
5) Adanya program-program bantuan dari propinsi dan pusat;
6) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

ANCAMAN (T) :

1) Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;

2) Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
3) Besarnya jumlah keluarga miskin;
4) Masih banyaknya desa yang berpotensi rendah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD KABUPATEN KARANGASEM

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dalam pembangunan di Kabupaten Karangasem mengacu pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah tujuan ke-12 yaitu Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Karangasem berdasarkan Sad Kerthi dijabarkan dalam sasaran ke-21 yaitu Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak dan tujuan ke-24 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dijabarkan dalam sasaran ke-37 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya dijabarkan dalam Renstra DPMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 seperti yang disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut : (Terlampir)

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran suatu organisasi, adapun strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

1) Memantapkan penataan wilayah desa, prasarana dan sarana desa
2) Mendorong pengembangan potensi asli desa melalui fasilitasi kerjasama desa dalam pembangunan kawasan perdesaan
3) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas melalui pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
4) Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan desa dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui pengembangan manajeman pembangunan partisipatif.

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mancapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa
2. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa
4. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat dan Pendamping Masyarakat

Berdasarkan telaahan terhadap rekomendasi hasil evaluasi Renja DPMD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II sebagian besar program , kegiatan dan sub kegiatan sudah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan juga tidak banyak berubah sesuai dengan Renja 2024.

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sebagimana yang tersaji dalam Perubahan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2024 untuk OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem Tahun 2022 terdiri dari 5 (Lima) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 50 (Lima Puluh) sub kegiatan.

Secara lebih lengkap program dan kegiatan dimaksud tersaji dalam Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem dan Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut : (Terlampir)

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah DPMD Kabupaten Karangasem Tahun 2024 menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2024. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2024 serta mengacu pada perencanaan tahun pertama Renstra DPMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja DPMD Tahun 2024 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2024, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, indikator kinerja telah tercapai pada tahun sebelumnya, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan belum terpenuhi.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Semester I. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.



RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA PERUBAHAN)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia -Nya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja ini memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 02 September 2024

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
JF. Perencana Ahli Muda	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karangasem

I Wayan Sutapa, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.196911021990031006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang..... 4

1.2 Landasan Hukum..... 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ……..... 10

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II .....……..... 11

2.2 Isu-Isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol..... 18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL..... 21

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol..... 21

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan……..... 21

3.3 Program dan Kegiatan..... 22

BAB IV PENUTUP..... 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, forum PD, dan penetapan renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karangasem tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tugas dan fungsi Kesbangpol sebagai Perangkat daerah yang melaksanakan urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dimana itu dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Karangasem nomor 20 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semseta Berencana Tahun 2024 sehingga perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesbangpol ini harus disesuikan dengan Peraturan Bupati tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah**:**

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomo 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Karangasem 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 20)
19. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 608/HK/2023 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2024;
2. Untuk memenuhi kebutuhan yang belum terakomodir dalam DPA Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah/acuan dalam penyusunan perubahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi target dan capaian progam, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan.

1.4 Sistematika penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Menguraikaan secara ringkas tentang latar belakang / pertimbangan dilakukannya perubahan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem.

1.2 Landasan Hukum

Memuat landasan hukum / peraturan perundang-undangan terkait dengan dilakukannya perubahan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikaan maksud dan tujuan dilakukannya perubahan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasen

BAB II EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasen.

2.1. Hasil evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasen sampai TW II

Memuat capaian sasaran renja tahun 2024, capaian program dan kegiatan renja tahun 2024

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasen, berisikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasen.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KARANGASEM

3.1. Tujuan dan Sasaran

Memuat penyesuaian tujuan dan sasaran dan indikator kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasen untuk tahun 2024.

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan perubahan program dan kegiatan serta perubahannya.

BAB IV PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan untuk:

a. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan
c. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator outputnya.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem selama tahun 2024 dan perkiraan capian target tahun 2025.

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II

Pada tahun anggaran 2024 Badan Kesbangpol dalam pagu indikatif melaksanakan 6 program, 10 kegiatan dan 34 subkegiatan. Dari beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dievaluasi kembali sehingga perlu dilaksanakan perubahaan anggaran menyesuaikan dengan situasi saat ini.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol tahun 2024 dan pencapaian Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2024.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2024 digambarkan sebagaimana tabel 2.1. Dari tabel 2.1 dapat digambarkan target dan realisasi dari Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, yaitu masih adanya perencanaan anggaran yang masih harus diperbaiki sehingga menyebabkan program/kegiatan belum terlaksana sesuai target.

Tabel 2.1

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 sampai triwulan II

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU Tahun 2024 (Rp)	Realisasi sd TW II		
					Fisik	Keu (Rp)	Persentase
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 Persen	4.467.395.451	57,60%	2.232.890.077	49,98%
A1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	52.383.024	45,77%	10.938.450	20,88%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.290.812	42,86%	8.319.000	35,72%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.197.600	60,00%	590.000	49,27%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyu sunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.659.500	30,00%	0	0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.932.500	100,00%	1.450.000	75,03%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyu sunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.400.000	35,00%	0	0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	20.902.612	45,00%	210.000	1,00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	60,00%	369.450	36,95%
A2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.455.537.743	59,99%	1.945.269.293	56,29%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	29 Orang	3.454.112.743	60,00%	1.945.269.293	56,32%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyu sunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.425.000	40,00%	0	0,00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU Tahun 2024 (Rp)	Realisasi sd TW II		
					Fisik	Keu (Rp)	Persentase
A3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	376.691.676	49,00%	89.421.550	23,74%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.759.800	50,00%	1.683.000	44,76%
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	12.724.500	50,00%	5.912.000	46,46%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	228.680.300	50,00%	64.950.750	28,40%
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	38.527.076	50,00%	6.259.800	16,25%
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	15.000.000	45,00%	1.986.000	13,24%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	70.000.000	40,00%	630.000	0,90%
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	8.000.000	100,00%	8.000.000	100,00%
A4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	220.359.284	50,00%	78.356.284	35,56%
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.965.612	50,00%	9.619.000	38,53%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	38.000.000	50,00%	12.073.284	31,77%
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	40.000.000	50,00%	7.750.000	19,38%
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	117.393.672	50,00%	48.914.000	41,67%
A5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	362.423.724	50,00%	108.904.500	30,05%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU Tahun 2024 (Rp)	Realisasi sd TW II		
					Fisik	Keu (Rp)	Persentase
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	15 Unit	347.423.724	50,00%	104.904.500	30,19%
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15.000.000	50,00%	4.000.000	26,67%
B	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.110.088.736	30,30%	201.337.387	9,54%
B1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.110.088.736	30,30%	201.337.387	9,54%
23	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	1.021.241.736	26,00%	61.359.000	6,01%
24	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	70 Orang	1.056.927.000	35,00%	139.978.387	13,24%
25	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah laporan hasil pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Laporan	31.920.000	12,00%	0	0,00%
C	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	43.794.680.436	99,20%	42.792.497.133	97,71%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU Tahun 2024 (Rp)	Realisasi sd TW II		
					Fisik	Keu (Rp)	Persentase
C1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	43.794.680.436	99,20%	42.792.497.133	97,71%
26	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerin tahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280 Orang	43.613.915.636	99,50%	42.791.897.133	98,12%
27	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerin tahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 Orang	56.963.600	30,00%	0	0,00%
28	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	123.801.200	25,00%	600.000	0,48%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU Tahun 2024 (Rp)	Realisasi sd TW II		
					Fisik	Keu (Rp)	Persentase
D	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	167.730.000	43,71%	41.960.000	25,02%
D1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksa naan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	167.730.000	43,71%	41.960.000	25,02%
29	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	132.570.000	50,00%	41.960.000	31,65%
30	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawa san Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	35.160.000	20,00%	0	0,00%
E	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 Persen	393.341.636	48,00%	139.957.000	35,58%
E1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	393.341.636	48,00%	139.957.000	35,58%
31	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketaha nan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	310 Orang	393.341.636	48,00%	139.957.000	35,58%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU Tahun 2024 (Rp)	Realisasi sd TW II		
					Fisik	Keu (Rp)	Persentase
F	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 Persen	437.742.712	59,55%	117.292.749	26,79%
F1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	437.742.712	59,55%	117.292.749	26,79%
32	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	293.151.612	60,00%	72.840.249	24,85%
33	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspa daan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	19.644.400	50,00%	3.780.000	19,24%
34	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	124.946.700	60,00%	40.672.500	32,55%
JUMLAH				51.370.978.971	91,84%	45.525.934.346	88,62%

Menyimak realisasi kinerja 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas dan dikomparasikan dengan kinerja OPD, ada beberapa kegiatan yang pengelolaan keuangannya belum optimal. Demikian juga terhadap keseluruhan indikator yang diukur dalam aspek akuntabilitas kinerja, rata-rata semua kegiatan sudah terpenuhi. Hanya saja yang harus tetap diperjuangkan adalah aspek kualitas hasil kinerja yang akuntabel. Beberapa faktor yang mempengaruhi aspek pelaksanaan kinerja adalah sebagai berikut.

a. Optimalisasi anggaran pada keseluruhan program dan kegiatan.
b. Kualitas sumber daya yang dimiliki.
c. Perencanaan yang terukur.
d. Koordinasi lintas unit kerja dan lintas sektoral.

Terhadap pencapaian kinerja baik dari sudut pengelolaan anggaran maupun akuntabilitas kinerja yang dicapai, maka secara langsung berimplikasi terhadap program renstra OPD yang dalam hal ini pencapaian renstra OPD sampai tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. Beberapa kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah; meningkatkan validitas data sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan yang akuntabel, dan anggaran yang optimal

2.2 Isu – Isu Penting Pelaksanaanan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Kualitas penyelenggraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggraan kegiatan tersebut meliputi :

1. Struktur masyarakat adat di Kabupaten Karangasem yang memiliki karakteristik kebersamaan dan gotong royong yang mendukung pengembangan budaya politik
2. Makin berperannya lembaga legislative dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat
3. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di dalam pembangunan daerah
4. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat bernegara

kebangsaan

5. Berperannya pemuka agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penanganan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Makin meningkatnya koordinasi antar instansi pada perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
7. Semakin baiknya kerjasama dan kesigapan aparat keamanan beserta masyarakat pemuka desa adat dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban
8. Terselenggaranya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem sampai dengan tahun 2024 didasarkan pada indikator Kinerja Keberhasilan sebagai Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyangkut :

1. Belum maksimalnya partisipasi pemilih pada pemilihan umum.
   Pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat terlapas dari partisipasi pemilih, partisipasi pemilih akan mempengaruhi tingkat capaian kesuksesan dari pada pemilu tersebut, sehingga peningkatan partisipasi pemilih sangatlah penting dalam pemilu.
2. Masih kurangnya wawasan politik masyarakat.
   Wawasan politik pada masyarakat perlu ditingkatkan dalam peningkatan Indek Demokrasi Indonesia. Indek Demokrasi Indonesia merupakan asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Indek Demokrasi Indonesia merupakan gambaran pada setiap provinsi di Indonesia baik berada pada tingkat demokrasi baik, sedang maupun buruk, dengan hal tersebut pemerintah pusat atau provinsi/daerah dapat memberikan prioritas pembangunan politik di daerah tersebut.
3. Belum maksimalnya komunikasi pemerintah daerah dengan partai politik. Sebagai wadah dalam melaksanakan komunikasi maupun koordinasi perlu dibentuk sebuah forum diskusi politik yaitu dalam hal pembahasan pembangunan dan pembanguna politik yang baik di daerah.

4. Belum maksimalnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam berpartisipasi untuk pembangunan di daerah. Keberadaan organisasi kemasyarakatan di daerah sangat penting yaitu untuk berfartisipasi dalam pembangunan di daerah, organisasi kemasyarakatan perlu difasilitasi dan diberikan pembinaan. Disamping itu juga Pemerintah Daerah memiliki peran menjaga keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan di daerah, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dapat diberikan melalui fasilitasi kebijakan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Belum maksimalnya pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan wajib dilakukan agar adanya kontroling pemerintah terhadap organisasi kemasyrakatan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap Ormas guna untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari ormas tersebut, pengawasan yang dilakukan beersifat eksternal.
6. Belum tuntasnya pemahaman terhadap Ideologi Negara dan rasa Nasionalisme yang ditanamkan kepada generasi muda khususnya di Kabupaten Karangasem .
7. Masih potensialnya konflik Sosial di beberapa daerah yang berdampak nasional pada gangguan keamanan dan dapat mempengaruhi daerah lain.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol

Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian sasaran dan tujuan Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem adalah :

1. Peningkatan pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan
2. Peningkaatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Pelaksanaan Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Adapun penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024 bertujuan untuk mengakomodir semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem, diperlukan strategi yang meliputi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

4. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Strategi ini adalah sebagai pedoman kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

3.2.2 Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka ditempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

3.3 Program dan Kegiatan

Program dapat diartikan sebagai intrumen dari kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Dalam perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini direncanakan ada 6 (enam) program utama dalam pencapaian sasaran peningkatan PAD baik yang berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan PAD maupun yang berpengaruh secara tidak langsung.

Setiap program yang telah direncanakan, dijabarkan lebih teknis kedalam kegiatan-kegiatan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut.

Kegiatan dijelaskan dengan penetapan indikator kinerja yang sifatnya cenderung dengan maksud untuk mempermudah pengukuran dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan. Namun tidak menghindar juga penggunaan indikator kualitatif yang akan dapat mendukung angka dan presentase dari target yang telah ditetapkan karena sifat indikator kualitatif yang kaya informasi sehingga menghidupkan informasi hasil dari suatu kegiatan.

Rencana kerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem selalu berpedoman pada perioritas mengingat keterbatasan dana dan sesuai renstra Badan KesbangPol pada Perubahan RKPD tahun 2024. Bedasarkan rencana kerja Badan Kesbangpol dan RKPD Tahun 2024 terdiri dari 6 Program dan 10 kegiatan serta 34 Subkegiatan dirancang dalam RKPD Perubahan menjadi 6 Program dan 11 kegiatan serta 35 Subkegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang terakomodir di Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   A1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      A1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      A1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      A1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      A1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      A1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      A1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
      A1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   A2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      A2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      A2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   A3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      A3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      A3.2 Penyediaan peralatan rumah tangga
      A3.3 Penyediaan bahan logistik kantor

A3.4 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

A3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

A3.6 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

A3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

A4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

A4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

A5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

A5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

A5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

A5.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

A6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

A6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

B1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

B1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

B1.2. Pembentukan Paskibraka

B1.3. Pembinaan Lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

C1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

C1.1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

C1.2. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

C1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

D. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

D1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

D1.1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

D1.2. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

D1.2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

E. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

E1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

E1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

F1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

F1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

F1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

F1.6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah segaimana tabel 3.1

Tabel 3.1

Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2024			Anggaran Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
08.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 Persen	4.467.395.451	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 Persen	4.858.109.996	390.714.545	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	52.383.024	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	32.417.412	- 19.965.612	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.290.812	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.290.812	-	
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.197.600	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.197.600	-	
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.659.500	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.659.500	-	
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.932.500	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.932.500	-	
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.400.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.400.000	-	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	20.902.612	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	937.000	- 19.965.612	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2024			Anggaran Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.455.537.743	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.725.279.000	269.741.257	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	29 Orang	3.454.112.743	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	29 Orang	3.723.854.000	269.741.257	
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.425.000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.425.000	-	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	376.691.676	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	396.903.076	20.211.400	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.759.800	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.759.800	-	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	12.724.500	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	12.935.900	211.400	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	228.680.300	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	228.680.300	-	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	38.527.076	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	38.527.076	-	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	15.000.000	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	15.000.000	-	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	70.000.000	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	90.000.000	20.000.000	
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	8.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	8.000.000	-	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	102.680.000	102.680.000	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	102.680.000	102.680.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2024			Anggaran Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	220.359.284	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	220.899.284	540.000	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.965.612	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.965.612	-	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	38.000.000	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	38.000.000	-	
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	40.000.000	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	40.000.000	-	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	117.393.672	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	117.933.672	540.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	362.423.724	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	379.931.224	17.507.500	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pem eliharaan, Biaya Peme liharaan, Pajak dan Perizinan Kenda raan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	15 Unit	347.423.724	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	15 Unit	364.931.224	17.507.500	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15.000.000	-	
08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.110.088.736	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.805.655.497	695.566.761	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.110.088.736	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.805.655.497	695.566.761	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	1.021.241.736	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	1.148.536.136	127.294.400	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2024			Anggaran Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	70 Orang	1.056.927.000	Jumlah Paskibraka	50 Orang	1.625.199.361	568.272.361	
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah laporan hasil pembi naan lanjutan kepada Purna paskibraka Duta Pancasila	1 Laporan	31.920.000	Jumlah laporan hasil Pembina an lanjutan kepada Purna paskibraka Duta Pancasila	1 Laporan	31.920.000	-	
08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase cakupan pelaksa naan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	43.794.680.436	Persentase cakupan pelaksa naan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	43.804.956.386	10.275.950	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	43.794.680.436	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	43.804.956.386	10.275.950	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerin tahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280 Orang	43.613.915.636	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280 Orang	43.722.044.386	108.128.750	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2024			Anggaran Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerin tahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 Orang	56.963.600	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 Orang	37.860.000	- 19.103.600	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	123.801.200	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	45.052.000	- 78.749.200	
08.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	167.730.000	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	168.118.000	388.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksa naan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	167.730.000	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksa naan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	168.118.000	388.000	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	132.570.000	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	157.570.000	25.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2024			Anggaran Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawa san Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	35.160.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	10.548.000	- 24.612.000	
08.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 Persen	393.341.636	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 Persen	393.341.636	-	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	393.341.636	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	393.341.636	-	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketaha nan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	310 Orang	393.341.636	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	310 Orang	393.341.636	-	
08.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 Persen	437.742.712	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 Persen	1.371.749.712	934.007.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	437.742.712	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	1.371.749.712	934.007.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2024			Anggaran Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	293.151.612	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	798.981.612	505.830.000	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspa daan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	19.644.400	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	33.948.400	14.304.000	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	124.946.700	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	538.819.700	413.873.000	
JUMLAH				51.370.978.971			53.401.931.227	2.030.952.256	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem tahun 2024. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dalam menjalan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem serta kerjasama dan peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Karangasem untuk mencapai kinerja yang optimal.

Amlapura, 02 September 2024

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
JF. Perencana Ahli Muda	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karangasem

Dr. I Wayan Sutapa, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.196911021990031006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah harus didukung dengan dokemen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang terdiri dari gabungan setiap Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun dokumen awal dalam rencana kerja yang dipersiapkan adalah adanya rancangan awal dari RKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem ini merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1(satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 serta pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem. Rancana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem tahun 2024 sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dari urusan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi program, kegiatan dan sub. kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem menjabarkan visi dan misi serta arah pengembangan perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Karangasem yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1 Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);

11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);

12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032.

14 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaranan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);.

15 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6) sebagaimna telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

17 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021

18 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023

19 Keputusan Bupati Karangasem Nomor 460 /HK/ 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022

1.3 Maksud danTujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang operasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku, Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan untuk penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Karangasem, RKPD Kabupaten selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan rencana sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tahun 2024. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 juga memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat terjaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang – Undang 32 Tahun 2004. Disamping itu selain yang disebutkan diatas tujuan lain yang hendak dicapai adalah:

1.3.1.1 Memberikan gambaran kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

Pejabat/pimpinan instansi.

1.3.1.2 Sebagai acuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan Tugas dan Fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karangasem.

1.3.1.3 Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem selama Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem tahun 2021 - 2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat terjaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang – Undang 32 Tahun 2004. Disamping itu selain yang disebutkan diatas tujuan lain yang hendak dicapai adalah:

1.3.2.1 Memberikan gambaran kemampuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.

1.3.2.2 Sebagai acuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karangasem.

1.3.2.3 Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem selama Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian

Renstra

Perangkat daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2. Pagu Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Karangasem. Tercapai tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut rancangan awal rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan indikator kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakann ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (inpect). Indikator-indikator tersebut berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian analisi kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022

Anggaran belanja tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada APBD sebesar Rp. 3.574.676.408,00 yang terdiri dari 4 Program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengaan realisasi anggaran per 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp. 3.350.059.047,00 atau sebesar 98%.

- Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

  Untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan hasil (autcome) yang diharapkan dari target kinerja program/kegiatan yang tidak tercapai dengan menetapkan kebijakan berdasarkan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah dengan mengantisifasi anggaran dalam merencanakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam perencanaan yang lebih baik

Perkiraan pencapaian tahun anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2023, alokasi anggaran belanja langsung Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD sebesar Rp 3.322.203.570,00 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Kabupaten Karangasem

Rekapiitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 sd Tahun 2026 (Tahun Berjalan)

Kabupaten : Karangasem

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (input)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan sub kegiatan tahun n	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2					PERPUSTAKAAN									
2	**23**				URUSAN KABUPATEN / KOTA									
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	7 dokumen							

2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	8 dokumen							
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 dokumen							
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen							
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen							
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen							
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	1 dokumen							
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan kinerja dan realisasi anggaran yang dibuat	2 dokumen							

					SKPD									
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Capaian Kinerja	1 dokumen							
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah anggaran yang direalisasikan	12 bulan							
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12 bulan							
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan							
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah buku yang di cetak	6 jenis cetakan							
						Jumlah digandakan	8000 lembar foto copy							
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemasangan alat listrik untuk penerangan bangunan kantor	5 gedung							
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya media cetak untuk dilayankan kepada masyarakat	12 jenis							

2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang tersedia	12 bulan							
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3 kali							
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan mebel	4 buah							
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	4 buah							
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4 jenis peralatan							
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah penyediaan jasa penunjang kantor	12 bulan							
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah terkirimnya surat dan SPJ	400 lembar							
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya jasa Komunikasi,	12 bulan							

						Sumber Daya Air dan Listrik								
2	23	01	2.08	03	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kantor menjadi bersih dan nyaman	12 bulan							
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan							
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	13 mobil dan sepeda motor							
2	23	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	25 buah							
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor terpelihara	12 bulan							
2	23	01	2.09	07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Pemeliharaan aset tetap lainnya	12 bulan							
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 gedung							
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
2	23	02			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Tenaga Pengelola perpustakaan yang dibina	39 orang							

2	**23**	02	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perpustakaan yang dibina	50 Perpustakaan							
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	12 bulan							
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perpustakaan untuk melayani masyarakat	1000 kali							
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah dibina	50 Perpustakaan							
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan desa yang sudah dibina	50 Perpustakaan							
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah/PD yang terselenggara dengan baik	2 Perpustakaan							
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah jenis buku yang bertambah koleksinya	7 jenis							

2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah jenis buku dikelola yang bertambah koleksinya	12 bulan							
2	**23**	02	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kunjungan ke sekolah/desa	0							
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	50 kali							
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah perayaan hari kunjung perpustakaan yang terlaksana	1 kali							
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah taman kanak-kanak/RA dan PAUD yang meningkat kemampuan anak dalam bercerita	20 Tk/RA dan PAUD							
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lomba minat baca yang sudah dilaksanakan	3 lomba							
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno melalui	55 Orang							

						Pendataan dan Pengalihmediaan								
2	**23**	03	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan	88 naskah							
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah pendataan dan pelesterian naskah kuno yang di simpan oleh masyarakat	80 naskah							
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat	8 naskah							
2	**23**	03	2.02		**Pengembangan Koleksi Budaya Eknis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana	3 kali							

2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana	3 kali							
2	24				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN**									
2	24	02			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase perangkat daerah yang tata kelola kearsipannya baik	50,85							
2	24	02	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota**	Jumlah pengelolaan arsip dinamis kabupaten karangasem								
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah PD/desa yang sudah tertata arsipnya	5 PD/Desa							
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	5 PD/Desa							
2	24	02	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pengelolaan arsip statis kabupaten karangasem								
					Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan	5 PD/Desa							

					akuisisi								
					Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan penelusuran								
2	24	02	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Jumlah pelayanan informasi arsip kabupaten karangasem	12 bulan						
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/kota Melalui JIKN	Jumlah arsip yang sudah dimasukkan ke aplikasi SIKN dan JIKN	12 bulan						
2	24	02	2.02	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD/desa/lembaga yang dibina	50 PD/Desa						
						Jumlah pengelola arsip yang dibintek							
2	24	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Jumlah penataan arsip dan tersedianya layanan informasi arsip yang smart	981						
2	24	03	2.01		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Jumlah daftar arsip usul musnah kabupaten karangasem	4 PD						

2	24	03	2.01	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah PD yang berkurang arsipnya yang telah jatuh retensi	3 PD							
2	24	03	2.03		**Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab./ Kota yang digabung dan / atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan**	Jumlah Penyelamatan arsip								
2	24	03	2.03	01	Pendataan , penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan Pearangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah/ Desa yang di data								
2	24	03	2.03	04	Pendampingan penyelamatan arsiap bagi pemekaran desa / Kelurahan	Jumlah Desa yang dimekarkan	3 Desa							
2	24	04			**PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Persentase terlayaninya permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup								
2	24	04	2.01		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten / Kota**	Persentase permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup								

2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP penggunaan Arsip Yang Bersifat tertutup								
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Perangkat Daerah Yang Memiliki Arsip Yang Bersifat Tertutup	2 PD							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. perangkat daerah harus mempunyai tolak ukur dan indikator yang bisa diuji, yang bisa menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Karangasem

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten : Karangasem

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Proyeksi						Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n	Tahun 2022 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n+3	Tahun 2025 (thn n+4	Tahun 2026 (thn n+5	Tahun 2021 (thn n	Tahun 2022 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n+3	Tahun 2025 (thn n+4	Tahun 2026 (thn n+5	Tahun 2021 (thn n	Tahun 2022 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n+3	Tahun 2025 (thn n+4	Tahun 2026 (thn n+5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan			7 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen													
	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			7 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen													
	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen													
	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen													

	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen											
	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen											
	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen											
	Jumlah laporan kinerja dan realisasi anggaran yang dibuat			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen											
	Jumlah laporan Evaluasi Capaian Kinerja				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen											
	Jumlah anggaran yang direalisasikan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan											
	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan											
	Jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan											
	Jumlah buku yang di cetak			5 jenis cetakan	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan											

	Jumlah digandakan			4990 lembar foto copy	6000 lembar foto copy	8000 lembar foto copy	9000 lembar foto copy	9000 lembar foto copy	9000 lembar foto copy											
	Jumlah pemasangan alat listrik untuk penerangan bangunan kantor			5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung											
	Jumlah tersedianya media cetak untuk dilayankan kepada masyarakat			12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis											
	Jumlah logistik yang tersedia			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan											
	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			2 kali	3 kali	**3 kali**	4 kali	4 kali	4 kali											
	Jumlah pengadaan mebel				4 buah	4 buah	8 buah	8 buah	8 buah											
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								1 unit											
	Jumlah Pengadaan Mebel				4 buah	**4 buah**	**4 buah**	**4 buah**	**4 buah**											
	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor				4 jenis peralatan	4 jenis peralatan	4 jenis peralatan	4 jenis peralatan	4 jenis peralatan											

	Jumlah penyediaan jasa penunjang kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan												
	Jumlah terkirimnya surat dan SPJ			400 lembar	400 lembar	400 lembar	400 lembar	400 lembar	400 lembar												
	Jumlah tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan												
	Jumlah kantor menjadi bersih dan nyaman			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan												
	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan												
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara			13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor												
	Jumlah Pemeliharaan Mebel				25 buah	100 buah	100 buah	100 buah	100 buah												
	Jumlah peralatan kantor terpelihara			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan												
	Jumlah Pemeliharaan aset tetap lainnya				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan												
	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung												

2	Tenaga Pengelola perpustakaan yang dibina			38,63	50,94	63,25	75,56	87,87	100											
	Jumlah Perpustakaan yang dibina			50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali											
	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				12 bulan	12 bulan	12 bln	12 bln	12 bln											
	Jumlah pelayanan perpustakaan untuk melayani masyarakat			2500 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1.100 orang	1.300 orang											
	Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah dibina			50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	55 kali	60 Kali											
	Jumlah perpustakaan desa yang sudah dibina				50 kali	50 kali	50 kali	55 kali	60 Kali											
	Jumlah bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah/PD yang terselenggara dengan baik				2 kali	2 kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali											
	Jumlah jenis buku yang bertambah koleksinya				7 jenis	7 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis											
	Jumlah jenis buku dikelola yang bertambah koleksinya				12 bulan	12 bulan	12 bln	12 bln	12 bln											
	Jumlah kunjungan ke sekolah/desa			0	50 kali	**50 kali**	**50 kali**	**50 kali**	**50 kali**											

	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				50 kali	50 Kali	50 Kali	55 Kali	50 Kali											
	Jumlah perayaan hari kunjung perpustakaan yang terlaksana			1 kali	1 kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali											
	Jumlah taman kanak-kanak/RA dan PAUD yang meningkat kemampuan anak dalam bercerita				20 TK/RA dan PAUD	20 TK/RA dan PAUD	20 TK/RA dan PAUD	20 TK/RA dan PAUD	20 TK/RA dan PAUD											
	Jumlah lomba minat baca yang sudah dilaksanakan				3 lomba	3 lomba	3 lomba	3 lomba	3 lomba											
3	Pelestarian Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan			108 naskah	488	596	704	812	920											
	Jumlah Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan			108 naskah	78 naskah	88 naskah	88 naskah	99 naskah	99 naskah											
	Jumlah pendataan dan pelesterian naskah kuno yang di simpan oleh masyarakat				70 naskah	80 naskah	80 Naskah	90 Naskah	90 Naskah											

	Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat			8 naskah	8 naskah	8 naskah	8 naskah	9 naskah	9 naskah											
	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana			3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	4 kali	4 kali											
	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana			3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	4 kali	4 kali											
4	Persentase perangkat daerah yang tata kelola kearsipannya baik			25,42	38,13	50,85	63,55	80,5	100											
	Jumlah pengelolaan arsip dinamis kabupaten karangasem						12 bulan	12 bulan	12 bulan											
	Jumlah PD/desa yang sudah tertata arsipnya							40 PD/Desa	40 PD/Desa											
	Jumlah pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						12 bln	12 bln	12 bln											

	Jumlah pengelolaan arsip statis kabupaten karangasem					4 PD	4 PD	4 PD	4 PD											
	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan akuisisi					5 PD/Desa	5 PD/Desa	5 PD/Desa	5 PD/Desa											
	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan penelusuran							3 lembaga	5 lembaga											
	Jumlah pelayanan informasi arsip kabupaten karangasem			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan											
	Jumlah arsip yang sudah dimasukkan ke aplikasi SIKN dan JIKN			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan											
	Jumlah PD/desa/lembaga yang dibina			24 PD/Desa	50 PD/Desa/Lembaga	50 PD/lembaga	50 PD/lembaga	50 PD/lembaga	50 PD/lembaga											
	Jumlah pengelola arsip yang dibintek						40 PD/Desa	40 PD/Desa	40 PD/Desa											
5	Jumlah penataan arsip dan tersedianya layanan informasi arsip yang smart			916	941	981	1021	1061	1101											
	Jumlah daftar arsip usul musnah kabupaten karangasem			2 PD	3 PD	4 PD	5 PD	5 PD	5 PD											
	Jumlah PD yang berkurang arsipnya			2 PD	3 PD	3 PD	3 PD	5 PD/D	5 PD/D											

	yang telah jatuh retensi							esa	esa											
	Jumlah Penyelamatan arsip				10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa											
	Jumlah Perangkat Daerah/ Desa yang di data						75 PD/Desa	75 PD/Desa	75 PD/Desa											
	Jumlah Desa yang dimekarkan				3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa											
6	Persentase terlayaninya permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup				100%	100%	100%	100%	100%											
	Persentase permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup				100%	100%	100%	100%	100%											
	Jumlah SOP penggunaan Arsip Yang Bersifat tertutup				1 dokumen															
	Jumlah Perangkat Daerah Yang Memiliki Arsip Yang Bersifat Tertutup				2 PD	2 PD	2 PD	2 PD	3 PD											

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem

   Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi ;

   a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas

   b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Dinas

      1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

      2. Sub Bagian Penyusunan program, Evaluasi dan Pelaporan

   c. Unsur Pelaksana : Bidang, terdiri dari :

      1. Bidang Perpustakaan terdiri dari :
         a. Seksi Pengembangan Koleksi, Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Perpustakaan
         b. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama perpustakaan

      3. Bidang Kearsipan
         Unsur Pelaksana : Seksi, terdiri dari :

         a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

         b. Seksi Pengelolaan Arsip

         d. Unsur Fungsional : Pustakawan dan Arsiparis

Jumlah Pegawai dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah 19 orang ditambah tenaga kontrak sebanyak 24 orang. Sumber daya manusia tersebut belum mencukupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem **;**

   Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi :

   Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

   a. Rendahnya minat baca masyarakat

   b. Kurangnya sarana pelayanan yang berbasis digital

   c. Kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pengembangan perpustakaan desa

   d. Kurangnya bahan pustaka yang tersedia

   e. Kurangnya pemahaman pengelolaan arsip pada masing-masing Perangkat Daerah

   Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi :

   a. Tingkat pemahaman Aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;

   b. Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masih kurang;

3. Formulasi Isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem

a. Terbatasnya personil yang profesional di bidang pengelolaan perpustakaan dan Kearsipan

b. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia

c. Kurang berperannya perpustakaan membangun masyarakat dan bangsa yang berkarakter, serta bisa bersaing dalam kancah peradaban global

d. Belum optimalnya Jaringan Website yang dapat digunakan untuk memberikan Informasi secara luas seperti pembangunan Perpustakaan Elektronik, penyediaan ruang Audio Visual dan Fasilitas Penunjang lainnya

2.4 Review terhadapan Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Button-up dan Top-down). Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2021 yang diusulkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem sebesar Rp. **4.370.954.267,-** dengan realisasi anggaran Rp. **3.095.613.169.00** persentase realisasi anggaran sebesar 96,99 %.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus

dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem melaksanakan 5 Program, 11 kegiatan dengan 26 sub kegiatan, dan pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan.
b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Karangasem

Tabel T.C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Karangasem

Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2024
Kabupaten Karangasem
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	PERPUSTAKAAN				**3.937.777.847**					**3.937.777.847**	
	URUSAN KABUPATEN / KOTA				**3.752.244.697**					**3.752.244.697**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah kegiatan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	**8 dokumen**	**3.549.784.724**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Jumlah kegiatan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	**8 dokumen**	**3.549.784.724**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	**8 dokumen**	**70.744.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	**8 dokumen**	**70.744.000**	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispustaka	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan	**1 dokumen**	**2.000.000**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispustaka	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan	**1 dokumen**	**2.000.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**1 dokumen**	**2.000.000**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**1 dokumen**	**2.000.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**1 dokumen**	**2.000.000**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**1 dokumen**	**2.000.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**1 dokumen**	**2.000.000**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**1 dokumen**	**2.000.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	**1 dokumen**	**2.000.000**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	**1 dokumen**	**2.000.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispustaka	Jumlah laporan kinerja dan realisasi anggaran yang dibuat	**2 dokumen**	**58.744.000**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispustaka	Jumlah laporan kinerja dan realisasi anggaran yang dibuat	**2 dokumen**	**58.744.000**	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispustaka	Jumlah laporan Evaluasi Capaian Kinerja	**1 dokumen**	**2.000.000**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispustaka	Jumlah laporan Evaluasi Capaian Kinerja	**1 dokumen**	**2.000.000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah anggaran yang direalisasikan	**12 bulan**	**2.550.139.235**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Jumlah anggaran yang direalisasikan	**12 bulan**	**2.550.139.235**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispustaka	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	**12 bulan**	**2.550.139.235**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispustaka	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	**12 bulan**	**2.550.139.235**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	**12 bulan**	**308.469.930**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	**12 bulan**	**308.469.930**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispustaka	Jumlah buku yang di cetak	**6 jenis cetakan**	**8.500.000**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispustaka	Jumlah buku yang di cetak	**6 jenis cetakan**	**8.500.000**	
		Dispustaka	Jumlah digandakan	**9000 lembar foto copy**	**3.375.750**		Dispustaka	Jumlah digandakan	**9000 lembar foto copy**	**3.375.750**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispustaka	Jumlah pemasangan alat listrik untuk penerangan bangunan kantor	**5 gedung**	**5.008.000**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispustaka	Jumlah pemasangan alat listrik untuk penerangan bangunan kantor	**5 gedung**	**5.008.000**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispustaka	Jumlah tersedianya media cetak	**12 jenis**	**20.000.000**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Dispustaka	Jumlah tersedianya media cetak	**12 jenis**	**20.000.000**	

			untuk dilayankan kepada masyarakat			Perundang-undangan		untuk dilayankan kepada masyarakat			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispustaka	Jumlah logistik yang tersedia	**12 bulan**	**144.400.000**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispustaka	Jumlah logistik yang tersedia	**12 bulan**	**144.400.000**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispustaka	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	**4 kali**	**127.186.180**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispustaka	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	**4 kali**	**127.186.180**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan mebel	**8 buah**	**80.999.759**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah pengadaan mebel	**8 buah**	**80.999.759**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispustaka	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispustaka	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	
	Pengadaan Mebel	Dispustaka	Jumlah Pengadaan Mebel	**8 buah**	**16.000.000**	Pengadaan Mebel	Dispustaka	Jumlah Pengadaan Mebel	**8 buah**	**16.000.000**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispustaka	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	**5 jenis peralatan**	**64.999.759**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Dispustaka	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	**4 jenis peralatan**	**64.999.759**	

						Lainnya					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah penyediaan jasa penunjang kantor	**12 bulan**	**139.496.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah penyediaan jasa penunjang kantor	**12 bulan**	**139.496.800**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispustaka	Jumlah terkirimnya surat dan SPJ	**400 lembar**	**49.496.800**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispustaka	Jumlah terkirimnya surat dan SPJ	**400 lembar**	**49.496.800**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispustaka	Jumlah tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**12 bulan**	**48.000.000**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispustaka	Jumlah tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**12 bulan**	**48.000.000**	
	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dispustaka	Jumlah kantor menjadi bersih dan nyaman	**12 bulan**	**42.000.000**	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dispustaka	Jumlah kantor menjadi bersih dan nyaman	**12 bulan**	**42.000.000**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	**12 bulan**	**399.935.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	**12 bulan**	**399.935.000**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispustaka	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	**13 mobil dan sepeda motor**	**254.935.000**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispustaka	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	**13 mobil dan sepeda motor**	**254.935.000**	
	Pemeliharaan Mebel	Dispustaka	Jumlah Pemeliharaan Mebel	**25 buah**	**5.000.000**	Pemeliharaan Mebel	Dispustaka	Jumlah Pemeliharaan Mebel	**25 buah**	**5.000.000**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispustaka	Jumlah peralatan kantor terpelihara	**12 bulan**	**90.000.000**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispustaka	Jumlah peralatan kantor terpelihara	**12 bulan**	**90.000.000**	
	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Dispustaka	Jumlah Pemeliharaan aset tetap lainnya	**12 bulan**	**10.000.000**	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Dispustaka	Jumlah Pemeliharaan aset tetap lainnya	**12 bulan**	**10.000.000**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispustaka	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	**5 gedung**	**40.000.000**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispustaka	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	**5 gedung**	**40.000.000**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				**3.752.244.697**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				**3.752.244.697**	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Tenaga Pengelola perpustakaan yang dibina	**75,56**	**174.724.550**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		Tenaga Pengelola perpustakaan yang dibina	**75,56**	**174.724.550**	

	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Perpustakaan yang dibina	**50 kali**	**152.182.450**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**		Jumlah Perpustakaan yang dibina	**50 kali**	**152.182.450**	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dispustaka	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	-	-	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dispustaka	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	-	-	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah pelayanan perpustakaan untuk melayani masyarakat	**1000 orang**	**110.394.750**	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah pelayanan perpustakaan untuk melayani masyarakat	-	**110.394.750**	
	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Karangasem	Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah dibina	**50 kali**	**41.787.700**	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Karangasem	Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah dibina	**50 kali**	**41.787.700**	
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah perpustakaan desa yang sudah dibina	-	-	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah perpustakaan desa yang sudah dibina	-	-	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispustaka	Jumlah bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah/PD yang	-	-	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispustaka	Jumlah bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah/PD	-	-	

			terselenggara dengan baik					yang terselenggara dengan baik			
	Pengembangan Bahan Pustaka	Dispustaka	Jumlah jenis buku yang bertambah koleksinya	-	-	Pengembangan Bahan Pustaka	Dispustaka	Jumlah jenis buku yang bertambah koleksinya	-	-	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dispustaka	Jumlah jenis buku dikelola yang bertambah koleksinya	-	-	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dispustaka	Jumlah jenis buku dikelola yang bertambah koleksinya	-	-	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah kunjungan ke sekolah/desa	**50 kali**	**22.542.100**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**		Jumlah kunjungan ke sekolah/desa	**50 kali**	**22.542.100**	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Karangasem	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	-	-	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Karangasem	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	-	-	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dispustaka	Jumlah perayaan hari kunjung perpustakaan yang terlaksana	**1 kali**	**22.542.100**	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dispustaka	Jumlah perayaan hari kunjung perpustakaan yang terlaksana	**1 kali**	**22.542.100**	

	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dispustaka	Jumlah taman kanak-kanak/RA dan PAUD yang meningkat kemampuan anak dalam bercerita	-	-	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dispustaka	Jumlah taman kanak-kanak/RA dan PAUD yang meningkat kemampuan anak dalam bercerita	-	-	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispustaka	Jumlah lomba minat baca yang sudah dilaksanakan	-	-	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispustaka	Jumlah lomba minat baca yang sudah dilaksanakan	-	-	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Pelestarian Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan	**64,20**	**27.735.423**	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Pelestarian Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan	**64,20**	**27.735.423**	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan	**88 naskah**	**27.735.423**	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota**		Jumlah Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan	**88 naskah**	**27.735.423**	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Karangasem	Jumlah pendataan dan pelesterian naskah kuno yang di simpan oleh masyarakat	-	-	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Karangasem	Jumlah pendataan dan pelesterian naskah kuno yang di simpan oleh masyarakat	-	-	

	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kab. Karangasem	Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat	**8 naskah**	**27.735.423**	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kab. Karangasem	Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat	**8 naskah**	**27.735.423**	
	Pengembangan Koleksi Budaya Eknis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana	-	-	**Pengembangan Koleksi Budaya Eknis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**		Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana	-	-	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Karangasem	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana	-	-	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Karangasem	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana	-	-	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN				**185.533.150**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG**				**185.533.150**	

						KEARSIPAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase instansi yang telah mendapatkan pembinaan tata kelola kearsipan	**63,55**	**142.533.150**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		Persentase instansi yang telah mendapatkan pembinaan tata kelola kearsipan	**63,55**	**142.533.150**	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah pengelolaan arsip dinamis kabupaten karangasem	-	-	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota**		Jumlah pengelolaan arsip dinamis kabupaten karangasem	-	-	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Karangasem	Jumlah PD/desa yang sudah tertata arsipnya		-	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Karangasem	Jumlah PD/desa yang sudah tertata arsipnya		-	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Karangasem	Jumlah pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	-	-	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Karangasem	Jumlah pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	-	-	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah pengelolaan arsip statis kabupaten karangasem	-	-	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota**		Jumlah pengelolaan arsip statis kabupaten karangasem	-	-	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Karangasem	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan akuisisi	-	-	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Karangasem	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan akuisisi	-	-	

		Kab. Karangasem	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan penelusuran		-		Kab. Karangasem	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan penelusuran		-	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota		Jumlah pelayanan informasi arsip kabupaten karangasem	**12 bulan**	**142.533.150**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota**		Jumlah pelayanan informasi arsip kabupaten karangasem	**12 bulan**	**142.533.150**	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/kota Melalui JIKN	Dispustaka	Jumlah arsip yang sudah dimasukkan ke aplikasi SIKN dan JIKN	**12 bulan**	**24.999.750**	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/kota Melalui JIKN	Dispustaka	Jumlah arsip yang sudah dimasukkan ke aplikasi SIKN dan JIKN	**12 bulan**	**24.999.750**	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah PD/desa/lembaga yang dibina	**50 PD/Desa/Lembaga**	**75.000.000**	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah PD/desa/lembaga yang dibina	**50 PD/Desa/Lembaga**	**75.000.000**	
		Kab. Karangasem	Jumlah pengelola arsip yang dibintek	**40 PD/Desa**	**42.533.400**		Kab. Karangasem	Jumlah pengelola arsip yang dibintek	**40 PD/Desa**	**42.533.400**	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Jumlah lembar arsip yang masuk dalam aplikasi JIKN/SIKN	**1021**	**43.000.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		Jumlah lembar arsip yang masuk dalam aplikasi JIKN/SIKN	**1021**	**43.000.000**	

	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Jumlah daftar arsip usul musnah kabupaten karangasem	**5 PD**	**17.000.000**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**		Jumlah daftar arsip usul musnah kabupaten karangasem	**5 PD**	**17.000.000**	
	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Karangasem	Jumlah PD yang berkurang arsipnya yang telah jatuh retensi	**3 PD**	**17.000.000**	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Karangasem	Jumlah PD yang berkurang arsipnya yang telah jatuh retensi	**3 PD**	**17.000.000**	
	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab./ Kota yang digabung dan / atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan		Jumlah Penyelamatan arsip	**10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa**	**26.000.000**	**Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab./ Kota yang digabung dan / atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan**		Jumlah Penyelamatan arsip	**10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa**	**26.000.000**	
	Pendataan , penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan Pearangkat Daerah Kab/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah Perangkat Daerah/ Desa yang di data	-	-	Pendataan , penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan Pearangkat Daerah Kab/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah Perangkat Daerah/ Desa yang di data	-	-	

	Pendampingan penyelamatan arsiap bagi pemekaran desa / Kelurahan	Kab. Karangasem	Jumlah Desa yang dimekarkan	**3 Desa**	**26.000.000**	Pendampingan penyelamatan arsiap bagi pemekaran desa / Kelurahan	Kab. Karangasem	Jumlah Desa yang dimekarkan	**3 Desa**	**26.000.000**	
	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP		Persentase terlayaninya permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	-	**-**	**PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP**		Persentase terlayaninya permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	-	**-**	
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten / Kota		Persentase permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	-	**-**	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten / Kota**		Persentase permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	-	**-**	
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dispustaka	Jumlah SOP penggunaan Arsip Yang Bersifat tertutup			Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dispustaka	Jumlah SOP penggunaan Arsip Yang Bersifat tertutup			
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dispustaka	Jumlah Perangkat Daerah Yang Memiliki Arsip Yang Bersifat Tertutup	-	-	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dispustaka	Jumlah Perangkat Daerah Yang Memiliki Arsip Yang Bersifat Tertutup	-	-	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. RPJMN 2021-2026 dengan visi "**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" di KARANGASEM Melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA Menuju KARANGASEM ERA BARU** Yang **Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi (Prakerthi Nadi)**", yang mengandung makna "Menjaga Kesucian Dan Keharmonisan Alam Karangasem Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Karangasem Yang Sejahtera Dan Bahagia, Sekala Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Karangasem Sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno : Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi". diwujudkan melalui sembilan 6 Misi, yang dijabarkan ke dalam 3 konsep Karangasem Prakerthi Nadi (Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi yaitu :

1) Karangasem Pradnyan adalah Karangasem yang cerdas dan bijaksana, Karangasem yang kompetitif / berdaya saing, dan Karangasem yang visioner, kreatif, inovatif, produktif, terbuka dan tetap "mataksu" yang senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan.
2) Karangasem Kertha adalah Karangasem yang sejahtera / sukerta, sehat dan bahagia
3) Karangasem Shanti adalah Karangasem Nyaman, Aman, Damai dan Indah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem telah menentukan arah kebijakan yang akan di ambil. Kebijakan tersebut mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kebijakan-kebijakan ini merupakan prioritas untuk melaksanakan program kerja. Kebijakan di maksud adalah :

a. Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat
b. Pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan
c. Melaksanakan sosialisasi/pemasyarakatan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perpustakaan dan kearsipan
d. Peningkatan pelayanan perpustakaan dan kearsipan
e. Melestarikan bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa melalui preservasi,

konservasi, restorasi

f. Menyediakan bahan pustaka melalui pembelian, hibah/ sumbangan dan pelaksanaan serah simpan karya cetak.
g. Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi
h. Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna
i. Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dalam rangka mencapai Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem telah ditetapkan tujuan merujuk pada Renstra 2021-2026

1. Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Dalam rangka mencapai tujuan ditetapkan sasaran merujuk pada Renstra 2021-2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

Perumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di atas berdasarkan visi Kabupaten Karangasem sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 adalah NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI DENGAN POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA MENUJU KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SHANTI DAN NADI, dimana kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem menetapkan 6 Misi yang kaitannya dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem yaitu Misi (3) **Mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konfrehensif dan terintegrasi,** Tujuan (10) Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem Sasaran (18) Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem dan Misi (6) **Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi**

serta pelayanan publik yang prima, Tujuan (22) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Sasaran (33) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan Karangasem perihal 7 bidang prioritas untuk mendukung arah kebijakan sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, yaitu : Bidang (4) : Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya. Yang dikaitkan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem salah satunya Bidang Tradisi, Seni dan Budaya dengan didukung Program Pelestarian Koleksi Nasioanl dan Naskah Kuno bertujuan untuk meningkatkan keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah daerah dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem dimana merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem dalam bidang urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

Analisa dari 6 (enam) misi, 22 (dua puluh dua) tujuan dan 34 (tiga puluh empat) sasaran yang meliputi 7 bidang prioritas dilaksanakan untuk mengidentifikasi keserasian dan keselasaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bupati Karangasem 2021 – 2026, dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah untuk menuntaskan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan program masing-masing perangkat daerah. Selain itu perumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan didasarkan pada aspirasi masyarakat dan juga memperhatikan kebutuhan pemerintah Kabupaten Karangasem

b. Pencapaian MDGs,

Millinium Development Golds merupakan kesepakan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Karangasem diimplentasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Perangkat Daerah.

c. Pengentasan kemiskinan,

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius, upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Bali, demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Program, kegiatan dan sub kegitan yang dirancang pada tahun III Renja 2023 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat misalnya khususnya bidang pendidikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem melaksanakan kegiatan Operasional Mobil/Motor Pintar dan Operasional Perpustakaan Keliling ke sekolah/desa di 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem.

d. Pencapaian NSPK dan SPM,

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, standar prosedur dan kreteria (NSPK) yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah Birokrasi yang tinggi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi hal tersebut dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak

ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pembinaan Perpustakaan.

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

Kabupaten Karangasem sebagai sebuah Kabupaten di Bali memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Provinsi Bali. Potensi itu terutama terkait dengan di bidang Pertanian seperti komoditi Salak, Jambo Mete, Buah Kelapa, serta aneka kerajinan seperti kerajinan tenun songket, kerajinan ata, kerajinan arak serta obyek-obyek pariwisata budaya terutama culture heritage (warisan budaya) dan budaya rohani. Renja 2024 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kabupaten Karangasem melalui penyusunan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi :

a. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah 5 Program, 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kabupaten Karangasem dan melingkupi semua Sekolah/Desa.

c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan Tahun 2024 sebesar Rp. 3.937.777.847,-.

3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya adalah :

   Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau diajukan pada tahun mendatang.

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IndikatorProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2					PERPUSTAKAAN				**3.937.777.847**				**4.526.129.098**
2	**23**				URUSAN KABUPATEN / KOTA				**3.752.244.697**				**4.281.129.098**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan		**8 dokumen**	**3.549.784.724**			**8 dokumen**	**3.775.611.998**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		**8 dokumen**	**70.744.000**			**8 dokumen**	**70.744.000**
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dispustaka	**1 dokumen**	**2.000.000**	APBD		**1 dokumen**	**2.000.000**

2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispustaka	**1 dokumen**	**2.000.000**	APBD		**1 dokumen**	**2.000.000**
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispustaka	**1 dokumen**	**2.000.000**	APBD		**1 dokumen**	**2.000.000**
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispustaka	**1 dokumen**	**2.000.000**	APBD		**1 dokumen**	**2.000.000**
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Dispustaka	**1 dokumen**	**2.000.000**	APBD		**1 dokumen**	**2.000.000**
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan realisasi anggaran yang dibuat	Dispustaka	**2 dokumen**	**58.744.000**	APBD		**2 dokumen**	**58.744.000**
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Capaian Kinerja	Dispustaka	**1 dokumen**	**2.000.000**	APBD		**1 dokumen**	**2.000.000**
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah anggaran yang direalisasikan		**12 bulan**	**2.550.139.235**			**12 bulan**	**2.738.305.312**
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Dispustaka	**12 bulan**	**2.550.139.235**	APBD		**12 bulan**	**2.738.305.312**

2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran		**12 bulan**	**308.469.930**			**12 bulan**	**308.469.930**
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah buku yang di cetak	Dispustaka	**6 jenis cetakan**	**8.500.000**	APBD		**6 jenis cetakan**	**8.500.000**
						Jumlah digandakan	Dispustaka	**9000 lembar foto copy**	**3.375.750**	APBD		**9000 lembar foto copy**	**3.375.750**
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemasangan alat listrik untuk penerangan bangunan kantor	Dispustaka	**5 gedung**	**5.008.000**	APBD		**5 gedung**	**5.008.000**
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya media cetak untuk dilayankan kepada masyarakat	Dispustaka	**12 jenis**	**20.000.000**	APBD		**12 jenis**	**20.000.000**
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang tersedia	Dispustaka	**12 bulan**	**144.400.000**	APBD		**12 bulan**	**144.400.000**
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dispustaka	**4 kali**	**127.186.180**	APBD		**4 kali**	**127.186.180**
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan mebel		**8 buah**	**80.999.759**			**8 buah**	**80.999.759**
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispustaka		-				-
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Dispustaka	**8 buah**	**16.000.000**	APBD		**8 buah**	**16.000.000**

2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Dispustaka	**4 jenis peralatan**	**64.999.759**	APBD		**4 jenis peralatan**	**64.999.759**
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah penyediaan jasa penunjang kantor		**12 bulan**	**139.496.800**			**12 bulan**	**177.157.993**
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah terkirimnya surat dan SPJ	Dispustaka	**400 lembar**	**49.496.800**	APBD		**400 lembar**	**65.157.993**
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispustaka	**12 bulan**	**48.000.000**	APBD		**12 bulan**	**70.000.000**
2	23	01	2.08	03	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kantor menjadi bersih dan nyaman	Dispustaka	**12 bulan**	**42.000.000**	APBD		**12 bulan**	**42.000.000**
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah		**12 bulan**	**399.935.000**			**12 bulan**	**399.935.000**
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Dispustaka	**13 mobil dan sepeda motor**	**254.935.000**	APBD		**13 mobil dan sepeda motor**	**254.935.000**
2	23	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Dispustaka	**25 buah**	**5.000.000**	APBD		**25 buah**	**5.000.000**

2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor terpelihara	Dispustaka	**12 bulan**	**90.000.000**	APBD		**12 bulan**	**90.000.000**
2	23	01	2.09	07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Pemeliharaan aset tetap lainnya	Dispustaka	**12 bulan**	**10.000.000**	APBD		**12 bulan**	**10.000.000**
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Dispustaka	**5 gedung**	**40.000.000**	APBD		**5 gedung**	**40.000.000**
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				**3.752.244.697**				**1.643.300.000**
2	23	02			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Tenaga Pengelola perpustakaan yang dibina		**75,56**	**174.724.550**			**75,56**	**414.000.000**
2	**23**	02	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	Jumlah Perpustakaan yang dibina		**50 kali**	**152.182.450**			**50 kali**	**314.000.000**
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dispustaka	**12 bulan**	**-**	APBD		**12 bulan**	**-**
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perpustakaan untuk melayani masyarakat	Kab. Karangasem	**1000 orang**	**110.394.750**	APBD		**1000 orang**	**214.000.000**
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah dibina	Kab. Karangasem	**50 kali**	**41.787.700**	APBD		**50 kali**	**100.000.000**

2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan desa yang sudah dibina	Kab. Karangasem	**50 kali**	**-**	APBD		**50 kali**	**100.000.000**
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah/PD yang terselenggara dengan baik	Dispustaka	-	-	APBD		-	-
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah jenis buku yang bertambah koleksinya	Dispustaka	-	-	APBD		-	-
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah jenis buku dikelola yang bertambah koleksinya	Dispustaka	-	-	APBD		-	-
2	**23**	02	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	Jumlah kunjungan ke sekolah/desa		**50 kali**	**22.542.100**			**50 kali**	**100.000.000**
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Karangasem	-	-	APBD		-	-
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah perayaan hari kunjung perpustakaan yang terlaksana	Dispustaka	**1 kali**	**22.542.100**	APBD		**1 kali**	**100.000.000**
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah taman kanak-kanak/RA dan PAUD yang meningkat kemampuan anak dalam bercerita	Dispustaka	-	-	APBD		-	-

2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lomba minat baca yang sudah dilaksanakan	Dispustaka	-	-	APBD		-	-
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan		**64,20**	**27.735.423**			**64,20**	**91.517.100**
2	**23**	03	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota**	Jumlah Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan		**78 naskah**	**27.735.423**			**78 naskah**	**91.517.100**
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah pendataan dan pelesterian naskah kuno yang di simpan oleh masyarakat	Kab. Karangasem	**70**	-	APBD		**70**	-
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat	Kab. Karangasem	**8 naskah**	**27.735.423**	APBD		**8 naskah**	**91.517.100**
2	**23**	03	2.02		**Pengembangan Koleksi Budaya Eknis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana		-	-			-	-
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang	Kab. Karangasem	-	-	APBD		-	-

						terlaksana							
2	24				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN**				**185.533.150**				**425.000.000**
2	24	02			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase instansi yang telah mendapatkan pembinaan tata kelola kearsipan		**65,55**	**142.533.150**			**65,55**	**170.000.000**
2	24	02	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota**	Jumlah pengelolaan arsip dinamis kabupaten karangasem		**12 bulan**	-			-	-
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah PD/desa yang sudah tertata arsipnya	Kab. Karangasem		-			-	-
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Karangasem	**12 bulan**	-			-	-
2	24	02	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota**	Jumlah pengelolaan arsip statis kabupaten karangasem		**4 PD**	-			-	-
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan akuisisi	Kab. Karangasem	**5 PD/Desa**	-	APBD		-	-
						Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan penelusuran	Kab. Karangasem		-			-	-

2	24	02	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota**	Jumlah pelayanan informasi arsip kabupaten karangasem		**12 bulan**	**142.533.150**			**12 bulan**	**170.000.000**
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/kota Melalui JIKN	Jumlah arsip yang sudah dimasukkan ke aplikasi SIKN dan JIKN	Dispustaka	**12 bulan**	**24.999.750**	APBD		**12 bulan**	**30.000.000**
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD/desa/lembaga yang dibina	Kab. Karangasem	**50 PD/Desa/Lembaga**	**75.000.000**	APBD		**50 PD/Desa/Lembaga**	**90.000.000**
						Jumlah pengelola arsip yang dibintek	Kab. Karangasem	**40 PD/Desa**	**42.533.400**			**40 PD/Desa**	**50.000.000**
2	24	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Jumlah lembar arsip yang masuk dalam aplikasi JIKN/SIKN		**1021**	**43.000.000**			**1061**	**75.000.000**
2	24	03	2.01		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Jumlah daftar arsip usul musnah kabupaten karangasem		**5 PD**	**17.000.000**			**5 PD**	**35.000.000**
2	24	03	2.01	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah PD yang berkurang arsipnya yang telah jatuh retensi	Kab. Karangasem	**3 PD**	**17.000.000**	APBD		**3 PD**	**35.000.000**

2	24	03	2.03		**Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab./ Kota yang digabung dan / atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan**	Jumlah Penyelamatan arsip		**10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa**	**26.000.000**			**10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa**	**75.000.000**
2	24	03	2.03	01	Pendataan , penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan Pearangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah/ Desa yang di data	Kab. Karangasem	**75 PD/Desa**	-			-	-
2	24	03	2.03	04	Pendampingan penyelamatan arsiap bagi pemekaran desa / Kelurahan	Jumlah Desa yang dimekarkan	Kab. Karangasem	**3 Desa**	**26.000.000**	APBD		**3 Desa**	**40.000.000**
2	24	04			**PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Persentase terlayaninya permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		100%	-			-	-
2	24	04	2.01		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten / Kota**	Persentase permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		100%	-			-	-
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP penggunaan Arsip Yang Bersifat tertutup	Dispustaka						
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang	Jumlah Perangkat Daerah Yang Memiliki Arsip Yang Bersifat Tertutup	Dispustaka	2 PD	-	APBD		-	-

					Bersifat Tertutup									

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dari pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan terdiri dari :

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan menurut Kepmendagri 050/3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      b. Pengadaan Mebel
      c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    c. Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    b. Pemeliharaan Mebel
    c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    d. Pemeliharaan aset tetap lainnya
    e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    a. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    b. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    a. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

C. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
    a. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan

D. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
1. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota
    a. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/kota Melalui JIKN
    b. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota

E. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
    a. Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
2. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab./ Kota yang digabung dan / atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

a. Pendampingan penyelamatan arsiap bagi pemekaran desa / Kelurahan

4.2 Pagu Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pagu penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah bahan awal untuk usulan pendanaan yang mengacu pada Dukumen Perubahan Renstra 2021-2026 dengan 5 Program, 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan kebutuhan pagu sebesar Rp. 3.937.777.847,-.dari hasil pemetaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 / 3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 pagu tersebut dituangkan ke dalam 5 Program, 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan.

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karangasem serta tujuan dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026. Rancangan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rancangan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain. Rancangan Renja sebagai pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem di dalam penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal sebagai berikut :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2024.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2024.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem selain sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem. Untuk dapat merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia di Renja tahun 2024. Disamping itu Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Karangasem serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Karangasem.

Demikian rencana kerja ini diusulkan untuk dapat menjadi masukkan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Amlapura, 31 Juli 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Karangasem



I Wayan Putra Laba Erawan, SH.,MM
NIP .19641231 199203 1 170